

KELOLA SENDANG

BERLAYAR SAMBIL MEMBANGUN KAPAL DI SEMBILANG-DANGKU

KELOLA SENDANG

*Berlayar Sambil  
Membangun Kapal  
di Sembilang-Dangku*



SatuDunia



ZSL  
LET'S WORK  
FOR WILDLIFE



KELOLA SENDANG

*Berlayar Sambil  
Membangun Kapal  
di Sembilang-Dangku*

MARDIYAH CHAMIM dkk.



SatuDunia



ZSL  
LET'S WORK  
FOR WILDLIFE

KELOLA SENDANG

**BERLAYAR SAMBIL  
MEMBANGUN KAPAL  
DI SEMBILANG-DANGKU**

KELOLA SENDANG

## **BERLAYAR SAMBIL MEMBANGUN KAPAL DI SEMBILANG-DANGKU**

PENULIS:

**Mardiyah Chamim**  
**Bonardo Maulana Wahono**  
**Khairul Anam**  
**Yosep Suprayogi**

PERISET:

**Grahita Wimaya**  
**Okti Fathony Purnama**  
**Richaldo Harianja**  
**Suci Vistaria**

PENYUNTING:

**Purwanto Setiadi**

FOTO:

**Michael C Matthew**  
**La Ode Muhammad Rabiali**

SAMPUL DEPAN:

**Pesisir hutan mangrove di lanskap Sembilang-Dangku  
dilihat dari atas. (Foto: Kelola Sendang)**

DESAIN & TATA LETAK:

**Andi Supriyanto**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Diterbitkan oleh ZSL Indonesia dan Kelola Sendang

## **DAFTAR ISI**

<b>Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Berlayar Sambil Membangun Kapal di Sembilang Dangku ...</b>	<b>2</b>
Kemitraan, Itu Kuncinya .....	<b>10</b>
Berlayar Sambil Membuat Kapal .....	<b>18</b>
10 Prinsip, Kompas Panduan Berlayar .....	<b>26</b>
Kisah Perubahan, dari Sungsang sampai Dangku .....	<b>33</b>
Sembilang-Dangku, Perjalanan Berlanjut .....	<b>42</b>
<b>Konservasi .....</b>	<b>48</b>
<b>Menyelamatkan Dudung dan 22 Gajah .....</b>	<b>48</b>
Kantong Habitat Gajah .....	<b>55</b>
Dudung nan Beruntung .....	<b>57</b>
<b>'Keblasuk' di Hutan Dangku .....</b>	<b>60</b>
Kampung Pendetang di Hutan .....	<b>65</b>
Menertibkan Identitas, Mencatat Penghuni .....	<b>75</b>
Konservasi sebagai Ekosistem Lanskap .....	<b>79</b>
Coba Datang 5 Tahun Lagi .....	<b>84</b>
<b>Di Pulau Gading, Damai Itu Mungkin .....</b>	<b>86</b>
Konsesi yang Meledakkan Konflik .....	<b>90</b>
Setelah Sugiyono Bertemu HaKI .....	<b>93</b>
<b>Terpal Sakti dan Para Jagawana .....</b>	<b>102</b>
Menjaga Air, Menolak Api .....	<b>109</b>
Dari Lahan Ilegal ke Perhutanan Sosial .....	<b>113</b>

<b>Livelihood</b> .....	<b>120</b>
<b>Tujuh ‘Setan’ Desa dengan Koperasinya</b> .....	<b>120</b>
Mendis, Karet, dan Pendatang .....	<b>125</b>
Tujuh Petani dan Amarah Toke .....	<b>128</b>
Dari Karet ke Pinang .....	<b>136</b>
<b>Gurindam dari Tengah Hutan</b> .....	<b>138</b>
Hutan dalam Desa .....	<b>142</b>
Mimpi Desa Wisata Buah .....	<b>146</b>
Lubuk Beragam Lebah Madu .....	<b>154</b>
Musuh Laten .....	<b>161</b>
<b>Membenahi Daratan Sampah Sungsang</b> .....	<b>164</b>
Sampah sebagai Daratan .....	<b>168</b>
Memaksimalkan Air Hujan .....	<b>177</b>
Menuju Visi Ecoeduwisata .....	<b>180</b>
Bukan Lagi Hukuman .....	<b>181</b>
<b>Produksi</b> .....	<b>184</b>
<b>Hama Tikus dan Siasat Serak Jawa</b> .....	<b>184</b>
Menampik Tikus dengan <i>Tyto alba</i> .....	<b>188</b>
Belajar Mendongkrak Nilai Kopra .....	<b>193</b>
Mengulik Lahan Sayuran .....	<b>195</b>
Menuju Cadangan Air Hujan Lebih Baik .....	<b>196</b>
Masih Butuh Pendampingan .....	<b>198</b>
<b>Guru Tung Berdiri, Murid Tung Berlari</b> .....	<b>200</b>
Generasi Hijau .....	<b>204</b>
Dari Bak Sampah ke Bank Sampah .....	<b>208</b>
Mimpi Baru Guru Tung .....	<b>216</b>
<b>Epilog</b> .....	<b>218</b>

# Pengantar

**B**arangkali tak ada yang lebih membesarkan hati dibandingkan pekerjaan mengantarkan buku yang penerbitannya diperlukan untuk mengisahkan sebuah upaya membuat perubahan. Bukan perubahan yang remeh, karena, seperti akan bisa dibaca di halaman-halaman selanjutnya, upaya itu berkaitan dengan penataan alam agar bisa dikelola secara berkelanjutan.

Pelestarian alam memang merupakan keniscayaan, apalagi bila mengingat adanya kegentingan akibat ancaman perubahan iklim. Alam yang bisa dikelola secara berkelanjutan berpeluang memainkan peran dalam mengurangi risiko ancaman yang ada. Tapi, agar bisa dikelola secara berkelanjutan, alam yang rusak atau merosot kualitasnya mesti diperbaiki lebih dulu.

Menghadapi kondisi hutan yang sebagian besar telah mengalami degradasi, Program Kemitraan Pengelolaan Sembilang-Dangku (Kelola Sendang) bisa diibaratkan sebagai misi yang nyaris mustahil. Bagaimana tidak. Program ini luar biasa dari segis kala dan ragam bentang alam yang ditanganinya: cakupan kawasannya mencapai 1,6 juta hektare, meliputi dua kabupaten, dan menghamparkan hutan, lahan gambut, serta kawasan pesisir sekaligus. Lebih dari itu, permukiman masyarakat, perkebunan milik beraneka perusahaan, tambang, taman nasional, juga suaka margasatwa di dalamnya memastikan betapa kompleksnya persaingan dalam penggunaan lahan.

Ancaman perubahan iklim, juga potensi dinamika yang menantang, melatar belakangi digulirkannya program Kelola

Sendang--di antara faktor-faktor lain. Sekalipun jangka waktunya sempit, untuk sebuah pekerjaan raksasa, pelaksana pada akhirnya bisa menemukan jalan keluar dari rintangan, format realisasinya di lapangan, dan penyesuaian-penyesuaian yang mesti dilakukan sehingga program bisa berjalan. Tentu saja, ada yang belum berhasil, ada yang masih menjalani tarik ulur. Tapi banyak juga pembelajaran dan cerita perubahannya.

Setelah melalui semua itu, bagaimanapun, Kelola Sendang bisa dibilang telah menjadi laboratorium hidup tentang pengelolaan lanskap berkelanjutan. Dari laboratorium itu banyak pelajaran yang bisa diterapkan untuk langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah yang tetap diperlukan, termasuk menjaga dan menumbuhkan kemitraan--yang sejak awal dipilih sebagai tiang penyangga pelaksanaan program.

Pelajaran apa pun selalu berguna bagi siapa saja, pihak yang tak langsung mendapatkannya. Begitu pula sebaiknya pelajaran-pelajaran yang bisa dihimpun dari pelaksanaan Kelola Sendang.

Palembang, 11 Maret 2020

**Prof. Dr. Damayanti Buchori**  
Project Director KELOLA Sendang



# BERLAYAR SAMBIL MEMBANGUN KAPAL DI SEMBILANG DANGKU

Surya terbit di  
Lubuk Bintialo,  
Batanghari Leko,  
Musi Banyuasin.

FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

Sebuah inisiatif dan inovasi pengelolaan lanskap Sumatera Selatan yang berkelanjutan. Bermodal daya adaptasi, dikuatkan oleh ikatan kemitraan dan merangkul komunitas. Inisiatif yang layak diteruskan dan direplikasi.

**H**ari itu 28 Maret 684. Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya, meresmikan Taman Srikserta. Empat belas baris pesan yang dipahat di batu dengan huruf Pallawa dalam Bahasa Melayu kuno menyatakan, antara lain: “Semoga tanaman-tanaman, bendungan-bendungan, kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah dan yang tidak, dan menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan.”

Prasasti Talang Tuwo. Batu tempat naskah kuno dipahat dengan telaten itu tak besar, hanya 50x80 sentimeter, sekira-kira dua kali layar komputer jinjing. Namun gagasan yang diusung jauh melampaui zaman. Sang Raja memberi contoh di Taman Srikserta. Dia menanam pohon kelapa, aren, pinang, sagu, beragam bambu (disebut sebagai aur, buluh, betung), membuat ko-

lam dan bendungan, demi kebaikan semua makhluk, yang bisa bergerak dan yang tak dapat bergerak. “Semoga apa yang mereka kerjakan, semesta dan semua bintang mendukungnya,” demikian lanjutan pesan Sang Raja.

Empat belas abad telah berlalu sejak Prasasti Talang Tuwo. Dunia sudah jauh berubah. Huruf Pallawa tak lagi digunakan, dokumen tak lagi dipatri dalam batu prasasti. Namun pesan Sri Jayanasa tak lekang, bahkan menjadi makin

penting. Menanam pohon, menjaga mata air, menjaga keseimbangan, bahkan mempelajari semua planet dan bintang, untuk kemaslahatan semua makhluk. Sebuah pesan yang kian krusial di masa krisis perubahan iklim.

Pesan Sang Raja mendapat “nyawa” pada 2015. Prasasti Talang Tuwo seperti teguran dan gugatan keras kepada berbagai pihak, pemerintah, swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat semua lapisan. Mengapa keseimbangan alam tak lagi dijaga, hingga kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat melanda.

Juli-Oktober 2015, Sumatera, Kalimantan, dan Papua dihajar kebakaran hutan dan lahan parah – tragedi yang kemudian berulang pada 2019. Ketika itu kemarau berkepanjangan, gejala iklim El Nino, salah urus lingkungan di berbagai lini yang kronis, kurangnya antisipasi dan mitigasi, membuat 2,6 juta hektare hutan dan lahan ludes terbakar.

Sumatera Selatan ada di peringkat pertama yang menderita kerugian, dengan 646 ribu hektare lahan ditelan api; sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut. Di seluruh Indonesia kebakaran hutan dan lahan ini menelan 19 korban meninggal dan diperkirakan 500 ribu orang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). World Bank, dalam laporan berjudul “The Cost of Fire”, memperkirakan kerugian Indonesia akibat kebakaran hutan saat itu mencapai Rp 221 triliun atau \$ 16,1 miliar; dengan kerugian Sumatera Selatan tercatat Rp 53,8 triliun. Tak

terhitung keberagaman hayati, satwa dan tumbuhan, musnah tersebut api.

Hari-hari itu penuh jerebu. Jembatan Ampera, landmark Kota Palembang, hampir tak tampak dari jarak 500 meter. Tak sedikit penerbangan yang dibatalkan. Asap tebal membubung tinggi sampai ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di media sosial, ribuan orang melontarkan keluhan, kritik, hingga makian pedas. Mereka menggugat pemerintah. Alex Noerdin, gubernur ketika itu, dijuluki *The Haze Governor* alias Gubernur Asap.

Kebakaran itu membuat Alex Noerdin gerah dan kemudian bergerak. “Saya tidak mau lagi dijuluki sebagai Gubernur Asap oleh orang Singapura,” katanya dalam sebuah jumpa pers di Palembang, 25 Juli 2016. “Kita harus bertindak. Jika kita tidak serius menangani hal ini, kita akan lebih malu lagi.”

Alex Noerdin mengetuk jejaring internasional, terutama pemerintah Norwegia dan Inggris – dua negara yang banyak terlibat dalam program mengatasi deforestasi di Indonesia. Alex juga mengetuk berbagai lembaga internasional dan korporasi, yakni David and Lucille Packard Foundation, Deltares, IDH-The Sustainable Trade Initiative, SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) Netherlands Development Organisation, Forest People Program, Daemeter Consulting.

Sebuah konsorsium kemudian bersepakat menjalankan komitmen visi pertumbuhan hijau yang ditawarkan Gubernur Alex Noerdin. “Begitu pentingnya lahan gambut dan hutan kita, baik dalam hal biodiversitas dan perubahan iklim, maka sangat perlu kita bersama bertindak untuk melindungi lingkungan demi masa depan,” kata Alex Noerdin dalam peluncuran program bertajuk “Kemitraan Sumatera Selatan untuk Pengelolaan Manajemen Lanskap Terpadu” pada 2016. Langkah kolaborasi internasional untuk pertumbuhan hijau di Sumatera Selatan telah resmi diayun.



Penanaman mangrove, salah satu program Kelola Sendang di Muara Medak, Bayung Lencir, Musi Banyuasin.

FOTO: KELOLA SENDANG

Zoological Society of London (ZSL) dipercaya sebagai motor konsorsium yang menjalankan Program Kelola Sendang (Kemitraan Pengelolaan Sembilang-Dangku). Sebagai lembaga konservasi yang telah berusia satu abad, berpusat di London, ZSL secara aktif mempromosikan pentingnya perlindungan satwa di alam liar. Misi program ini selaras dengan moto ZSL: Let's Work for Wildlife.

Sumatera Selatan, sebagai habitat berbagai hewan endemik, antara lain harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*), gajah, tapir, beruang madu, dan burung hantu, adalah area yang penting bagi ZSL. Jonathan Baillie, Direktur Program Konservasi ZSL, dalam peluncuran Program Kelola Sendang, menyebutkan bahwa krisis kebakaran hutan pada 2015 adalah momen penentu yang mendorong terjalinnya kolaborasi. "Mencari solusi atas berbagai persoalan ekologi yang dihadapi Indonesia harus menjadi bagian dari upaya konservasi secara global," kata Jonathan Baillie, seperti ditulis di laman ZSL.

Buku ini menyajikan perjalanan kolaborasi untuk mewujudkan serangkaian program pengelolaan lanskap terpadu di Sumatera Selatan itu, sejak 2016 hingga berakhir pada Maret 2020. Harus diakui, keterbatasan waktu membuat kami tak bisa leluasa menengok seluruh area kerja pengelolaan lanskap terpadu Kelola Sendang-ZSL. Dalam tempo dua bulan, pada akhir Januari sampai awal Maret 2020, kami turun ke lapangan, memotret kisah perubahan yang terjadi di level tapak, dan menuangkannya dalam buku. Karenanya, dengan rendah hati kami mengakui bahwa buku ini hanya mewakili penggalan-penggalan kisah perubahan di lapangan.

## Kemitraan, Itu Kuncinya

“Awalnya, saya ragu,” kata Profesor Damayanti Buchori, ahli evolusi ekologi dan pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), saat didapuk menjadi Direktur Proyek Kelola Sendang-ZSL. “Karena saya tahu, situasi lapangan sudah terlalu kompleks. Sebagian besar hutan sudah mengalami degradasi dengan berbagai alasan. Apakah kita bisa mewujudkan pengelolaan lanskap yang sustainable?”

Krisis iklim kian bergejolak, bahkan PBB meramalkan dunia akan mencapai “*point of no return*”, titik kritis, jika tak kunjung ada intervensi memperlambat perubahan iklim secara signifikan. Ikhtiar mewujudkan pengelolaan alam yang *sustainable*, berkelanjutan, menjadi kian penting. Karenanya, pada 2016, Damayanti memutuskan menerima tawaran Kelola Sendang-ZSL. “Ini program yang sangat menantang,” katanya. “Sejak awal saya tahu perjalanan Kelola Sendang bakal penuh warna dan dinamika.”

Kelola Sendang memang bukan program biasa. Luasan area kerja proyek ini tak lumrah, yakni mencakup dua kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Musi Banyuasin dan Banyuasin. Total kawasan mencapai 1,6 juta hektare. Ini berarti hampir 25 kali lipat wilayah DKI Jakarta dan sepuluh kali lipat kota London. Ada 19 kecamatan dan 223 desa yang masuk dalam rentang lanskap Sembilang-Dangku.

Berbagai ragam bentang alam tersedia di sini, mulai dari hutan, lahan gambut, sampai pesisir. Seluruh area ini dibatasi dua daerah aliran sungai (DAS), yakni Sub DAS Benawang di Sembilang dan Calik di dalam DAS Musi. Taman Nasional Sembilang (di Kabupaten Banyuasin) dan Suaka Margasatwa Dangku (di Kabupaten Musi Banyuasin) ada di antara kedua daerah aliran sungai ini. Itulah sebabnya program ini dinamai Kelola Sendang, yakni pengelolaan kawasan yang terbentang dari Sembilang

hingga Dangku. “Sendang juga bermakna kolam dari mata air yang jernih, yang menjadi sumber kehidupan,” kata Damayanti.

Tak hanya luasan yang istimewa. Lanskap Sembilang-Dangku merupakan bagian dari Sumatera Selatan yang punya riwayat sejarah peradaban penting. Prasasti Talang Tuwo menunjukkan bahwa bumi Sriwijaya telah berkembang sejak abad ketujuh. Naskah kuno itu mengisyaratkan betapa pembangunan yang selaras dengan alam telah diterapkan pada saat itu. Tentu saja, ada catatan yang mesti disertakan: bahwa kehidupan pada abad ketujuh jauh lebih sederhana.

Area seluas 1,6 juta hektare bukan laboratorium yang steril. Lanskap bukan sekadar bentang alam berbatas lembah, bukit, gunung, atau sungai. Ini kawasan yang punya riwayat kontestasi penggunaan lahan yang kompleks, lengkap dengan dinamika dan sistem sosial budaya belasan abad. Permukiman masyarakat, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, perkebunan milik perusahaan berbagai skala, tambang, taman nasional, suaka margasatwa, semuanya terdapat di dalam kawasan ini.

Berbagai masalah, juga peluang, hambatan, dan tantangan, serba ada. Karenanya, mengelola lanskap Sembilang-Dangku dengan pendekatan yang sustainable merupakan sebuah kerja raksasa. Sebagian orang mungkin bergumam dalam hati, “Ini, sih, *mission impossible!*” Buku ini akan menjabarkan sebagian di-



***Ini program yang sangat menantang, sejak awal saya tahu perjalanan Kelola Sendang bakal penuh warna dan dinamika***



**PROF. DAMAYANTI BUCHORI**  
Ahli Evolusi Ekologi  
Institut Pertanian Bogor



Desa Sunggang, Banyuasin, yang menjadi area kerja Kelola Sendang menghadapi masalah sampah yang parah.

FOTO: BONA

namikanya, tentang bagaimana mission impossible itu dijalankan di lapangan. Ada yang belum berhasil, ada yang masih tarikulur mencari format, tapi banyak juga pembelajaran dan kisah perubahan yang mengesankan. “Well, ternyata banyak gagasan yang bisa kami wujudkan di lapangan, meskipun belum sempurna,” kata Damayanti Buchori.

Karena kompleksnya persoalan di lanskap Sedang-Dangku telah disadari sejak awal, kemitraan dipilih sebagai tiang utama dengan pemerintah sebagai simpul utama. Pihak-pihak lain, LSM, lembaga donor, swasta, bisa datang dan pergi, berganti-ganti. Namun pemerintah akan selalu ada dan karenanya penting terlibat mengawal berjalannya program. “Kami menyebutnya *government-led project*,” kata Regina Ariyanti, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan dan pengelolaan lanskap, menurut dia, bukanlah tugas pemerintah saja, bukan tugas swasta saja, juga bukan tugas masyarakat saja. “Semua saling berkaitan. Tanggung jawab ada pada semua pemangku kepentingan,” katanya.

Guna memastikan kolaborasi berlangsung efektif, Gubernur Alex Noerdin menetapkan Kemitraan Hijau dengan jajaran pejabat pemerintah sebagai Program Supervisory Unit (PSU) dan Program Implementing Unit (PIU). Tugas PSU lebih berupa pengembangan strategi dan monitoring keseluruhan program. Pertemuan periodik dengan semua mitra dilakukan untuk memudahkan proses monitoring ini. “PIU berperan sebagai semacam sekretariat yang memungkinkan beragam kolaborasi menjadi efektif,” kata Regina, yang ditetapkan sebagai Ketua PSU Kemitraan Kelola Sendang.

Setahun pertama berjalannya Kelola Sendang, 2016, energi seluruh tim banyak tercurah untuk koordinasi dan membangun kesepakatan bersama antarelemen pendukung-konsorsium. Menyamakan frekuensi di antara semua pihak yang terlibat. Ini persoalan yang tak bisa dianggap enteng. “Tidak jarang kami

bersitegang, meskipun setelah berdialog cukup panjang bisa tercapai kata sepakat,” kata Damayanti.

Prinsip kemitraan terus dipegang Kelola Sendang hingga kini, saat kepemimpinan Sumatera Selatan berganti ke Gubernur Herman Deru. Tentu, tak semua hal berjalan mulus. Berbagai hambatan di lapangan butuh direspons dengan kemampuan belajar yang cepat dan sigap. “Waktu kita tak banyak, berlomba dengan perubahan iklim dan juga jangka waktu proyek yang lima tahun.” kata Regina. “Kita harus belajar cepat tapi tetap menghargai proses kolaboratif. Selalu adaptif, berulang kali mengecek kondisi lapangan, menggali apa yang sebenarnya terjadi, dan bersama mencari solusi.”

Di tingkat tapak, Kelola Sendang bekerja sama dengan banyak mitra yang berfokus pada pemberdayaan dan lingkungan. Mereka ini adalah Yayasan Penabulu, Yayasan Puter Indonesia, Hutan Kita Institute (HaKI), SNV Indonesia, dan Daemeter. Para aktivis di berbagai lembaga inilah yang hari demi hari hidup bersama masyarakat, live in, tinggal di desa-desa yang menjadi lokasi kerja Kelola Sendang. “Menemani masyarakat ini tahapan yang sangat penting. Persoalan lingkungan kita, hutan kita, sering kali bukansekadar soal teknis. Tapi pada manusianya,” kata Akhmad Arief Fahmi, fasilitator Yayasan Penabulu.

Tonggak penting kemitraan dalam Kelola Sendang adalah terbentuknya Masterplan Kemitraan 2018-2028. Yang dimaksud masterplan atau rencana induk di sini bukanlah daftar program atau kegiatan, tapi panduan kemitraan untuk mendukung terwujudnya visi pertumbuhan hijau. “Awalnya, semua kolega kami bilang ini misi yang mustahil,” kata Yanuar Suhartono, Kepala Sub Bidang Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang juga Koordinator Program Implementing Unit Kemitraan Kelola Sendang.

Koordinasi, kemitraan, ini memang kata yang berat, terlebih di tengah iklim yang serba terkotak-kotak. “Tapi kami buktikan bahwa kemitraan itu bisa. Kami, dari berbagai instansi, LSM,

berembuk membuat masterplan kemitraan dengan pendekatan yang holistik. Target kinerja terukur,” kata Yanuar, “Ternyata bisa.” Yanuar berharap pola kemitraan dalam pengelolaan lanskap ini menjadikan Sumatera Selatan sebagai laboratorium hidup. Cara dan pendekatan yang dilakukan bisa diduplikasi dan diterapkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Masterplan Kemitraan dilengkapi dengan pohon atau bagan alir, yang disesuaikan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Sumatera Selatan. Pohon alir, *cascade*, yang mencakup siapa mengerjakan apa, di mana, apa *output*, *outcome*, dan apa saja indikator capaian yang perlu dicek. “Kalau ada pihak lain datang dan menawarkan kerja sama, kami tinggal sodorkan masterplan ini. Anda mau ikut serta di titik mana? *Output*, *outcome*, indikator, dan bagaimana cara pemantauan dan evaluasi, kami tinggal cek,” kata Hendrian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. “Dengan begini, semua program akan terarah dan bersinergi,” kata Hendrian, yang juga Koordinator PIU Kelola Sendang. Berhubung masterplan ini baru terbentuk pada 2018, semua program Kelola Sendang—yang sudah berjalan sejak 2016—juga harus dikalibrasi ulang. Semuanya harus selaras.

Salah satu terobosan Masterplan Kemitraan adalah pem-



**Kami, dari berbagai instansi, LSM, berembuk membuat masterplan kemitraan dengan pendekatan yang holistik. Target kinerja terukur**



**YANUAR SUHARTONO**  
Koordinator Program Implementing  
Unit Kemitraan Kelola Sendang



Ikan asin menjadi komoditas andalan warga Sungsang, Banyuasin.

FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

bagian lanskap Sembilang-Dangku ke dalam tiga area model. “Supaya kami bisa melihat lebih fokus dan terarah. Lanskap yang begitu luas perlu dibagi berdasar karakter dan kekuatan. Setelah dibagi tiga area, barulah kami lebih jernih melihat permasalahan di masing-masing area,” kata Regina Ariyanti. Di setiap area model, Kelola Sendang memetakan isu prioritas, siapa saja pemangku kepentingan, juga apa saja yang sudah dan belum dilakukan. Pemetaan poin-poin penting ini membuat para pengambil kebijakan yang terlibat menyadari bahwa program dan intervensi lapangan tidak boleh diseragamkan secara *top down*. Tiga area model tersebut adalah:

1. Area Model 1, meliputi Dangku-Meranti yang merupakan kawasan yang dihuni satwa liar dan flora langka, termasuk hari-mau dan beruang madu;

2. Area Model 2, yakni Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Merang-Sungai Ngirawan. Area ini penting sebagai tata kelola air di lahan gambut, juga sebagai kesatuan lingkungan hidup untuk *carbon capture*, selain sebagai habitat hewan endemik buaya Senyulong (*Tomistoma schelegelii*);

3. Area Model 3, yang meliputi Kawasan Penyangga Taman Nasional Berbak-Sembilang, yang akan dikembangkan sebagai pusat perekonomian maritim di Sumatera Selatan.

## Berlayar Sambil Membuat Kapal

Perjalanan seribu mil dimulai dari langkah pertama. Begitu pula Kelola Sendang. Perjalanan lima tahun proyek bermula dari langkah-langkah pertama. “Pokoknya jalan dulu,” kata Damayanti Buchori. Ketika itu, pada 2016, belum ada Masterplan Kemitraan, belum ada pembagian area model, belum ada lokakarya desa, juga belum ada forum-forum yang menjadi tempat para pemangku kepentingan duduk bersama.

Langkah pertama harus diayun. Upaya meraih lestari di sepanjang Sembilang hingga Dangku siap dimulai. Tapi hendak mulai dari mana dan bagaimana? Waktu yang tersedia tidak banyak, yakni 2016 sampai 2020. Prioritas harus segera dipilih.

Ada 21 desa yang ditetapkan sebagai lokasi inti pelaksanaan program, tak sampai 10 persen dari total jumlah desa di Sembilang-Dangku sebanyak 223 desa. Pemilihan lokasi ini, menurut Damayanti, awalnya lebih banyak berdasar alasan konservasi alam. “ZSL berharap 21 desa yang dipilih bisa menjadi batu loncatan menuju konservasi satwa liar, sebagaimana misi ZSL,” kata Damayanti.

Dalam perjalanan, ternyata, konservasi saja tak lagi cukup menjadi landasan bergerak. Ada banyak hal yang terkait dengan pengelolaan lanskap. Isu strategis yang dijumpai di lapangan cukup beragam, mulai dari konflik manusia versus satwa, pembalakan dan penambangan liar, kemiskinan di desa-desa di sekitar hutan, tingkat pendidikan yang masih rendah, tertutupnya akses sumber daya lahan masyarakat, perambahan lahan baik untuk kebun atau tambak, sengketa batas desa, sampai menumpuknya sampah di muara. Ketiadaan sistem tata guna air terpadu di lahan gambut, kontestasi lahan di perkebunan sawit, juga masuk dalam daftar isu prioritas di lapangan.

Setiap hal kait-mengait. Setidaknya ada dua kubu pandangan berbeda tentang bagaimana Kelola Sendang menanggapi berba-

gai isu prioritas. Satu pihak berkeras bahwa Kelola Sendang seharusnya setia pada konservasi hutan dan satwa liar. Pihak yang lain berpendapat bahwa berbagai isu prioritas menunjukkan harus ada intervensi berupa peningkatan penghidupan masyarakat. “Membenahi lanskap tanpa menyentuh pembenahan *livelihood* masyarakat juga percuma,” kata David Ardhian, Deputy Direktur Proyek Kelola Sendang. “Tanpa pembenahan *livelihood*, maka hanya persoalan waktu saja masyarakat akan melakukan kembali pembalakan liar, membuka lahan secara ilegal, atau tindakan lain yang merugikan konservasi.” *Landscape* (bentang alam) dan *lifespace* (bentang hidup) idealnya saling melengkapi, tidak berjalan terpisah.

Satu hal mendasar yang harus dilakukan, apa pun program yang akan dipilih, adalah membenahi basis data. Kelola Sendang, bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBTMR) Provinsi Sumatera Selatan, merintis pembenahan data tata ruang. Program Sistem Penataan Ruang atau Sitarung ini menampilkan proses penyusunan hingga proyeksi tata ruang Sumatera Selatan. “Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, bisa mengakses data ini. Cita-citanya adalah tak ada lagi tumpang tindih penataan ruang dan alam lebih terjaga,” kata Bonnie Fajar Dewantara, Manajer Analisis Spasial dan Lanskap Kelola Sendang.

Sitarung mampu menampilkan lokasi mana saja yang ber-

“**Membenahi lanskap tanpa menyentuh pembenahan livelihood masyarakat juga percuma**”

DAVID ARDHIAN  
Deputy Direktur Proyek Kelola Sendang



Lahan demplot  
Kelompok Tani  
Konservasi Maju  
Bersama, Suaka  
Margasatwa  
Dangku, Musi  
Banyuasin.

FOTO: Y. SUPRAWIGI

fungsi sebagai hutan dan tak boleh diganggu, lokasi mana yang bisa dijadikan perkebunan. Saat ini, Sitarung masih terus dikembangkan dan akan dikembangkan menjadi Sitarum (Sistem Penataan Ruang Musi Banyuasin) dan Sitarub (Sistem Penataan Ruang Banyuasin).

Sembari membenah basis data berjalan, Kelola Sendang menggelar berbagai program. Berdasar berbagai pertimbangan, ada empat pilar program yang ditetapkan.

*Pilar pertama*, konservasi. Termasuk dalam pilar ini adalah upaya memasang kamera tersembunyi, *camera trap*, untuk memastikan populasi gajah yang melintas di perbatasan Taman Nasional Berbak-Sembilang dan lahan perkebunan sawit (baca “Menyelamatkan Dudung dan 22 Gajah”). Lalu pelatihan untuk masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan gajah, juga apa yang harus dilakukan seandainya gajah masuk permukiman. Pelatihan ini digelar supaya tak lagi ada konflik satwa versus manusia. Pilar ini juga mencakup berbagai program, antara lain penanaman pohon di lahan gundul yang ada di Suaka Margasatwa Dangku, kerja sama dengan IPB dan Universitas Sriwijaya untuk observasi burung serta berbagai satwa liar, dan penanaman mangrove Kandelia candel di hutan mangrove Taman Nasional Sembilang.

*Pilar kedua* adalah *livelihood*, peningkatan pencaharian masyarakat. Termasuk dalam pilar ini adalah program pelatihan dan pembuatan koperasi petani penyadap karet di Desa Mendis. Pengembangan produksi piring dari pelepah pinang merupakan terobosan peningkatan livelihood yang cukup berkesan di Desa Mendis (baca “Tujuh ‘Setan’ Desa dengan Koperasinya”). Di Desa Sungsang, program livelihood cukup beragam, mulai dari penanaman sayur organik, bank sampah, hingga rintisan ekowisata (baca “Membenahi Desa Sungsang”). Di Muara Medak, peningkatan pencaharian dilakukan dengan perhutanan sosial,

yang memungkinkan masyarakat menanam pohon dan memanfaatkan hasil hutan nonkayu.

*Pilar ketiga* adalah produksi, yang berfokus pada kerja sama dengan sektor swasta. Pilar ini meliputi kerja sama dengan PT Global Alam Lestari di Muara Merang untuk mengembangkan perikanan di lahan gambut (yang masuk pilar *livelihood*) dan mewujudkan tata kelola air yang disebut kesatuan hidrologi gambut (KHG). Kelola Sendang juga bermitra dengan pabrik pengolahan karet di Jambi untuk memangkas makelar dalam rantai penjualan karet dari petani. Di Desa Lubuk Bintialo, Musi Banyuasin, Kelola Sendang berupaya menautkan kelompok tani dengan perusahaan yang mendukung produksi madu hutan. Termasuk dalam pilar ini adalah kampanye tata kelola perkebunan sawit yang lebih ramah lingkungan.

Terakhir, *pilar keempat*, adalah kerja sama berbagai institusi. Termasuk di sini adalah upaya membangun berbagai forum, kerja sama dengan berbagai instansi untuk mencari solusi bersama. Misalnya mewujudkan perhutanan sosial di beberapa desa ternyata membutuhkan rekonsiliasi batas desa dan hal ini membutuhkan kerja sama dengan pemerintah. Begitu pula mengatasi problem ketiadaan kartu tanda penduduk (KTP) di hutan Dangku, perlu kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pilar keempat ini berfungsi memastikan kemitraan hijau berjalan, juga advokasi kebijakan kepada berbagai pihak pemegang keputusan.

Keempat pilar ini sering tumpang tindih, tidak terpisah satu sama lain. Misalnya konservasi di sebuah area juga melibatkan upaya *livelihood*, peningkatan pencaharian masyarakat. Program itu juga menuntut kerja sama dengan korporasi di sekitar wilayah bersangkutan. Pengembangan lebih lanjut tentunya per-

lu didukung kerja sama dengan berbagai lembaga. “Seperti rumah, keempat pilar ini saling mendukung,” kata David Ardhan. Bagaimana implementasi keempat pilar itu di lapangan?

Bagaimana “menjahit” semuanya, termasuk mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan, dalam bingkai yang berkelanjutan? Damayanti Buchori mengaku tak punya rumus yang pasti. “Butuh pendekatan dan resep yang berbeda-beda untuk setiap situasi dan lokasi,” katanya. Resep generik, menyamakan jurus dan pendekatan, untuk semua lokasi yang terbentang di Sembilang dan Dangku adalah hal yang tidak tepat.

Bentang alam, menurut Damayanti, tak ubahnya seperti makhluk hidup yang terus bertumbuh. Ada manusia, ada satwa dan tumbuhan, dan berbagai variabel lain yang terus berinteraksi dalam proses yang dinamis. “Tak jarang juga solusinya sudah ada, tersedia. Kita hanya perlu lebih rendah hati, mendengar semua pihak.” Kata Damayanti.

Harus pula diakui sejauh ini konsep lanskap yang *sustainable* masih belum jelas betul. Apalagi merupakan tantangan tersendiri menerapkan prinsip keberlanjutan di wilayah yang sebagian besar hutan telah berubah menjadi lahan gundul, perkebunan sawit, dan permukiman yang padat, tanpa menimbulkan konflik. Jurus-jurus program intervensi mesti kreatif dirancang. “Bisa dibilang bahwa kami ini berlayar sambil membangun kapal. Karenanya, kami harus adaptif dan fleksibel sambil tetap memegang prinsip utama sustainabilitas,” kata Damayanti.

Adaptif. Luwes. Perencanaan program intervensi yang tidak kaku dan bisa berubah tergantung kondisi lapangan. “Proyek lain biasanya sudah ditentukan semuanya dari awal. Kalian harus ke sana. Nggak boleh belok ke kiri dan ke kanan,” kata Syafrul Yunardi, Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Berbeda halnya dengan kemitraan yang diterapkan Kelola Sendang. “Yang diutamakan bukan kita mau ke mana,” kata Syafrul, “tapi ba-



Manajer program ZSL, La Ode Muhammad Rabiali, memberikan pelatihan pemanfaatan sampah di Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.

FOTO: KELOLA SENDANG

gaimana kita menuju ke sana. Bagaimana kolaborasi bisa kita lakukan.”

Syafrul, yang juga menjadi Sekretaris *Program Supervisory Unit* (PSU) Kelola Sendang, menggarisbawahi kesediaan untuk bersikap adaptif. Penetapan program, output, tak bisa seratus persen dipatok kaki sedari awal. “Kita harus mampu beradaptasi. Karena persoalan lanskap tidak tunggal, banyak hal kait-mengait dan tidak bisa diseragamkan di semua wilayah,” katanya.

Syaful mencontohkan persoalan masyarakat desa di sekitar hutan yang cenderung lebih miskin dibanding masyarakat yang tinggal jauh dari hutan. Faktor penyebabnya, tentu, beragam. Kondisi ini tak bisa serta-merta disikapi dengan bantuan material tanpa memahami persoalan sebenarnya. Mustahil juga semata mengerahkan ratusan bibit pohon, lalu menggaungkan pentingnya menjaga hutan, tanpamenyinggung kesejahteraan. “Kita perlu pelajari akar masalahnya. Ada warga yang akses jalan dan transportasi terbatas, jauh dari mana-mana. Ada yang tak pernah mendapat penyuluhan, peningkatan kapasitas, dan tak pernah mendapat pemberdayaan dalam bentuk apa pun,” kata Syafrul.

Persoalan makin runyam bagi warga yang tinggal di kawasan hutan konservasi, yang artinya bukan daerah yang legal dihuni. Di tempat seperti ini, misalnya yang terjadi di Suaka Margasatwa Dangku, tak ada bantuan apa pun kepada warga, termasuk dari pemerintah. Puskesmas, sekolah, penyuluhan pertanian tak ada. Warga, karena tak punya KTP, juga tak bisa mengakses layanan publik. “Hal seperti ini perlu pendekatan lain, yang berangkat dari empati terhadap persoalan yang dihadapi warga,” kata Syafrul.

# 10 Prinsip, Kompas Panduan Berlayar

Kelola Sendang memilih pijakan saat berlayar sambil membangun kapal. Pijakan itu adalah 10 Prinsip Keberlanjutan yang dirancang Profesor Jeffrey Sayer. Ilmuwan dari Inggris ini berfokus pada riset tentang kontestasi penggunaan lahan, baik untuk kepentingan perkebunan, konservasi, biodiversitas, dan juga permukiman. “Pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan sampai eksekusi, kami usahakan menengok ke-10 prinsip tersebut.

Termasuk ketika menemui kendala di lapangan,” kata Damayanti. “Semacam kompas penentu arah saat kami berlayar.”

Berikut ini pemahaman 10 Prinsip *Sustainable Landscape Approach* yang ditawarkan Jeffrey Sayer. Penjelasan ini dijabarkan oleh Panca Pramudya dkk, dalam buku *Melacak Jejak Ekologi Politik dalam Proyek Kelola Sendang*, 2020.

## 1. Proses belajar yang berkelanjutan dan mana jemen yang adaptif.

Pengelolaan lanskap yang sustainable menuntut adanya pembelajaran yang terus-menerus, dengan mengacu pada hasil terdahulu. Manajemen yang adaptif dan kolaboratif diperlukan untuk mewadahi proses pembelajaran yang terus-menerus ini.

## 2. Kepedulian bersama sebagai titik masuk mencapai kesepakatan bersama.

Implementasi pengelolaan lanskap berkelanjutan membutuhkan identifikasi dan langkah yang bisa dengan segera menjawab sasaran-sasaran jangka pendek. Tujuannya adalah membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Target-target jangka pendek akan menciptakan dasar bagi berbagai pe-

mangku kepentingan untuk mulai bekerja sama. Siapa pun pemangku kepentingan--walaupun mempunyai pandangan yang berbeda--bisa tertarik bergabung dengan proses selanjutnya.

## 3. Multiskala.

Dinamika terjadi di berbagai level lanskap. Berbagai sistem dan umpan balik mempengaruhi hasil-hasil yang diharapkan terjadi. Kesadaran akan proses pada level yang lebih tinggi, juga yang lebih rendah, dapat meningkatkan intervensi lokal. Kesadaran multiskala dapat membangun informasi bagi kebijakan di level lebih tinggi, hubungan antarinstansi, dan tata kelolanya sehingga dapat menolong koordinasi antarunit administratif.

## 4. Multifungsi.

Pengelolaan lanskap berkelanjutan mengenali *trade-off*, pertukaran atau imbal balik, berbagai barang dan jasa yang muncul dari penggunaan lanskap. Lanskap dan berbagai komponennya memiliki bermacam-macam fungsi, kegunaan, dan tujuan, dan setiap pemangku kepentingan mempunyai penilaian yang berbeda. Pasti ada *trade-off* dari beragamnya penggunaan lanskap. *Trade-off* ini harus dipahami sehingga mewadahi berbagai kebutuhan, preferensi, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan.

## 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Setiap pemangku kepentingan membangun kerangka pemahaman dan mengekspresikan berbagai sasaran dalam cara-cara yang berbeda. Kegagalan melibatkan pemangku kepentingan dengan setara dalam proses pengambilan keputusan akan mengarah pada hasil-hasil yang tidak optimal dan terkadang tidak etis. Semua pemangku kepentingan harus dikenali, walaupun pada kenyataannya hanya sebagian dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

6. Logika perubahan yang bisa dinegosiasikan dan transparan.

Semua pemangku kepentingan harus memahami dan menerima logika bersama, legitimasi, dan justifikasi sebuah tindakan, sekaligus paham akan risiko dan ketidakpastian. Di atas pemahaman inilah dapat dibangun konsensus sehubungan dengan tujuan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

7. Klarifikasi atas hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

Aturan terkait akses sumber daya dan penggunaan lahan harus jelas untuk memastikan manajemen dan orientasi pada pencapaian hasil yang baik. Akses kepada sistem keadilan yang *fair* memungkinkan adanya resolusi konflik dan dukungan pada kondisi yang sulit. Hak dan kewajiban berbagai aktor juga harus jelas dan diterima semua pemangku kepentingan. Adanya klarifikasi hak dan tanggung jawab dapat mengganti pendekatan *command and control*.

8. Partisipatif dan bisa dimonitor dengan mudah.

Pembelajaran bersama memerlukan kondisi bahwa semua pihak yang terlibat dapat mengakses informasi secara baik. Sistem yang mengintegrasikan berbagai platform informasi harus dikembangkan. Ketika para pemangku kepentingan menyetujui tindakan-tindakan yang diinginkan dan hasil-hasil yang dicapai, mereka akan sama-sama berminat untuk memantau kemajuan yang dicapai. Berkumpulnya dan interpretasi informasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengkinikan pemahaman teori perubahan (*theory of change*), yang merupakan landasan dari *Sustainable Landscape Approach*.

9. Ketangguhan atau resilience.

Resiliensi merupakan kemampuan untuk merespons gangguan dengan menghambat kerusakan dan kemampuan untuk

pulih secara cepat. Resiliensi pada level sistem dapat ditingkatkan melalui pengenalan yang aktif terhadap berbagai ancaman dan kerapuhan. Tindakan-tindakan terhadap ancaman yang mengizinkan pemulihan setelah adanya gangguan dengan meningkatkan kapasitas untuk bertahan dan merespons. Resiliensi bisa saja tidak secara mudah dipahami dalam setiap situasi sehingga kita dapat memperoleh resep untuk meningkatkannya, namun dapat dilakukan melalui pembelajaran lokal dan menarik pelajaran hidup dari mana saja.

10. Menguatkan kapasitas para pemangku kepentingan.

Orang-orang memerlukan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan menerima berbagai peran dan tanggung jawab. Namun, untuk bisa berpartisipasi ini, diperlukan ketrampilan dan kemampuan tertentu, baik secara sosial, budaya, dan keuangan. Proses perubahan lanskap yang kompleks memerlukan kompetensi, keterwakilan yang efektif, serta kelembagaan yang mampu menggali semua pihak untuk memikirkan berbagai hal yang muncul selama proses tersebut.

Sepintas, 10 prinsip itu terkesan sederhana. Tapi pelaksanaannya sama sekali tidak mudah. Butuh komitmen, upaya mendengar berbagai pihak, menggali persoalan, mencari titik temu bersama, dan merangkul semua pihak. Semua hal ini menuntut fleksibilitas, daya adaptasi, dan kesungguhan bekerja melampaui batas-batas pekerjaan yang biasa.

Damayanti memberi contoh bagaimana konsep *stepping stones* atau batu loncatan akhirnya diubah menjadi area model setelah melalui diskusi-diskusi yang dipimpin Program Supervisory Unit. Konsep batu loncatan yang terdapat dalam proposal dinilai kurang realistis karena keadaan di lapangan tak memungkinkannya dijalankan “Misalnya di lapangan ketemu (jalan) Trans-Sumatera,” katanya. Kalaupun bisa, menurut dia, perlu upaya luar

biasa, umpamanya dengan membangun jembatan supaya hewan-hewan bisa lewat. “Di Indonesia belum bisa itu.” Selain itu, timbul pemahaman bahwa landasan pendekatan lanskap adalah budaya. Tipologi masyarakat, bagaimana lingkungan biofisikanya, hal-hal demikian mesti dipelajari. “Makanya kami mencari daerah-daerah yang mewakili itu,” kata Damayanti pula. Itu sebabnya kemudian dikumpulkan daerah-daerah yang merupakan area gambut; suaka margasatwa, yang berarti hutan; dan taman nasional, yang mewakili *buffer zone* atau kawasan penyangga.

Pendeknya, kata Damayanti, secara prinsip, “kerja ini adalah tentang *respect*; kami masuk ke sana bukan sebagai *project*”.

Pendekatan ala Jeffrey Sayer sebetulnya senada dengan kritik William Easterly atas arus besar developmentalisme yang selama ini diterapkan dunia. Easterly, mantan eksekutif World Bank, dalam buku berjudul *White Man’s Burden* yang diterbitkan pada 2006, mempertanyakan kenapa begitu banyak program bantuan dari lembaga donor tidak mengubah dunia menjadi lebih baik secara signifikan. Bahkan, triliunan dolar bantuan dari Barat tak jarang memperparah problem yang eksis, baik di negara-negara Afrika, Timur Tengah, maupun di Asia.

Salah satu problem utama, menurut Easterly, adalah kebanyakan program dijalankan dengan pendekatan yang *top down*, yang dijiwai semangat “saya lebih tahu yang terbaik buat Anda semua”. Seluruh konsep, mulai dari *output*, metodologi, dan monitoring, dirancang di gedung-gedung di Tokyo, London, New York, Jenewa, atau Jakarta, kantor pusat lembaga donor.

Easterly menyebut pendekatan seperti itu sebagai “*planner*”, yakni para perencana, pembuat program yang elitis dan jauh dari tanah, keringat, denyut nadi, air mata, dan tawa kegembiraan yang riil ada di lapangan di negeri-negeri yang diberi bantuan. Sebagai kontras, Easterly menyebut tipe “*searcher*”, para pencari, yakni mereka yang merancang program dengan lebih dulu menggali persoalan, mendengar suara komunitas lokal, dan

bersama-sama mencari solusi. Pendekatan *searcher* memang jauh lebih sulit, namun jika diterapkan bisa memberi dampak yang *sustainable*.

Jeffrey Sayer dan William Easterly tidak memberikan resep yang definitif. Jalan *searcher* membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, biaya lebih mahal, tim lapangan yang menjadi fasilitator mumpuni, dan fleksibilitas birokrasi lembaga donor. Dari pengalaman Kelola Sendang, menurut Damayanti Buchori, semua itu tidak mudah dijalankan. Lembaga donor, aktivis LSM, dan pejabat pemerintah sering membawa perspektif yang sudah telanjur melekat dan telah berpuluh tahun diterapkan secara rigid, kaku. Padahal, di lapangan, kebutuhan masyarakat boleh jadi betul-betul berbeda dan sering tidak terbayangkan sebelumnya. “Itu sebabnya program kami di lapangan sangat dinamis. Perubahan program, *adjustment* metodologi, tarik-ulur *budget*, itu biasa bagi kami,” kata Damayanti. “Pusing sebetulnya, ha-ha-ha. Kami juga berulang kali meyakinkan donor, kenapa harus ada perubahan dan penyesuaian. Tapi itu konsekuensi program pengelolaan lanskap yang *sustainable*.”

”  
**saya lebih tahu  
yang terbaik buat  
Anda semua**

”  
**EASTERLY**  
Mantan Eksekutif World Bank



Petani karet mengerubungi juru hitung koperasi di sebuah gudang di Bayung Lencir, Musi Banyuasin.

FOTO: KELOLA SENDANG

## Kisah Perubahan, dari Sungsang hingga Dangku

*Searcher.* Para pencari. Begitulah jalan yang dipilih Kelola Sendang, dalam versi William Easterly. Sebuah jalan yang menuntut penggalian persoalan, observasi mendalam, fleksibilitas, daya adaptasi, keterlibatan aktif berbagai pihak yang terlibat. Seperti bisa dibaca dalam berbagai tulisan di buku ini, pendekatan ini telah membawa beragam kisah perubahan yang menarik dan berharga untuk dipelajari.

Kisah perubahan yang layak digarisbawahi adalah yang terjadi di Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Area yang didominasi lahan gambut inilah episentrum kebakaran hutan pada 2015. Ketika itu kebakaran hutan datang tanpa ada langkah antisipasi apa pun. Dari lima juta titik api di seluruh Sumatera Selatan, tiga juta titik api tersebar di Muara Medak (baca “Terpal Sakti dan Para Jagawana”).

Bersama Tim Kelola Sendang, pada awal 2019, penduduk menjalani pelatihan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selama ini masyarakat baru bergerak ketika api sudah muncul. Padahal, jika api sudah berkobar, upaya memadamkan api di lahan gambut sangat susah, sudah terlambat. Jadi, jurus yang lebih efektif bukanlah menjinakkan api tapi menjaga kanal-kanal gambut tetap berair. Penduduk Muara Medak pun mempraktekkan hasil pelatihan, membuat sekat-sekat terpal di kanal gambut. Namanya Regu Penyelamat Air (Repair).

Tak dinyana, kebakaran hutan datang lagi saat kemarau, pada Agustus 2019. Kali ini sumber api datang dari perkebunan sawit milik perusahaan. Api melaju cepat, jauh lebih cepat dibanding kebakaran pada 2015. “Dalam setengah jam, api sudah menjalar satu kilometer,” kata Agus Irwanto Wibowo, Manajer Pemberdayaan Komunitas Kelola Sendang ZSL. Pada hari ketiga api

sudah berjarak 100 meter dari permukiman warga. Orang-orang harus diungsikan.

Benar, api kembali menghajar Muara Medak, sama seperti yang terjadi pada 2015. “Bedanya, sekarang masyarakat sudah mengantisipasi,” kata Agus Irwanto. Masyarakat juga sudah tahu betapa air dan gambut tak boleh dipisahkan. Lahan warga yang terbakar relatif lebih mudah dipadamkan karena kanal-kanal yang berair. “Kalau kami bikin sekat-sekat kanal lebih awal, kami yakin lahan gambut kami lebih basah dan tidak mudah terbakar,” kata Edi Susanto, warga Muara Medak.

Menjaga permukaan air gambut pun jauh lebih murah dibanding memadamkan api. Ratusan juta rupiah dibutuhkan per jam untuk mengoperasikan helikopter pemadam api. Bayangkan berapa miliar yang dibutuhkan untuk operasional helikopter per hari, per minggu, untuk seantero Sumatera. Tak jarang pula kebakaran di lahan gambut hanya bisa padam setelah turun hujan deras. Karenanya, mekanisme Repair layak dijadikan SOP, petunjuk operasional, pencegahan kebakaran hutan dan lahan. “Kami sedang menyusun buku panduan Repair, supaya bisa diterapkan secara luas,” kata Agus Irwanto.

Kisah perubahan juga terjadi di Desa Marga Sungsang. Seperti dikisahkan dalam tulisan “Membenahi Daratan Sampah Sungsang”, awalnya Kelola Sendang cuma memilih lokasi kerja di Dusun Sembilang, Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Dusun ini tak lain adalah noktah kecil di dekat kawasan mangrove yang menyangga Taman Nasional Sembilang. Fokus program adalah konservasi penanaman kembali mangrove.

Sebuah lokakarya desa kemudian digelar pada 22 Juni 2019. Dalam acara ini para peserta menyampaikan usulan agar Kelola Sendang juga mendampingi Desa Marga Sungsang I, II, III, dan IV secara keseluruhan. Warga merasa, kenapa perkampungan diabaikan, padahal persoalan mangrove juga terkait dengan

kehidupan di Sungsang. “Karena, sebetulnya, Sungsang adalah satu kesatuan wilayah ekologi yang sebaiknya dikelola secara terintegrasi,” kata Akhmad Arief Fahmi, Koordinator Program Penabulu, salah satu mitra Kelola Sendang.

Walhasil, semua pihak sepakat Kelola Sendang menjalankan program di Desa Sungsang I, II, III, dan IV. Kampanye penanganan sampah dimulai. Pengadaan air bersih berupa instalasi panen air hujan dibuat. Pengembangan ekowisata digelar, termasuk rute pengamatan burung yang secara rutin bermigrasi dari Siberia. Bagi Salinan, Camat Banyuasin II, program membenahi Desa Sungsang ini sangat berarti. “Semacam penyemangat,” ujarnya. “Maklum saja, dulu orang kalau ditempatkan di sini dianggap sebagai buangan. Hukuman. Terpaksa. Soalnya masalah di sini banyak. Apalagi daerahnya cukup terisolasi kalau hujan.” Kini Salinan merasa tak lagi berjalan sendiri.

Dari Karang Agung Ilir, Sumber Rejeki, Kabupaten Banyuasin, datang kisah tentang kerisauan warga atas wabah tikus. Kebiasaan tikus yang tanpa henti mengerat batang padi, membuat batang padi rebah. Panen pun terancam gagal. Jurus menebar rodentisida sudah dilakukan, tapi populasi tikus tetap tak terkendali. Bersama Tim Kelola Sendang, warga “mengundang” burung hantu (*Tyto alba*), yang tak lain adalah predator alami tikus.

“  
**Kalau kami bikin sekat-sekat kanal lebih awal, kami yakin lahan gambut kami lebih basah dan tidak mudah terbakar**”

EDI SUSANTO  
Warga Muara Medak



Nobon, warga Muara Medak, Bayung Lencir, Musi Banyuasin, menunjuk lahan yang terbakar pada 2019.

FOTO: KELOLA SENDANG

Perjalanan mencari burung hantu, memikatnya hingga bersedia bersarang di tengah sawah, adalah cerita yang menarik. “Kami siang-siang itu mencari jejak tempat burung hantu bertengger dengan keluar-masuk kebun. Yang dicari adalah kotorannya. Waktu itu dua malam berturut-turut belum ketemu, sampai kami naik ke bangunan walet tua yang sudah enggak difungsikan. Naik sampai menaranya. Kalau roboh, ya, kami selesai,” kata Sudirman, Ketua Kelompok Tani Karang Agung Ilir.

Pendekatan berbasis sains ini ternyata lumayan efektif. Tikus tak lagi berkeliaran di sawah-sawah di Karang Agung Ilir. Si Tyto alias serak jawa berhasil menakuti tikus-tikus, hingga kawan binatang pengerat itu tak lagi mengganggu sawah. Sebuah cara yang mudah, murah, dan aman secara lingkungan (baca “Hama Tikus dan Siasat Serak Jawa”).

Suaka Margasatwa Dangku, Kecamatan Kuala Tungkal, Kabupaten Musi Banyuasin, juga menyimpan kisah program yang beradaptasi. SM Dangku adalah suaka untuk harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir Asia (*Tapirus indicus*), dan aneka burung yang dilindungi seperti elang dari famili *Accipitridae* dan burung rangkong dari famili *Bucerotidae*. Ada setidaknya 380 spesies hewan di hutan ini, terdiri atas 61 spesies kelas mamalia, 269 spesies kelas aves, 31 spesies kelas reptilia, dan 19 spesies kelas amfibi. Di hutan Dangku juga tumbuh sejumlah spesies pohon yang dilindungi, antar alain meranti (*Shorea sp.*), merawan (*Hopea mangarawan*), medang (*Lixos spp.*), manggeris (*Kompassis spp.*), dan balam (*Palagium sp.*).

Sayangnya, sedikitnya 2.000 hektare SM Dangku telah rusak. Ratusan penduduk membuka lahan secara ilegal selama bertahun-tahun. Setelah serangkaian dialog, “Terungkap bahwa masalahnya adalah mereka tak punya KTP, kartu tanda penduduk,” kata David Ardhian. Hal inilumayan melenceng dari asumsi awal. “Mereka bukannya serakah, *ngeyel* menebang kayu, atau

hendak menguasai hutan. Mereka terpaksa bertahan di hutan, di area konservasi, semata karena tak punya KTP dan karenanya tak diakui sebagai warga di mana pun,” kata David.

Di kampung halaman, banyak yang berasal dari Jawa, mereka sudah dicoret dari status warga. Di Dangku mereka pun tak diakui sebagai warga karena tinggal di kawasan konservasi yang bukan area administrasi desa mana pun. Akibatnya, mereka tak bisa mendaftarkan diri untuk layanan kesehatan BPJS, anak-anak kesulitan mendapat sekolah. Kondisi ini membuat mereka seperti terjebak, tak bisa keluar dari hutan Dangku. “Sebagian orang menyebut diri mereka keblasuk,” kata David Ardhian. Keblasuk, bahasa Jawa, yang menggambarkan situasi tak menentu (baca tulisan “‘Keblasuk’ di Hutan Dangku”).

Bersama penduduk, Tim Kelola Sendang mencari jalan keluar. Mereka berdialog dengan berbagai instansi, termasuk kepala desa di sekitar SM Dangku, juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), untuk mencari solusi alternatif. Sebagai imbalan, penduduk “liar” di Dangku membuhulkan tali kesepakatan bersama berbagai pihak pemangku kepentingan. Mereka tak boleh lagi membuka area baru, tak boleh menebang pohon, dan hanya boleh memanfaatkan hasil hutan nonkayu.

Lahan yang meranggas gundul di Dangku kini mulai dihijaukan. Kelola Sendang menyediakan beraneka bibit pohon untuk ditanam. Pohon karet, petai, durian, dan lainnya. “Lebih tenteram hidup begini. Tidak seperti dulu, dikejar-kejar aparat,” kata Lakoni, yang pernah dipenjara 20 bulan gara-gara menjadi pembalok liar di Dangku. Lakoni kini telah insyaf, tak lagi membalok. Dia bahkan memimpin warga lain untuk program penanaman hutan kembali. Dia juga bekerja berdampingan dengan Gatot, polisi hutan di BKSDA Suaka Margasatwa Dangku. “Dulu, mana ada pake diajak bicara, dialog, dan merangkul. Adanya kejar-kejaran. Sekarang, kami jadi akrab,” kata Gatot.

Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi

Banyuasin, juga punya cerita. Koperasi petani penyadap karet di desa ini telah berkembang bagus. Harga karet dari petani dihargai tinggi karena mutu sadapan yang bagus. Para tengkulak karet tak lagi bisa memainkan harga seenaknya. Desa Mendis kemudian bergerak ke level berikut. Mereka mengembangkan produksi piring dari pelepah pinang, sebuah terobosan yang inspiratif di tengah dunia yang sedang prihatin terhadap limbah plastik sekali pakai. Pelepah pinang, yang tadinya tak punya nilai ekonomi, kini menawarkan solusi alternatif menggantikan piring plastik.

Pengembangan produksi piring pelepah pinang harus dilakukan hati-hati. “Sudah banyak permintaan. Tapi, sebagaimana produk alam yang lain, pelepah pinang tidak bisa diadakan secara besar-besaran dalam waktu singkat,” kata Damayanti Buchori. “Bisa, sih, dengan cara membuat perkebunan pinang besar-besaran. Tapi perkebunan monokultur bukan pendekatan *sustainable*. Ini yang harus kita perhatikan.”

Bagi Wijaya Asmara, *Community Business Development Specialist* Kelola Sendang ZSL Indonesia, bukan sekadar karet atau pelepah pinang yang layak digarisbawahi. Karet atau pelepah pinang hanyalah alat. Ada pencapaian perubahan yang lebih fundamental, yakni manusianya. Masyarakat Mendis telah

“  
**Dulu, mana ada  
pake diajak bicara,  
dialog, dan merangkul.  
Adanya kejar-kejaran.  
Sekarang, kami  
jadi akrab**”

**GATOT**  
Polisi Hutan BKSDA  
Suaka Margasatwa Dangku



Kelulut, lebah tanpa sengat yang dibudidayakan Gapoktan Meranti Wana Makmur, Lubuk Bintialo, Musi Banyuasin.

FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

berkembang solid. Rencana kerja yang muluk-muluk tak akan bisa berjalan tanpa masyarakat yang solid dan punya komitmen. "Itu inti pengembangan masyarakat, 'kan," kata Wijaya. Sebuah capaian yang tidak gampang, tidak sebentar.

Tak semua perjalanan berakhir indah. Ada banyak pekerjaan rumah yang menuntut kerja keras. Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, misalnya, masih menghadapi kemelut lahan dengan perusahaan HTI (hutan tanaman industri) tanaman akasia. Konflik bermula sejak 2004, ketika perusahaan dituding menyerobot lahan sawah dan kolam ikan milik penduduk. Konflik berkepanjangan membuat sebagian besar warga lelah dan jengah. Mereka nyaris tak percaya lagi dengan bantuan dari pihak luar. "Mereka tidak begitu serta-merta menerima kami," kata Rian Saputra, dari Hutan Kita Institute (HaKI), mitra Kelola Sendang.

Rian mengingat, butuh satu tahun bagi HaKI untuk mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat dan bangunan metode mediasi yang pas. Sebab, HaKI harus menggali dari awal keterangan soal asal muasal desa, dokumen-dokumen pendukung klaim warga, hingga pemetaan partisipatif sebagai penegas keterangan warga. "Pengumpulan dokumen ini semakin membuat masyarakat yakin dengan kerja kami," kata Rian. Sampai kini perjuangan warga Pulau Gading masih berlanjut. Mereka berharap pengajuan status perhutanan sosial bisa disetujui (baca "Di Pulau Gading, Damai Itu Mungkin").

Di Desa Bintialo, Kabupaten Musi Banyuasin, penduduk masih bergulat dengan hama babi hutan, yang rupanya cukup pintar mengatasi jebakan. Sama seperti di Desa Dangku, di Bintialo juga diwarnai permasalahan penduduk yang tinggal di desa yang belakangan ditetapkan sebagai wilayah hutan lindung. Persoalan yang sampai kini masih dicari jalan keluarnya melalui status perhutanan sosial. Namun upaya perhutanan sosial pun masih alot mengingat ada lahan desa di dalam hutan yang perlu

masuk dalam obyek reformasi agraria (baca “Gurindam di Tengah Hutan”).

Perjalanan masih panjang. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Kesepakatan sistem tata kelola air di kesatuan hidrologis gambut (KHG) Sungai Merang-Sungai Ngirawan juga belum selesai. Beberapa perusahaan di sekitar KHG itu belum mencapai kata sepakat tentang tata kelola air. Di Solok Buntu penanaman mangrove juga masih menemui kendala. Tapi jalan sudah dirintis. “Tinggal diteruskan secara konsisten. Kami siap mendorong,” kata Regina Ariyanti.

## Sembilang-Dangku, Perjalanan Berlanjut

Tahun 2020. Lima tahun berlalu langkah pertama Kelola Sendang diayun. Adakah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, telah mencapai pengelolaan lanskap yang *sustainable*?

“Belum,” kata Hendrian, Koordinator PIU Kelola Sendang. Lima tahun adalah waktu yang singkat untuk mewujudkan gagasan pengelolaan bentang alam yang lestari. “Area kerja Kelola Sendang hanya 21 desa. Padahal di Sembilang-Dangku ada 223 desa,” kata Hendrian. Ini berarti kurang dari sepuluh persen desa di Sembilang-Dangku yang diintervensi program Kelola Sendang. Apalagi jika dibandingkan dengan total desa di seluruh Sumatera Selatan yang berjumlah 3.000 desa. Seperti petikan puisi Chairil Anwar, “Kerja belum selesai. Belum apa-apa.” Perjalanan masih panjang.

Regina Ariyanti membenarkan, masih panjang perjalanan. “Pekerjaan rumah masih banyak,” katanya. Lima tahun memang bukan waktu yang cukup untuk pekerjaan rumah yang begitu banyak. Apalagi, sesungguhnya, bisa dibilang program berjalan aktif satu setengah tahun terakhir. “Tiga setengah tahun pertama banyak kami habiskan untuk merancang konsep dan konsolidasi kemitraan,” kata Regina. Kolaborasi dari level kabupaten sampai ke desa-desa berjalan. Tatanan masyarakat juga mengalami perbaikan, kohesivitas sosial menguat. Warga membentuk kelompok, berorganisasi, membangun kesadaran dan langkah untuk mencapai tujuan bersama. “Saya rasa, itu poin keberhasilan Kelola Sendang,” kata Regina.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mereplikasi apa yang telah dirintis Kelola Sendang di 21 desa di banyak tempat. “Sebagai orang pemerintah, kami belajar banyak proses perencanaan dengan berkolaborasi melibatkan beragam unsur. Duduk bersama, merumuskan persoalan bersama. Itu yang bisa kami ambil dan terapkan,” kata Hendrian. “Saya terkesan dengan cara Kelola Sendang berinteraksi dengan masyarakat.” Hendrian menyatakan dia telah mengadopsi sebagian cara partisipatif dan merangkul komunitas ala Kelola Sendang pada pekerjaannya sehari-hari di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan.

Tahap berikutnya adalah upaya mengadopsi perjalanan yang telah dirintis Kelola Sendang dalam level yang lebih strategis, yakni men-sinergikannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini sebuah tantangan tersendiri. “Karenanya, kami ingin ada laporan yang menampilkan monitoring dan evaluasi secara rinci, di mana saja dan apa saja progres, hambatannya. Juga tentang bagaimana proyek ini berkontribusi menekan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan,” kata Regina. Perjalanan Kelola Sendang amat berharga dan layak dibuat laporan yang komprehensif sehingga pe-



Pohon yang tersisa di Hutan Lubuk Bintiolo mencuat dari sela-sela ladang jagung.

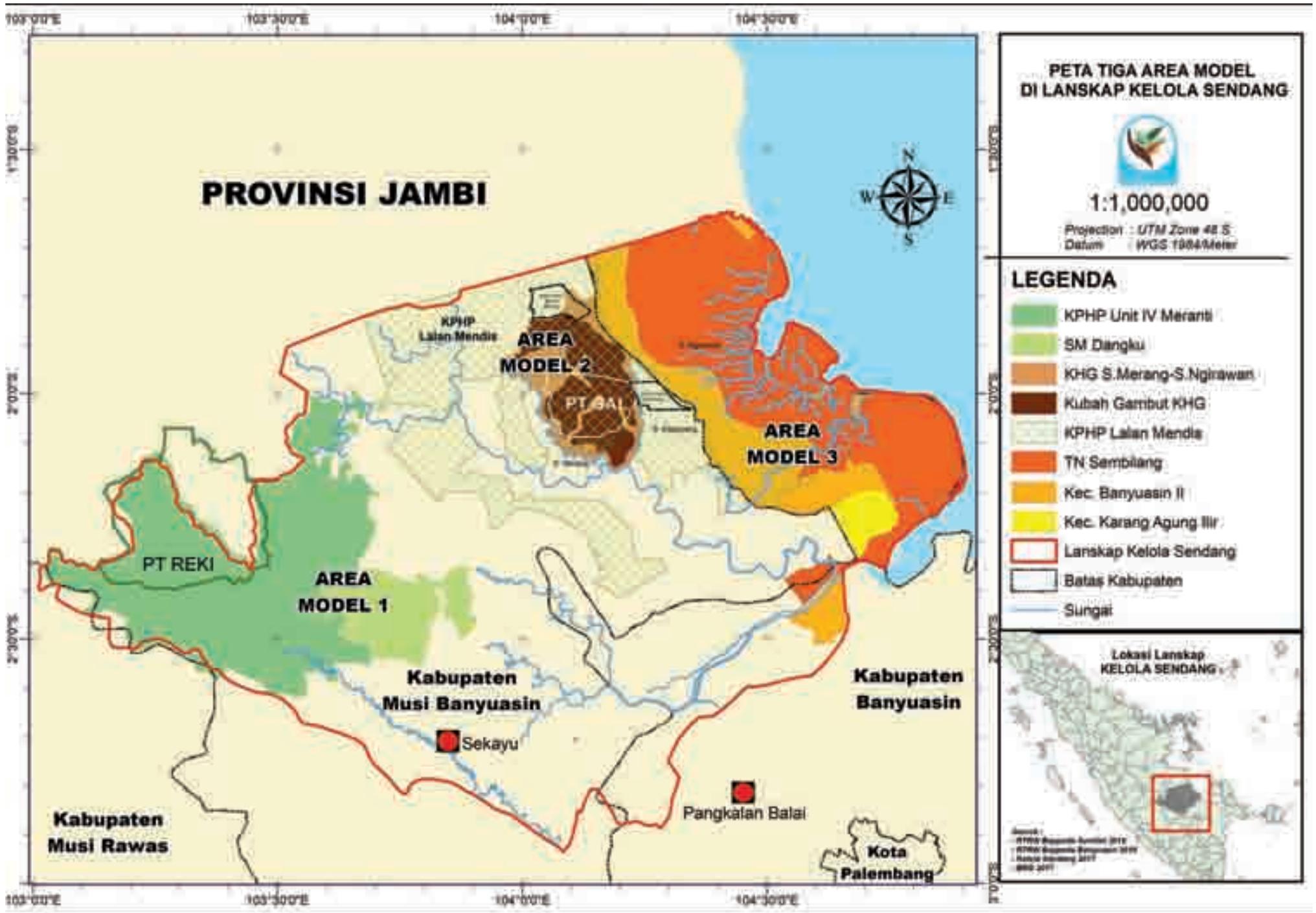
FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

merintah provinsi, donor, juga pihak-pihak lain, bisa diyakinkan untuk meneruskan pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Hari-hari ke depan Regina ingin pemerintah bisa konsisten meneruskan rintisan Kelola Sendang. Konsisten turun ke lapangan, menyapa masyarakat, mengajak ngobrol, meraih kepercayaan. Hari demi hari. “Ini butuh keahlian tersendiri. Juga tim khusus,” kata Regina. Terlibat dalam Kelola Sendang ini membuat Regina paham bahwa ada kerinduan pada masyarakat di lapangan. “Rindu merasa diperhatikan,” katanya. Rindu dimanusiakan.

Manusia. “Itulah titik utama pembenahan lanskap berkelanjutan,” kata Akhmad Arief Fahmi dari Yayasan Penabulu. Perjalanan bersama Kelola Sendang, Arif menekankan, mengajarkan bahwa pembenahan lanskap sama sekali bukan soal penyediaan bibit pohon atau selebar kertas pengakuan status perhutanan sosial. “Saya rasa, penekanan pada faktor manusia ini yang harus dilakukan seandainya Kelola Sendang diteruskan, atau diadopsi dalam program lain,” kata Arif. Begitu hati manusia tersentuh, hal lain tinggal persoalan teknis yang mudah dicari solusi.

Damayanti Buchori juga sepakat bahwa perjalanan masih panjang. Pengelolaan lanskap yang berkelanjutan memang tidak pernah akan mencapai titik finish. Dia akan terus berkembang bersama lanskap yang juga terus bertumbuh. “Kelola Sendang membuktikan bahwa ikhtiar menuju sustainable itu bisa, layak, dan harus diperjuangkan,” kata Damayanti.



# MENYELAMATKAN DUDUNG DAN 22 GAJAH



Dudung yang direlokasi ke Hutan Harapan tertangkap camera trap.

FOTO: KELOLA SENDANG

Affan Sobari suatu hari berbicara tentang gajah. “Selama ini belum banyak diketahui kalau di daerah perbatasan taman nasional dengan Raja Palma merupakan habitat gajah,” katanya, “Belum banyak aktivitas di situ. Jadi, belum terdeteksi.” Tapi, dia melanjutkan, pada 2015 baru dideteksi, ternyata, di situ ada gajah.

Affan adalah Kepala Seksi Wilayah II Taman Nasional Berbak-Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Gajah yang dia maksudkan adalah gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang berada di perbatasan Taman Nasional Berbak-Sembilang dan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Raja Palma.

Temuan itu penting karena lokasinya berada di luar kantong habitat gajah yang baru dikenali dan dipetakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan pada 2016. Hutan Lalan merupakan kantong habitat terdekat dengan lokasi temuan, salah satu kantong habitat gajah terluas di Sumatera Selatan.

Perbatasan Raja Palma-Taman Nasional memiliki karakteristiknya hutan rawa yang kering kerontang ketika kemarau tapi saat musim hujan bisa digenangi air hingga 1 meter. Sebagianawasannya merupakan daerah peralihan dengan ekosistem mangrove. Di sebelah utaranya berbatasan dengan hutan mangrove Sungai Sembilang; di timurnya, Solok Buntu; dan di sebelah selatan, mangrove Sungai Bungin.

“Mungkin karena di situ banyak sekali tersedia pakan. Antara hampan tempat tinggal dia (gajah) itu cukup makanannya. Cuma, yang namanya gajah itu ‘kan memerlukan pergerakan ke tempat lain. Makanya terkadang dia keluar dari kawasan taman nasional,” kata Affan.

Pada 2017 datang lagi laporan atas penampakan gajah. Kali ini berasal dari Desa Tabala Jaya, Kabupaten Banyuasin, di perbatasan desa dengan kebun sawit PT Raja Palma, lokasi yang juga berdekatan dengan area Taman Nasional Berbak-Sembilang. Setahun kemudian informasi tentang eksistensi gajah diperkuat hasil observasi Hutan Kita Institute (HaKI) di wilayah PT Raja Palma yang membuktikan enam ekor gajah terlihat di kawasan perkebunan.

Zoologica Society of London (ZSL), yang menurut Prof. Damayanti Buchori, Direktur Proyek Kelola Sendang, berkepentingan mengajukan tema konservasi dalam program Kelola Sendang, sehingga menganggap desa-desa sasaran harus menjadi batu pijakan bagi satwa liar, menindaklanjuti informasi yang beredar. Melalui program Kelola Sendang, ZSL meluncurkan survei lapangan sebagai pendahuluan untuk mengkaji lebih lanjut perihal sebaran gajah dan populasinya.

Tim survei yang terdiri atas beberapa lembaga berangkat pada Maret 2019 menuju perkebunan PT Raja Palma. Di antara yang turut adalah Dafid Pirnanda, koordinator penelitian gajah ZSL di Taman Nasional Berbak-Sembilang.

Dafid menuturkan, sewaktu prasurevei, tim mendapati gajah jantan dewasa beberapa ekor. Ada yang berekor puntung, ada yang berekor panjang. “Saat itu kondisi gajah sehat. Mereka menghindari saat mendengar suara perahu kami mendekat,” katanya.

Setelah berperahu, Dafid dan tim berjalan kaki menelusuri batas kebun dan Taman Nasional. Mereka menemukan jejak kaki, feses, dan lokasi beristirahat yang tandanya adalah rumput-rumput rebah. Tim memperkirakan setidaknya ada enam gajah beredar di perbatasan Taman Nasional dan perkebunan Raja Palma.

Tim melakukan survei lanjutan di bulan Mei untuk memasang 14 kamera jebak di lokasi yang sebelumnya diidentifikasi sebagai jalur gajah. “Ada di beberapa titik. Yang jelas, itu di dalam kawasan taman nasional maupun di luar. Di daerah-daerah yang biasa dilalui oleh gajah selama beberapa minggu,” ujar Affan.

Pada Juni, tim kembali berkunjung untuk mengambil kamera. Dari semua yang dipasang, hanya empat kamera berhasil merekam. Dari hasil itu, ZSL mengundang Jumiran, seorang pawang gajah senior dari Pusat Latihan Gajah Padang Sugihan yang sudah 30 tahun lebih mengenal gajah. Bagi Jumiran, membedakan gajah satu dengan lainnya seperti membalik telapak tangan. Mudah saja.

Telaah Jumiran menyimpulkan jumlah gajah ada 22 ekor. Mereka berada dalam satu populasi dengan lima anak; tepatnya, 13 individu betina dan sembilan individu jantan. Empat ekor gajah jantan di antaranya lebih sering tertangkap kamera sedang menyendiri. Mereka sudah tak bergantung pada kelompok, dan memisahkan diri. Salah seekor gajah jantan yang tertangkap kamera adalah gajah yang dijumpai tim saat survei pendahuluan.

“Informasi gajah di Sembilang tidak terekspos karena konfliknya rendah sekali. Atau, bisa jadi ada konflik, tapi tidak terberitakan,” kata Dafid.



***Cuma, yang namanya gajah itu ‘kan memerlukan pergerakan ke tempat lain. Makanya terkadang dia keluar dari kawasan taman nasional,***



**AFFAN**

Kepala Seksi Wilayah II Taman Nasional Berbak-Sembilang, Banyuasin

## Kantong Habitat Gajah

Di Sumatera Selatan terdapat delapan kantong habitat gajah, dua di antaranya diperkirakan memiliki populasi terbanyak: 32 ekor di hutan Benakat Semangus, dan 15-22 ekor di hutan Sugihan Simpang Heran. Dengan total perkiraan maksimal jumlah gajah di Sumatera Selatan 93 ekor, keberadaan Taman Nasional Berbak-Sembilang menjadi lokus penting demi kelangsungan hidup satwa yang dilindungi itu.

Hasil survei tim ZSL memperkirakan gajah-gajah di Taman Nasional Berbak-Sembilang lebih banyak beraktivitas di perbatasan taman nasional dengan perkebunan karena kanal-kanal perkebunan menyediakan air melimpah untuk kebutuhan kelompok. Di musim kemarau, ketika air tawar dalam jumlah banyak sulit didapat, terutama untuk mandi, pilihan untuk mendatangi kanal sangat terbuka.

Tim merekomendasikan kepada PT Raja Palma untuk memastikan zona aman dengan Taman Nasional Berbak-Sembilang dan menjadikannya kawasan bernilai konservasi tinggi dengan jarak minimal 500 meter dari taman nasional. PT Raja Palma juga disarankan mengaktifkan jalan batas untuk mempermudah pemantauan gajah sehingga konflik yang melibatkan hewan itu bisa ditekan.

“Ada sekali kejadian gajah masuk ke daerah persawahan masyarakat. Masuknya dari Bungin, meski di belakang itu masuknya bisa nyambung ke Solok Buntu. Tapi terbatas oleh mangrove. Gajah ‘kan tidak bisa masuk ke mangrove yang berat rawa-rawanya,” ujar Affan.

Jejak kaki gajah yang ditemukan saat survei ZSL.

FOTO: KELOLA SENDANG



Aksi candid gajah Dudung.

FOTO: KELOLA SENDANG

## Dudung nan Beruntung

Di tempat lain ada cerita lebih menantang, yakni tentang seekor gajah soliter. Ia dijuluki *Lucky Dudung*, atau Si Beruntung Dudung, seekor gajah dewasa berusia 24-26 tahun yang pindah dari tempat lahirnya di Hutan Tiga Puluh, Jambi, pada awal Oktober 2018 karena tempat itu tak lagi sanggup mencukupi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Mungkin baginya hal itu berat, karena di sana kelompok kecilnya tinggal. Namun para peneliti satwa liar menemukan bahwa perkawinan sedarah atau antarkerabat dapat mempercepat kepunahan. Karenanya, Dudung tak pula bisa berlama-lama di Jambi dan mendapat rumah baru di Hutan Harapan, perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan.

Di hutan yang berbatasan dengan area perusahaan dan perkebunan warga itu Dudung dianggap bakal menemukan kondisi yang lebih baik. Luas hutan kelolaan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) itu cukup, dan betina-betina dari kelompok gajah yang asing bagi Dudung pun tersedia.

Suatu hari ada bagian perkebunan warga yang berisi pisang dan sawit rusak. Warga berpikir hanya satu pelaku yang bisa melakukan itu: gajah. Di tempat lain, sinyal GPS menggambarkan jalur jelajah seekor gajah. Jalur itu melintasi perkebunan. Sinyal diketahui terkirim dari perangkat yang terpasang di leher Dudung.

Dudung lantas terlacak menyusuri Sungai Batanghari Leko ke arah tenggara menuju Hutan Lindung Meranti. Dia lalu masuk Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintlalo, dan Desa Pangkalan Bulihan. Kemudian ia tercatat hadir di Desa Ulak Kembang dan Sungai Napal yang dekat dengan Suaka Margasatwa Dangku.

Penjelajahan Dudung tak pernah bisa diduga sebelumnya. Kejadian tersebut menyengat lembaga-lembaga yang mengatur kepindahannya.

ZSL Indonesia melalui program Kelola Sendang memutuskan bergerak. Pada Desember 2018, lembaga ini memfasilitasi pertemuan BKSDA Jambi dan Frankfurt Zoological Society-Indonesia dengan BKSDA Sumatera Selatan. Hasilnya adalah serangkaian sosialisasi dan pendampingan kepada warga di delapan desa yang berpotensi berkonflik dengan Dudung.

Pertemuan selanjutnya membicarakan koridor satwa, konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Hadi S. Alikodra dan koleganya pada 2013. Banyak pihak optimistis konsep koridor satwa ini dapat direalisasikan. Alasannya, menengok data-data hasil survei ZSL sejak 2017 tentang potensi jalur untuk koridor satwa, pergerakan Dudung tidak jauh dari jalur yang sudah disurvei.

Untungnya, sekarang Dudung sudah kembali ke Hutan Harapan. Bisa jadi, suatu kali nanti, ia akan menapaktilasi penjelajahan ke desa-desa di Musi Banyuasin.

Selain itu, beredar kabar bahwa gajah-gajah baru bakal mendiami Hutan Harapan. Gajah-gajah yang habitatnya terdesak atau terperangkap konflik kelak bergabung dengan Dudung dan gajah-gajah lain seperti Haris, gajah jantan dewasa yang lebih dulu memasuki Harapan. Haris tidak terlibat masalah dengan warga, tapi siapa menjamin apa yang bakal terjadi nanti.

Dengan hasil program Kelola Sendang, warga dan perusahaan menjadi paham apa yang harus dilakukan jika kelak berhadapan dengan gajah lain semacam Dudung. Sosialisasi dan pendampingan oleh ZSL dan lembaga-lembaga terkait membawa pengetahuan dan pandangan berarti tentang mitigasi konflik dengan satwa liar.

# 'KEBLASUK' DI HUTAN DANGKU

PEMULIHAN EKOSISTEM PARTISIPATIF  
SUAKA MARGASATWA DANGKU

DEMPLOT KEMITRAAN KONSERVASI  
"KELOMPOK TANI KONSERVASI MAJU BERSAMA"

Didukung Oleh:



Lakoni, Ketua  
Kelompok Tani  
Konservasi Maju  
Bersama di Sungai  
Petai, Suaka Mar-  
gasatwa Dangku,  
Musi Banyuasin.

FOTO: Y. SUPRAYOGI

Malam sudah satu jam jatuh di Blok Sungai Petai, Suaka Margasatwa Dangku, Musi Banyuasin. Di depan sebuah pondok di blok itu empat perempuan tekun menatap TV tabung 20 inci yang digantung satu setengah meter di atas

balai-balai.

Salah satunya, Mufidah, 54 tahun, tuan rumah, yang menonton sambil berbaring. Kepalanya berada di atas bantal lepek yang dilipat.

Perempuan yang termuda, Martinah, 51 tahun, menonton sambil sesekali melayani pembeli. Maklum, pondok itu juga berfungsi sebagai toko “palugada” – apa *lu* mau *gua* ada – mulai dari barang kelontong, ikan asin, hingga bensin. Martinah sehari-hari bekerja di toko Mufidah.

Pada malam Jumat, 23 Januari 2020, itu Mufidah dan tiga tetangganya sedang menonton sinetron Samudra Cinta. Entah episode yang keberapa. Di layar kaca, Samudra yang baru tiba di rumahnya dikeroyok sekelompok preman suruhan Doni, musuh bebuyutannya. Samudra, pemain utama dalam sinetron ini, sudah hampir kalah. Lalu, seperti dugaan Mufidah, sutradara menyetel Feri, sahabat Samudra, agar mengunjungi rumah Samudra. Kedatangan Feri membuat keadaan berbalik. “Tuh, ‘kan!” kata Mufidah. Malam kian larut. Tapi pondok Mufidah makin ramai. Balai-balai sudah berganti pengunjung berkali-kali. Mereka kebanyakan pria dewasa dan anak-anak muda. Keperlu-

annya macam-macam: dari sekadar mengobrol, belanja, hingga numpang ngecas telepon gratis--dan mendapat bonus kopi serta gorengan.

Suasana tak seperti di hutan; tak terdengar suara hewan malam di sekitar pondok Bude Idah. Padahal hutan Dangku adalah suaka untuk harimau Sumatera, macan pohon, ajak, dan banyak hewan pemakan daging. Menurut data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, ada enam atau tujuh harimau di Dangku berdasarkan jejak kaki dan kotorannya. Yang terdengar lantang justru derum genset 5000 Watt dari belakang pondok. Suaranya monoton, membosankan.

Baru sekitar tiga tahun kehidupan di Blok Sungai Petai berjalan normal. Penyebabnya bukan karena ada binatang buas yang mengacau kampung, tapi karena blok ini berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa (SM) Dangku. Di suaka margasatwa mematahkan ranting saja dilarang.

Berkali-kali petugas BKSDA Sumatera Selatan bersama polisi melakukan operasi penertiban di Sungai Petai. "Suasannya waktu itu seperti perang saja," kata Lakoni, 59 tahun, tokoh masyarakat Sungai Petai.

Karena operasi penertiban yang terus-menerus waktu itu, warga Sungai Petai hengkang satu per satu. Jumlah warga men-ciut dari semula ribuan kepala keluarga menjadi tersisa beberapa ratus saja. "Yang masih tinggal ini adalah warga yang tak bisa lagi ke mana-mana, karena di luar sudah tak punya apa-apa lagi," kata Lakoni lagi. Mereka, menurut dia, tersesat (*keblasuk*) di hutan Dangku.

Untuk membantu membenahi karut-marut masalah yang berkaitan dengan para pemukim yang masih tinggal di SM Dangku itulah, juga membekali petugas BKSDA dengan kemampuan pendekatan yang bisa menghindari konflik, Kelola Sendang hadir pada 2017. Tidak kebetulan; ini merupakan bagian dari pelaksanaan programnya.

## Kampung Pendetang di Hutan

Hutan Dangku di pedalaman Musi Banyuasin ditetapkan sebagai suaka margasatwa pada 1991 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.245/Kpts-II/1991. Kala itu luasnya baru separuh dari luas sekarang, sekitar 31.752 hektare. Lalu, pada 2013, melalui SK Menteri Kehutanan No.822/Menhut-II/2013, wilayahnya diperluas menjadi 70.274 hektare—lebih luas sedikit dari Jakarta.

SM Dangku merupakan suaka untuk harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir Asia (*Tapirus indicus*), dan aneka burung yang dilindungi seperti elang dari famili *Accipitridae* dan burung rangkong dari famili *Bucerotidae*. Ada setidaknya 380 spesies hewan di hutan ini, terdiri atas 61 spesies kelas mamalia, 269 spesies kelas *aves*, 31 spesies kelas reptilia, dan 19 spesies kelas amfibi. Di hutan Dangku juga tumbuh sejumlah spesies pohon yang dilindungi.

Menurut Lakoni, ketika pemerintah menetapkan Sungai Petai sebagai suaka margasatwa, di kawasan ini sudah ada perkampungan. Merujuk hasil sensus BKSDA 2019, sekitar 1 persen warga Sungai Petai sekarang datang pada 1987-1988. "Bahkan, warga sebenarnya sudah bermukim di Sungai Petai jauh lebih lama lagi," ujar kakek 11 cucu yang lahir dan besar di Dawas ini. "Dulu di dalam hutan ini banyak permukiman. Mereka ini kalau baliknya ke Dawas." Desa Dawas adalah desa yang berbatasan langsung dengan batas SM Dangku di Blok Sungai Petai.

Lakoni menuturkan, pada 1973, Sungai Petai pernah ramai ketika di sana beroperasi perusahaan kayu PT Remaja. Pada 1983, Sungai Petai menjadi kampung mati karena warganya beramai-ramai ikut transmigrasi. Namun jejak mereka masih tampak. "Di dalam hutan ada pohon karet besar-besar, sepinggang orang dewasa. Pohon itu pasti ditanam mereka dulunya," ujar warga Su-



Sukirah, warga yang terjebak di Suaka Margasatwa Dangku, sedang menjemur tiwul.

FOTO: Y. SUPRAYOGI

ngai Petai lainnya, Sukatwan. Sungai Petai, yang berjarak dua setengah jam perjalanan dari jalan lintas Sumatera, sempat kembali ramai ketika dua perusahaan kayu beroperasi pada 1997 dan 2000. “Jadi, sejak Dangku belum jadi SM, warga Dawas sebenarnya sudah masuk keluar hutan ini dengan leluasa,” ujar Lakoni.

Menimbang riwayat tersebut, warga Dawas menganggap Sungai Petai sebagai tanah adat mereka. “Tapi oleh Kehutanan, karena ndak tahu soal ini, diklaim saat meluaskan SM Dangku 1,” kata Lakoni. “Karena berstatus SM, warga tak boleh lagi memanfaatkan hutan. Warga tak terima.”

Untuk merebut kembali Sungai Petai dari BKSDA, warga mendirikan Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS). Waktu itu warga ingin hutan adat dikembalikan ke adat.

Salah satu program DPSS adalah mengupayakan Sungai Petai menjadi wilayah perluasan Desa Dawas. Karena itu, DPSS mengundang warga untuk bermukim di Sungai Petai. Untuk menjaga keamanan, Lakoni didapuk sebagai kepala sekuriti. Gajinya Rp 2 juta sebulan.

Puncak kedatangan warga ke Sungai Petai terjadi antara 2011-2014. Penghuni Blok Sungai Petai kala itu pernah mencapai 1.200 kepala keluarga (versi Lakoni sebesar 2.400 KK). Saking banyaknya pendatang, permukiman dibagimenjadi empat blok, dari A sampai D. Pada 2013 warga juga mendirikan masjid. Kini masjid ini menjadi satu-satunya bangunan permanen yang masih berdiri di tengah kampung.

Mufidah dan suaminya, Jaenudi, termasuk warga pertama yang datang di Sungai Petai pada era DPSS. “Kami ke sini 2011,” ujar Mufidah. Bude Idah hijrah ke Sungai Petai karena ingin punya tanah. “Tapi aku nggak beli tanah ini. Waktu itu Pak De nebang saja,” katanya.

Rupanya kabar soal pembukaan pemukiman di Sungai Petai menyebar hingga menyeberang pulau. Warga yang datang tak hanya dari sekitar Musi Banyuasin. Ada yang berasal dari Aceh,

Riau, Lampung, Sumatera Utara, hingga dari lima provinsi di Pulau Jawa. Yang terjauh dari Bali.

Sukatwan, misalnya, datang dari Lampung. “Waktu itu, pada 2013, saya mendengar dari saudara di Sungai Lilin kalau di Desa Dawas sedang dibuka pemukiman di Kampung Petai yang nantinya menjadi wilayah perluasan Desa Dawas,” ujarnya.

Para pendatang kebanyakan tidak mendapat tanah secara gratis. DPSS memungut uang pancong alas. “Awalnya uang pancongnya Rp 500 ribu, lalu ada yang sampai ngasih jutaan ke serikat,” kata Lakoni. “Itu sudah satu paket. Ada rumah, tanah, dan ladang. Tapi, waktu sampai di sini warga buka hutan sendiri,” ujar Lakoni.

Sukirah, 64 tahun, termasuk pendatang yang membayar jutaan kepada DPSS. Ia transmigran di Sungai Lilin. Asalnya dari Grobogan, Semarang. “Saya datang ke Sungai Petai bulan 12 tahun 2012 di tahap ketiga,” ujarnya. Ia bercerita sebenarnya sudah lama ada info bukaan (pemekaran) di Sungai Petai. Waktu uang pancong alasnya Rp 500 ribu, suaminya belum berminat. Ketika pancong alasnya menjadi Rp 1 juta, lalu Rp 1,5 juta, suaminya juga belum ada minat. “Waktu ada minat, biayanya udah Rp 3,5 juta.”

Karena ia ingin sekali punya tanah, ia langsung mengambil empat petak di Sungai Petai. “Tapi sampai sekarang baru dapat pekarangan setengah hektare. Lahan kebun belum dapat,” ujarnya.

Untuk menyambung hidup, nenek lima anak itu menanam singkong. Lahannya? “Nanamnya numpang. Pokoknya buka saja. Kalau nggak nekat buka, mau apa, Ka. Wong belum dikasih.”

Dari seperempat hektare kebun singkong, Sukirah bisa panen empat ton pada bulan ketujuh. Namun harga singkong sekarang sedang jatuh, hanya Rp 1.100 per kilogram. Karenaitu, ia mengubah singkongnya menjadi tiwul sebelum dijual ke Bude Idah, Rp 8 ribu seliter.

Tapi ada harga ada usaha. Tiwul tak gampang dibuat. Tahapannya banyak: dimulai dengan mengupas, menjemur, merendam, meniriskan, menumbuk, mengukus, mengayak, dan menjemurnya sekali lagi. Perlu sepekan untuk satu siklus produksi, itu pun jika hujan tidak turun. “Cape, tapi kalau nggak gini nggak makan,” katanya.

Sukirah mengaku ia masih punya rumah di Sungai Lilin, meski reot karena pernah terbakar. Rumah itu kini ditempati salah satu anaknya. Anak yang lain ada yang tinggal di Lampung dan ikut suami di Jawa. “Jadi di sini cuma numpang, karena memang nggak punya (tanah). Mudah-mudahan kalau pemerintah mikirin akan ada harapan di sini. Buat tua nanti. Kalau emang di sini gak jadi hak milik, ya pulang ke Sungai Lilin.”

Jika Sukirah masih punya rumah untuk pulang, tidak demikian dengan Sukatwan, 41 tahun. Ayah dua anak kelahiran Margomulyo ini telah menjual seluruh harta bendanya di Lampung sebelum pergi ke Sungai Petai. Uang itulah yang kemudian dibelikan tanah dan kebun. “Saya memang ingin sekali berkebun,” ujarnya. Mula-mula hidup Sukatwan dan warga Sungai Petai ayem-tentrem, namun hanya untuk setahun. Bersamaan dengan perluasan SM Dangku, BKSDA mulai menertibkan perambah. Hidup Sukatwan sontak berubah. “Saya tadinya mengira Sungai Petai adalah calon perluasan Desa Dawas. Ternyata malah masuk SM Dangku. Padahal saya



**Awalnya uang pancongnya Rp 500 ribu, lalu ada yang sampai ngasih jutaan ke serikat**



**LAKONI**

Warga Desa Sungai Petai



**Demplot  
Kelompok Tani  
Konservasi Maju  
Bersama seluas  
2 hektare yang  
sudah ditanami  
cabe merah.**

FOTO: Y. SUPRAYOGI

tak mungkin lagi kembali ke Lampung. Sudah tak ada apa-apa di sana,” katanya.

Sungai Petai pun memasuki masa-masa tergelapnya. Setidaknya ada empat kali operasi gabungan besar-besaran untuk mengusir warga. Tapi Lakoni dan warga melawan. “Kami waktu itu di-backup Walhi dan AMAN,” kata Lakoni.

Tapi pemerintah bergeming. Beberapa orang ditangkap. Mula-mula ketua serikat, lalu bendaharanya. Lakoni belakangan ikut juga ditangkap.

Sebenarnya sejumlah warga sudah mengingatkan Lakoni agar pergi dari Sungai Petai karena namanya ada dalam daftar pencarian orang. “Kau larilah, kau ditarget,” begitu orang-orang bilang kepadanya. “Tapi aku memang *lolo* (bodoh). Aku pikir sebagai keamanan nggak boleh mundur. Apa yang terjadi, terjadilah.” Maka, ketika suatu hari aparat kepolisian masuk ke Sungai Petai, Lakoni menghadang di depan portal. “Lalu aku ditanya polisi: Siapa Bapak? Aku menjawab: Lakoni. Polisi itu langsung berkata: Nahkebetulan. Aku langsung ditangkap dan dibawa ke Palembang.”

Lakoni kemudian dihukum 20 bulan. “Aku ditangkap 2015, balik 2017.”

Di dalam tahanan, Lakoni mendengar pengusuran dilakukan lagi. Sebagian besar warga sudah berhasil diusir, namun masih ada yang bertahan. Menurut Lakoni, warga yang tak lari adalah mereka yang tak punya tempat lari. “Mau keluar sebenarnya, tapi hartanya di tempat asal sudah habis dijual,” ujar Lakoni.

Menurut catatan BKSDA Sumatera Selatan, pada 2016 tinggal tersisa 961 jiwa yang bermukim di blok itu. “Sekali lagi saja penertiban dilakukan, wilayah ini bisa dibersihkan dari warga,” kata seorang polisi hutan senior di BKSDA Sumatera Selatan.

Tapi cerita berbelok tak diduga. Pada 2017 terbit Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 tentang Penyelesaian Penguasaan Ta-

nah dalam Kawasan Hutan. Pasal 9 ayat 1 Perpres itu menyebutkan, pola penyelesaian untuk warga hutan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan konservasi dilakukan melalui *resettlement* atau relokasi. Ini berarti BKSDA tak bisa lagi main gusur warga.

Masalahnya, Perpres itu belum memiliki peraturan turunan terkait prosedur, mekanisme, dan pembiayaan *resettlement*, bahkan hingga kini. Walhasil, opsi untuk merelokasi masyarakat Kampung Petai belum bisa dilakukan. “Tapi tetap saja, Perpres ini membuat kami mengubah model penanganan warga perambah,” kata Meizannur, petugas bagian Data dan Pelaporan BKSDA di Resort Konservasi Wilayah I Suaka Margasatwa Dangku.

Ada opsi lain dari pemerintah: melalui pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Namun ini pun tak bisa diterapkan untuk warga Sungai Petai, karena lokasinya berada di dalam kawasan di SM Dangku.

Zoological Society of London (ZSL), yayasan di bidang konservasi satwa dan habitatnya dari Inggris, kemudian datang ke Sungai Petai melalui Kelola Sendang pada akhir 2017. Dengan empat prioritas programnya, Kelola Sendang menawarkan kemitraan pengelolaan lanskap di tingkat tapak. Seluruhnya ada empat program prioritas: perbaikan aspek kependudukan dan pendidikan masyarakat desa hutan; pengurusan akses lahan legal masyarakat desa hutan; penguatan penghidupan masyarakat desa hutan; serta rehabilitasi lahan dan konservasi sungai secara partisipatif.

Tentu saja, Kelola Sendang memiliki program untuk BKSDA, terutama para petugasnya. Soalnya, perlu ada pembekalan ilmu baru untuk menjalankan amanat Perpres. Petugas

lapangan yang semula bertugas melakukan penindakan harus menjadi pengayom karena Perpres ini. Pendekatan yang sebelumnya cenderung represif harus digeser menjadi partisipatif.

Untuk meningkatkan kapasitas petugas BKSDA, Kelola Sendang menyelenggarakan pelatihan fasilitator bagi staf BKSDA se-Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada Oktober 2018. Pelatihan di Palembang ini diikuti 29 staf BKSDA – 24 laki-laki, lima perempuan. Selama empat hari petugas BKSDA mendapat pelatihan teknik komunikasi dan fasilitasi dasar.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), Wiratno, sempat melakukan diskusi jarak jauh dengan peserta pelatihan. Dalam telekonferensi itu Wiratno meminta peserta mulai melihat penyelesaian masalah perambahan kawasan konservasi dengan perspektif yang berbeda. “Kita tidak lagi melihat masyarakat sebagai penghambat. Fokus kita adalah pada bagaimana caramemberdayakan masyarakat agar mampu menjadi mitra,” ujarnya.



***Fokus kita adalah pada bagaimana caramemberdayakan masyarakat agar mampu menjadi mitra***



**WIRATNO**

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

## Menertibkan Identitas, Mencatat Penghuni

Nun di Sungai Petai, empat program Kelola Sendang juga terus bergulir. Untuk membantu warga hutan dalam aspek kependudukan, Kelola Sendang membantu BKSDA menertibkan identitas warga. Soalnya, warga Sungai Petai banyak yang tak ber-KTP. Tapi ini tak gampang.

Banyak warga Sungai Petai tidak punya biaya untuk mengurus surat dari tempat asalnya, misalnya surat pindah, yang diperlukan untuk mendapat KTP baru. Maklumlah, penghasilan hampir separuh warga Sungai Petai, yang hidup mengandalkan getah karet, di bawah Rp 1 juta per bulan. Jikapun ada warga bisa pergi mengurus surat di tempat asalnya, kepala desanya kesulitan memberikan surat yang dibutuhkan. "Karena kepala desa sudah tidak pernah melihat lagi orang-orang ini selama bertahun-tahun," ujar Amsar, Kepala Desa Dawas.

Beruntung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin akhirnya bersedia mengurus identitas warga Sungai Petai. Warga cukup melengkapi data dasar. Misalnya ijazah atau buku nikah. Bahkan jika tidak ada data sama sekali, warga bisa mengisi formulir yang ditandatangani Kepala Desa.

Tersisa satu masalah setelahnya, yakni soal alamat domisili warga. Soalnya warga tak mungkin beralamat di dalam kawasan. Tapi ini pun akhirnya bisa diselesaikan setelah Desa Dawas bersedia memberikan alamat kepada warga Sungai Petai di kawasan Desa Dawas, di luar SM Dangku. "Kemarin ada yang menikah warga sini. Alhamdulillah mereka bisa nikah resmi karena ada identitas," ujar Sukatwan. "Tapi memang masih banyak yang belum punya KTP."

Warung serba ada Bude Mu'adah, tempat warga belanja kebutuhan sehari-hari.

FOTO: Y. SUPRAYOGI

Kegiatan lain terkait kependudukan adalah membantu BKSDA menyensus warga. Sensus digelar dua kali, pada November 2018 dan 2019.

Sebenarnya BKSDA Sumatera Selatan telah menggelar sensus tahunan kepada warga Sungai Petai sejak 2015. Namun, pada sensus 2018 bersama Kelola Sendang, beberapa data baru ditambahkan. Misalnya pemetaan lokasi pondok dan luas pekarangan. Setiap pondok yang telah didata juga ditemplei stiker dan nomor (ID) pondok. Saat pengambilan data, tim juga mengambil foto KTP/KK, foto pondok, serta foto penghuninya. Data-data ini diambil untuk memudahkan pengelola dalam melakukan monitoring di tahun berikutnya.

Dari hasil inventarisasi itu diketahui pada November 2018 ada 305 pondok dengan 292 Kepala Keluarga (727 jiwa) di Sungai Petai. Pada sensus 2019 jumlah pondok menyusut menjadi 275 unit dan jumlah penghuni berkurang menjadi 269 KK. Tapi jumlah jiwa naik menjadi 731. Jumlah rumah dan KK pada 2019 berkurang, tapi jumlah jiwa malah bertambah, karena pada 2018 ada sejumlah warga yang tak ikut disensus karena sedang berada di luar Sungai Petai.

Berkat pencatatan lokasi pondok, mobilitas pondok warga bisa dipantau. Hal ini penting karena, di Sungai Petai, pondok warga bisa berpindah tiba-tiba, biasanya ke tempat yang lebih ramai. Salah satu alasannya adalah pertimbangan keamanan. Soalnya di Sungai Petai juga ada pencuri. Dahim, warga Blok C, misalnya, pernah kehilangan terpal barunya. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan hilangnya ayam milik beberapa warga di blok itu.

Masih di blok tempat tinggal Dahim, ada Juwaher. Ia juga mengeluh karena banyak bagian rumahnya yang hilang dicuri. Karena itu, ia berencana memindahkan rumahnya ke Blok A, ke sebelah rumah anaknya.

Di bidang pendidikan, Kelola Sendang membantu sekolah dasar di Kampung Petai agar pembelajaran berjalan baik. Yang

rutin, misalnya, dengan mengadakan buku-buku bacaan. Sekolah satu-satunya di Kampung Petai ini bukan sekolah resmi karena, itu tadi, berada di dalam kawasan konservasi. Untuk administrasi, sekolah ini menginduk ke Sekolah Dasar Negeri 1 Dawas.

Bangunannya juga tidak permanen. Seperti semua pondok di blok ini, bangunannya melulu kayu. Penyebabnya, lagi-lagi, karena sekolah ini berada di kawasan konservasi.

Ada empat ruangan di sekolah ini: tiga ruang untuk belajar kelas 1 sampai 6, satu ruang untuk taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Muridnya 47 anak. Gurunya empat orang, termasuk Sukatwan.

Tak satu pun dari keempat guru itu bertitel sarjana. Gara-gara soal ini, status guru hingga kini masih sukarelawan. "Karena untuk menjadi honorer 'kan harus sarjana," ujar Sukatwan. Makanya ia ikut mendorong habis-habisan dua guru di sekolahnya bisa kuliah di Universitas Terbuka.

Soal bayaran? Sukatwan tertawa ditanya soal ini. Ia mengatakan gaji guru dibayar setiap triwulan. Besarnya Rp 450 ribu. "Uangnya dari sumbangan orang tua murid. Sukarela juga. Jumlahnya kadang tak cukup untuk membiayai ATK," kata Sukatwan.



***Uangnya dari sumbangan orang tua murid. Sukarela juga. Jumlahnya kadang tak cukup untuk membiayai ATK***



**SUKATWAN**  
Warga Desa

## Konservasi sebagai Ekosistem Lanskap

Program prioritas Kelola Sendang yang lainnya tentu saja konservasi. Ini program yang unik, mungkin yang pertama di Indonesia. Sejak Desember 2017, bekerja sama dengan BKSDA Sumatera Selatan, Kelola Sendang mengembangkan role model penyelesaian masalah perambahan oleh masyarakat di SM Dangku melalui skema pemulihan ekosistem kawasan dan kemitraan multipihak.

Skema ini mengikuti 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal KSDAE. Menurut cara baru ini, kawasan konservasi tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari ekosistem lanskap. Dengan paradigma ini, pengelolaan kawasan konservasi perlu mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan nilai budaya masyarakat serta mengedepankan prinsip kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak. “Penyelesaian persoalan, antara lain perambahan akibat kemiskinan, tidak dapat ditempuh melalui penegakan hukum dan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat,” kata Direktur Jenderal KSDAE Wiratno dalam “Sepuluh Cara (Baru) Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia”.

Cara baru konservasi ini mendapat tambahan angin dengan terbitnya Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi bernomor peraturan P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 pada pertengahan 2018. Meski peraturan ini tak bisa diterapkan untuk warga Sungai Petai, karena masa tinggalnya belum genap 20 tahun, terbitnya peraturan itu membuat BKSDA Sumatera Selatan memiliki pijakan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya melalui skema kemitraan konservasi. Dengan begitu, warga diharapkan akhirnya akan berdaya dan secara sukarela

Sekolah anak-anak Sungai Petai yang menginduk ke SDN 1 Dawas, Musi Banyuasin.

FOTO: Y. SUPRAYOGI

mau meninggalkan kawasan SM Dangku.

Dengan payung peraturan ini, warga Sungai Petai diajak merehabilitasi kawasan melalui kegiatan penanaman kembali. Dalam menentukan jenis tanaman yang ditanam, BKSDA mempertimbangkan permintaan masyarakat untuk juga menanam pohon buah. “Jadi, warga di sini diminta menanam 70 persen tanaman hutan dan 30 persen MPTS,” kata Meizannur. “Sehingga hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh warga.” MPTS singkatan dari multi-purpose tree species, seperti buah-buahan.

Sukatwan menilai rasio jenis pohon 70:30 yang ditawarkan BKSDA masuk akal. “Kalau dibalik, misalnya yang 70 persennya tanaman buah, ya, namanya bukan hutan, tapi kebun,” ujarnya sembari tertawa. Karet boleh ditanam? “Kami dilarang menanamnya karena itu bukan tanaman hutan.”

Lakoni juga memuji program ini. “Sudah benar cara ZSL ini,” katanya.

Bagi BKSDA, program ini tak hanya membantu menghidupkan lahan kritis karena masyarakat juga ikut membantu melindungi kawasan SM Dangku dari perambahan baru, kebakaran hutan, pembalakan liar (illegal logging), dan perburuan liar. Ada pula kesepakatan dengan warga untuk tidak menambah hunian baru, kebun baru, dan warga baru.

Kelola Sendang membantu BKSDA dalam program ini dengan ikut mengadakan bibit tanaman dan pupuk, serta membiayai kegiatan penanaman, perawatan, penyulaman, serta pembangunan persemaian semi-permanen.

Untuk pengadaan bibit, Kelola Sendang bekerja sama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Sejak program ini dimulai pada Desember 2017 hingga Juli 2018, Kelola Sendang dan BPTH telah menyumbang 40 ribu bibit, dari jelutung (*Dyera sp.*), bambang lanang (*Michelia sp.*), ketapang (*Terminalia catappa*), tanjung (*Mimusops elengi*), pulai (*Alstonia scholaris*), meranti (*Shorea sp.*), gaharu (*Aquilaria sp.*), jabon merah (*Anthocephalus mac-*

*rophyllus*) dan jenis-jenis tanaman MPTS seperti durian (*Durio sp.*) dan sirsak (*Annona muricata*). Selama periode tersebut, warga berhasil menanam 13.375 bibit pohon di area kritis Sungai Petai seluas 32,8 hektare.

Pada awalnya penanaman itu dilakukan secara gotong-royong. Lalu, untuk mengakselerasi jumlah bibit yang ditanam, BKSDA dibantu Kelola Sendang mengembangkan model penanaman secara mandiri. Dalam model ini, masyarakat diberi sejumlah bibit untuk ditanam di sekitar pondok dan di kebunnya.

Sukirah, misalnya, ikut menanam aneka pohon buah. Ada jengkol, pete, hingga durian, di pekarangan pondoknya. “Kapan panennya, ya, nanti kalau aku sudah tua,” ujar perempuan berumur 64 tahun itu. “Tuanya sekarang ‘kan lebih tua nanti.”

Metode penanaman secara mandiri ternyata lebih efektif karena masyarakat turut merawat tanamannya. Ukurannya: bibit yang mati lebih sedikit. Warga juga lebih antusias.

Pada fase penanaman berikutnya, Juni 2018, Kelola Sendang kembali membantu pengadaan 17.000 bibit tanaman baru, terdiri atas 10.000 bibit durian, 4.000 bibit pulai, dan 3.000 bibit tembesu (*Fagraea fragrans*), juga pupuk NPK. Program rehabilitasi lahan terus berlanjut hingga 2019. Pada periode tanam Januari-Mei 2019, 25 hektar lahan lagi berhasil ditanami.

Sembari terus menanam, BKSDA dan Kelola Sendang melaku-



**Jadi, warga di sini diminta menanam 70 persen tanaman hutan dan 30 persen MPTS**



**MEIZANNUR**  
Warga Desa



SD Sungai Petai terdiri atas empat ruangan yang dibagi untuk PAUD dan kelas 1-6.

FOTO: Y. SUPRAYOGI

kan identifikasi calon masyarakat Sungai Petai yang akan dijadikan mitra BKSDA antara Desember 2018-Januari 2019. Mereka ini akan menjadi mitra BKSDA dalam mengelola area seluas 64 hektare. Hasilnya adalah terbentuk kelompok Maju Bersama. Anggotanya 32 warga Sungai Petai. Ketuanya Lakoni, sekretarisnya Sukatwan.

Salah satu kegiatan Maju Bersama sudah terlihat di punggung bukit di tepi kampung. Di sana menghampar kebun sayur seluas 2 hektare. Satu hektare sudah ditanami cabe merah. Jika tak ada halangan, tiga bulan lagi akan panen. Satu hektare sisanya sedang disiapkan untuk ditanami labu. Lahan ini diusahakan oleh 10 orang. Modalnya Rp 30 juta, bantuan dari Kelola Sendang. "Modal ini untuk diputar ke anggota lainnya, "Mudah-mudahan tiga bulan lagi panen," kata Lakoni.

Lakoni berharap kemitraan ini akan terus berlanjut hingga Blok Sungai Petai pada akhirnya akan dijadikan kampung dan kebun masyarakat. "Kesian yang tinggal di sini. Mereka hendak lari ke mana? Harapan kito, mungkin dibentuk seperti trans, karena kita nggak bisa lari lagi."

Toh, Lakoni bersyukur keadaan Sungai Petai sekarang sudah lebih baik dibanding sebelum 2016. "Kalau dulu, untuk berani, kami mengandalkan orang banyak. Memang waktu itu kami merdeka bisa tanam karet, sekarang tak bisa, tapi waktu itu perlu orang banyak," ujarnya. Terus terang hidup sekarang lebih tenang, lebih senang dari pada dulu."

## Coba Datang 5 Tahun Lagi

Hari sudah terang tanah di Blok Sungai Petai. Seperti pada malam hari, pagi di kampung ini sepi dari hewan fajar. Yang terdengar hanya suara genset Bude Idah. Tapi rupanya ada alasan lain mengapa di blok ini suka kehilangan satwa.

Dari depan pondok, sejauh mata memandang, yang terlihat menghampar hanya pohon singkong. Semak-semak tempat hari-mau mengintai mangsa tak terlihat sama sekali. Juga tak ada satu pun Sialang, pohon besar favorit beruang, karena di dahannya lebah menumpuk madu.

Nun di horizon, dua pohon terlihat seperti keluar dari pohon singkong. Konon itu pohon durian. Durian itu baru selesai menjatuhkan buah terakhirnya.

Kalau pohon petai? Nah, soal ini juga membuat penulis penasaran. Nama Sungai Petai berakar dari pohon petai. Tapi selama penulis di kampung ini tak terlihat pohonnya satu pun. Yang berdiri rapat di kebun warga adalah pohon karet berumur sekitar enam sampai sembilan tahun.

“Tapi coba ke sini lima tahun lagi,” kata Meizannur. Nanti, ia melanjutkan, dari hamparan pohon singkong itu akan muncul pohon hutan dan buah-buahan yang ditanam warga bersama Kelola Sendang dan BKSDA. Sekarang pohonnya masih kalah tinggi dari pohon singkong, karena umurnya baru dua tahunan. “Ada pohon petainya juga,” katanya.

## DI PULAI GADING, DAMAI ITU MUNGKIN

Sugiyono, warga Pulau Gading, Bayung Lencir, menunjuk bekas sawah milik warga Dusun 1 Pulau Gading yang kini menjadi kebun akasia PT BPP.

FOTO: KHAIRUL ANAM

Selain merenggut tanah, konflik lahan antara warga dan perusahaan pasti menelan korban. Yang paling ringan adalah menimbulkan luka fisik. Lebih berat sedikit membuat warga dipenjara. Paling parah: menggasak nyawa.

Begitulah potret yang selalu bisa didapat dari konflik lahan antara warga dan perusahaan pemegang konsesi--entah itu berupa izin perkebunan sawit, pertambangan, atau hutan tanaman industri.

Pada 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ada 410 konflik agraria dengan luas tanah mencapai 807 ribu hektare. Luas itu 21 kali kota Palembang di Sumatera Selatan. Pada 2017 deretan konflik lahan itu menggasak 13 nyawa. Ada 369 orang dipenjara. Sebanyak 224 orang digebuki, termasuk perempuan. Enam orang tertembak.

Dari sederet kasus konflik lahan tersebut, yang sudah berjalan bertahun-tahun, Desa Pulau Gading di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, adalah salah satunya. Konflik warga dengan perusahaan dimulai pada 2004, ketika PT Bumi Persada Permai, pemasok kayu akasia buat produksi bubur kertas sebuah grup perusahaan besar, membuka hutan tanamanindustri dan melahap kebun serta sawah warga yang sudah menggarapnya bertahun-tahun lamanya, jauh sebelum pemerintah memberikan hak konsesi buat BPP pada September 2004.

Seorang warga Pulau Gading sempat ditangkap pada 2007 gara-gara konflik itu. Dalam situasi begini, hanya ada dua opsi lanjutan. Perlawan warga semakin menjadi-jadi atau mengendur. Yang terjadi di Pulau Gading adalah pilihan kedua. “Kami ketakutan, lalu diam,” kata Kepala Desa Pulau Gading, Sugiyono, pada akhir Januari lalu.

Ketakutan dan sikap diam warga baru berakhir pada 2015 ketika Hutan Kita Institute (HaKI), lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan di Palembang, memasuki desa untuk menggali akar konflik. Warga semakin bersatu dan mulai menagih haknya kepada BPP setelah HaKI masuk dan berkolaborasi dengan program Kelola Sendang mulai 2016 dan kian intens sejak 2017.

Pulau Gading merupakan satu dari 22 desa yang menjadi fokus kerja HaKI dan Kelola Sendang. Di desa ini, yang wilayahnya dibelah oleh jalan hutan tanaman industri buat lalu lintas truk kayu, juga truk pengangkut batubara, HaKI dan Kelola Sendang berfokus dalam program resolusi konflik dengan strategi menempatkan diri jadi penengah kelahi warga dengan perusahaan.

## Konsesi yang Meledakkan Konflik

Truk berkelir jingga melintas di jalan hutan tanaman industri Desa Pulau Gading, akhir Januari lalu, di dekat permukiman Dusun 1. Sugiyono, Kepala Desa Pulau Gading, yang hari itu mengenakan busana training pendek berwarna hijau, menunjuk hamparan lahan yang baru saja dilewati truk tersebut. “Itu dulu sawah nenek moyang kami,” kata Sugiyono.

Telunjuk Sugiyono mengarah ke hamparan tanah yang sedang ditanami bayi-bayi akasia. Sisi lahan yang dekat dengan jalan penuh dengan debu. Musim kemarau belum berlalu. Debu tipis dan tebal beterbangan mengikuti arah hampasan angin. Sebagian besar menempel di puncak-puncak akasia yang masih kecil.

Sugiyono menetap di Pulau Gading sejak 1996. Surat pekerjaan membawanya ke sini, memenuhi perintah bosnya untuk mengelola perusahaan penggajian kayu di desa itu sejak 1992.

Sugiyono masih bujang dan belum lama lulus sekolah menengah kejuruan. Ketika perusahaan tutup, pria asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu memilih tinggal, menetap di desa dan menikahi perempuan lokal. Makanya, kendati bukan warga asli Pulau Gading, waktu 24 tahun sudah lebih dari cukup buat Sugiyono untuk merekam perjalanan sejarah Pulau Gading. Ini termasuk asal-usul desa, lahan, dan warganya, yang dulu merupakan orang-orang rakit Suku Anak Dalam. Istri Sugiyono merupakan warga kelompok itu yang sudah bermukim di daratan.

Perjalanan Pulau Gading, hingga menjadi sentra konflik lahan dengan BPP, dimulai pada 1938. Tersebutlah nama Dusun 1, alias Dusun Tuwo, kawasan pertama di Pulau Gading yang ditinggali manusia. Pada 1982 pemerintah daerah menetapkan daerah itu menjadi Desa Pulau Gading. “Kalau desa sudah didefinisikan, artinya dia sudah ada di area penggunaan lain,” kata Sugiyono. “Di luar kawasan hutan.”

Status diakui sebagai desa itu makin kuat ketika pemerintah daerah pada 2000 memulai pembinaan sosial buat Suku Anak Dalam di sekitar desa. Nama komunitas berganti menjadi Komunitas Adat Terpencil.

Mereka yang semula tinggal di pinggir sungai bergeser ke daratan. Dinas sosial setempat membantu menyediakan jatah hidup. Pemerintah menyediakan papan, paku, dan seng untuk membuat rumah bagi 86 kepala keluarga.

Selain diberi tempat tinggal, mereka dibekali lahan buat berkebun dan bertani. Juga diberi kandang lengkap dengan sapi-nya buat bekal hidup warga-warga baru itu di Dusun 1, cikal bakal Pulau Gading. Sementara Dusun 2 hingga 7 merupakan dusun pengembangan seiring makin banyaknya warga pendatang.

Kehidupan warga Dusun 1 tampak memiliki masa depan cerah. Warga yang dulu berburu hasil hutan dan sungai mulai beralih ke alam pertanian.

Sampai kemudian petaka itu datang pada September 2004. Melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.337/Menhut-II/2004, pemerintah memberikan konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 59.345 hektare – yang kemudian direvisi menjadi 60.433 hektare--kepada PT Bumi Persada Permai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sembilan puluh persen area Dusun 1 masuk dalam konsesi tersebut. BPP datang lalu bilang ke masyarakat bahwa lahan mereka masuk konsesi perusahaan. Perusahaan menyerobot sawah dan kebun warga yang sudah digarap puluhan tahun, jauh sebelum konsesi datang. “Ketika perusahaan mengambil alih, sawah itu sedang tidak tanam,” kata Sugiyono.

Konflik meledak. Warga protes dan berunjuk rasa. Mereka melawan perusahaan dan petugas keamanan. Warga desa juga mengadu ke sejumlah tempat: ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, parlemen daerah, pemerintah pusat, parlemen pusat.

Situasi tetap tak berubah. Warga terusir dari tanah garapan mereka. Ada 170 kepala keluarga di Dusun 1, pusat konflik lahan warga Pulau Gading dengan BPP. “Sekarang hanya 20 persen warga yang masih memiliki lahan usaha. Sisanya jadi buruh lepas,” kata Sugiyono.

Hanya lahan yang jadi tempat tinggal warga yang selamat dari terjangan perusahaan. “Kalau warga sendiri berurusan dengan perusahaan, itu nggak akan menang.”

## Setelah Sugiyono Bertemu HaKI

Saat konflik warga dengan BPP meledak, Sugiyono masih berstatus warga biasa. Dia sempat menjadi anggota Badan Musyawarah Desa, tapi kemudian berhenti.

Pada 2013, Sugiyono naik menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa. Dua tahun kemudian dia terpilih secara definitif. Tak lama setelah menjabat Kepala Desa, pada Mei 2016, Sugiyono pergi ke Palembang, bertandang ke kantor Hutan Kita Insitute (HaKI). “Sugiyono datang ke Palembang minta kami mendampingi konflik mereka,” ujar Adiosyafri, Direktur Riset dan Kampanye HaKI.

Pulai Gading sebetulnya sudah masuk radar HaKI sebelum Sugiyono bertandang ke Palembang. HaKI telah meneliti sejumlah tempat konflik lahan yang menghadapkan warga dengan perusahaan. Berdasarkan catatan HaKI, warga Desa Pulau Gading konsisten melawan perusahaan sepanjang 2004-2010. Selama itu pula warga konsisten kalah.

Warga baru bisa berharap setelah HaKI, bersama dengan program Kelola Sendang, menambah fokus pendampingannya ke Pulau Gading. Itu merupakan kemajuan baru mengingat warga sudah nyaris putus asa memperjuangkan tanahnya kembali. Meski demikian, bukan perkara mudah bagi HaKI untuk mengambil kepercayaan seluruh warga.



**Sekarang hanya  
20 persen warga  
yang masih memiliki  
lahan usaha. Sisanya  
jadi buruh lepas**



**SUGIYONO**

Penduduk Desa Pulau Gading

Kepala Desa adalah orang pertama yang berkomunikasi dengan HaKI. Kedua belah pihak menemukan frekuensi yang sama. Cerita menjadi berbeda ketika harus meyakinkan sebagian besar warga. “Setelah kepala desa dan tokoh masyarakat, barulah sosialisasi dengan anggota masyarakat yang lain,” kata Rian Saputra, staf HaKI di Pulau Gading.

Rian bisa setiap bulan datang ke Pulau Gading. Sekali masuk ke desa-hutan itu, Rian minimal lima hari menginap di desa. Rumah Kepala Desa, yang saat itu masih berbentuk panggung kayu, jadi *jujukan*-nya. “Kalau sore ikut main voli dengan warga. Malamnya gaple,” kata Rian. “Kalau nggak begitu, nggak dikenal orang,” katanya.

Dalam proses mediasi konflik, Rian mengumpulkan orang-orang desa. Dia menghidupkan diskusi, membenteng plano untuk menggali informasi dan mendalaminya. Guna mendalami informasi itu, Rian menemui orang-orang potensial seperti mantan kepala desa, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat seperti Arbani dan Rusmin.

Konflik berkepanjangan membuat sebagian besar warga lelah dan jengah. Mereka nyaris tak percaya lagi dengan bantuan dari pihak luar. “Mereka tidak begitu serta-merta menerima kami,” kata Rian. Untungnya, HaKI dan Kepala Desa serta sejumlah tokoh masyarakat sudah sepaham.

Rian mengingat butuh satu tahun bagi HaKI untuk mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat dan bangunan metode mediasi yang pas. Sebab, HaKI harus menggali dari awal keterangan soal asal muasal desa, dokumen-dokumen pendukung klaim warga, hingga pemetaan partisipatif sebagai penegas keterangan warga. “Pengumpulan dokumen ini semakin membuat masyarakat yakin dengan kerja kami,” kata Rian.

Pengumpulan dokumen itu menjadi bagian HaKI untuk memastikan obyek dan subyek konflik. HaKI merunut sejarahdesa, pengelolaan lahan perusahaan dan warga, sampai tuntas. “Kalau

Truk batubara hilir mudik mengangkut batubara ke stockpile di dekat Dusun 1 Pulau Gading.

FOTO: KHAIRUL ANAM

nggak tuntas, nanti kita jatuhnya klaim-klaim saja,” kata Adiosyafri. “Argumen itu tidak akan kuat ketika sejarah tidak muncul.”

Kelengkapan dokumen dan runutan sejarah yang tepat berguna untuk mematahkan pertahanan terakhir perusahaan. Masyarakat juga harus bersatu untuk mempertahankan atau merebut lahan awal mereka. “Kalau nggak kuat, posisinya lemah di hukum formal,” kata Adiosyafri. “Konsesi itu ‘kan diberikan oleh negara. Perusahaan hanya menerima.”

Tugas memperkuat masyarakat itu juga yang membuat kerja HaKI tidak hanya soal mediasi. Sebelum menengahi warga dengan perusahaan, HaKI juga berusaha membuat perjuangan mereka yang selama ini masih sia-sia tidak terlihat percuma. “Untuk mengembalikan kepercayaan ini, masyarakat harus didampingi agar lebih rasional dan kapasitasnya naik,” kata Adiosyafri.

Setelah berhasil meyakinkan warga, mengumpulkan dokumen dan informasi, lalu membingkainya dalam satu cerita dan strategi, tibalah giliran bagi HaKI untuk menemui PT Bumi Persada Permai, perusahaan yang diberi hak mengelola 60.433 hektare lahan untuk perkebunan tanaman industri, di tanah yang sudah ada penghuni dan penggarapnya. Sikap pertama perusahaan sudah bisa ditebak. “Awalnya mereka *defence*,” kata Adiosyafri.

Seperti kebanyakan perusahaan lain, mereka merasa telah mendapatkan satu izin yang memungkinkan mereka berusaha di atas lahan tersebut oleh negara. Masalahnya adalah pemberian izin itu tidak pernah ideal.

Maksudnya, ketika negara memberikan izin, negara mestinya memastikan di lahan tersebut tidak ada manusia atau sekelompok manusia yang menggarap tanah. Ketika perusahaan mendapati ada masyarakat di situ, yang terjadi adalah negara membiarkan warga dan perusahaan bertempur sendiri. “Padahal itu idealnya urusan negara,” kata Adiosyafri. “Orang menunjuk kawasan konsesi ‘kan dari atas meja.”

Ditekan warga yang sudah bersatu, dan HaKI yang mendampingi, perusahaan mulai berhitung. Pada April 2016 warga dan HaKI menemui perusahaan menuntut sejumlah hal. Kedua belah pihak bersepakat merampungkan konflik secara damai. Baru kesepakatan merampungkan, belum rampung benar. “Masing-masing pihak sama-sama menahan diri,” kata Sugiyono.

Komitmen itu terjadi di Hotel Santika, Palembang. Sugiyono datang bersama sejumlah tokoh masyarakat desa. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat menjadi saksi komitmen tersebut.

Ada kesepakatan kunci yang sudah diraih pada saat itu. Perusahaan akan memberikan 30 ekor sapi dalam tiga tahun sebagai kompensasi hilangnya lahan peternakan warga. Tiga puluh ekor sapi itu akan dibagikan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Pulai Gading. Kelompok ini terdiri atas empat kelompok tani yang ada di Pulai Gading, yaitu Kelompok Tani Gading Makmur Bersama, Kelompok Tani Dusun II, Kelompok Tani Dusun III, dan Kelompok Tani Maju Bersama. Pada 2018 perusahaan menyerahkan 10 ekor sapi. “Sampai sekarang belum ada lagi,” kata Sugiyono.

Kesepakatan pokok lain adalah perusahaan bersedia melepaskan sebagian lahannya kepada warga dalam bentuk kemitraan perhutanan sosial. Pada April 2019 dicapai kesepakatan soal pelepasan lahan perusahaan.



***Konsesi itu ‘kan  
diberikan oleh negara.  
Perusahaan hanya  
menerima***



**ADIOSYAFRI**

Direktur Riset dan Kampanye HaKI.



Jalan hutan tanaman industri ini sekaligus menjadi akses utama untuk angkutan batubara dan warga Pulau Gading.

FOTO: KHAIRUL ANAM

Kesepakatan baru dituangkan dalam nota kesepahaman pada 19 September 2019. Kesepakatan itu mengatur perusahaan bersedia melepaskan 1.213 hektare lahan yang masuk dalam konsesi mereka kepada warga dengan skema kemitraan perhutanan sosial.

Begini perinciannya. Untuk keperluan pengelolaan *agroforestry* berupa kebun dan pemukiman seluas 1.070 hektare. Lalu untuk *agrosilvofishery* seluas 98 hektare dan kemitraan tanaman pokok seluas 45 hektare. “Warga sebetulnya meminta lahan mereka yang diambil dulu dikembalikan. Tapi itu sepertinya tidak mungkin,” kata Sugiyono. Kesepakatan dalam nota kesepahaman itu rupanya menggugurkan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, termasuk kompensasi 30 ekor sapi ke gapoktan.

Mardohar P. Aritonang, Direktur BPP, yang hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman, mengatakan nota itu selanjutnya akan diusulkan menjadi Naskah Kesepakatan Kerja Sama sebagai bahan pokok bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), paling lambat pada September 2020 atau setahun setelah nota diteken. Menurut Mardohar, masyarakat dan perusahaan sudah menyepakati isi kesepakatan.

Kendati sudah setuju, Kepala Desa Pulau Gading Sugiyono melihat ada yang ganjil dalam kesepakatan itu. Sugiyono curiga 1.213 hektare lahan konsesi perusahaan yang akan dilepaskan ke warga itu berada di Dusun 2 dan 3, yang selama ini sudah dikelola warga, dan belum digusur perusahaan. Padahal pusat konflik dan lahan yang telah digusur perusahaan berada di Dusun 1. “Lalu Dusun 1 ini dapat apa?” Bila dugaan Sugiyono benar, mereka berjanji akan tetap berjuang, mengejar lahannya yang telah hilang. Rian berharap Pulau Gading berakhir seperti Desa Riding di Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Di desa yang juga didampingi HaKI itu PT Bumi Mekar Hijau, perusahaan pemegang

konsesi hutan tanaman industri, sepakat melepas 10 ribu hektare lahan yang masuk dalam konsesinya menjadi perhutanan sosial yang dikelola warga. Perdamaian dan kesepakatan pada 2017 itu mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Perhutanan sosial, menurut Rian, merupakan jalan keluar yang paling mulus dalam merampungkan konflik warga dan perusahaan. Rian ingat, sebelum ada perhutanan sosial dan tanah obyek agraria, upaya warga mengejar lahannya yang hilang hanya lewat pendudukan tanah kembali, aksi-aksi ke instansi, dan, tentu saja, berhadapan dengan preman dan aparat. "Sekarang lebih banyak mikirnya," kata Rian. "Dengan aturan-aturan ini, kita masih punya hak. Kasarnya, kami hanya *ngomporin* masyarakat buat tetap berjuang."

# TERPAL SAKTI DAN PARA JAGAWANA

Warga Suku Anak Dalam yang tinggal di Muara Medak, Bayung Lencir, sedang menengok jebakan ikan di sungai/kanal di sekitar hutan sosial Muara Medak.

FOTO: KHAIRUL ANAM

**B**ila titik-titik api kebakaran hutan diibaratkan sebagai jerawat, maka Muara Medak adalah wajah. Jerawat bisa muncul di punggung, bahu, leher, bahkan bokong. Tapi wajah adalah tempat favorit bercokol dan berkumpulnya gangguan kulit itu.

Semacam itulah yang terjadi dalam kebakaran hutan hebat di Sumatera Selatan pada 2015. Api muncul di mana-mana. Titik apinya berpusat di Muara Medak. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Lalan-Mendis, organisasi pengelola

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lalan Sembilang di Musi Banyuasin, mencatat, dari lima juta titik api kebakaran pada tahun itu, 60 persen atau tiga juta titik berada di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu Sumatera Selatan merupakan salah satu penyumbang kebakaran hutan di Indonesia, bersaing dengan hutan-hutan yang ludes di Kalimantan.

Kebakaran di Sumatera Selatan, khususnya di Muara Medak, makin parah karena kawasan itu merupakan kubah Kesatuan Hidrologi Gambut Merang-Kepayang. Api yang membakar, merasuk sampai ke dalam. Butuh waktu lama untuk padam. "Jika sudah terbakar begitu dalam, hanya hujan yang bisa memadamkannya," kata Edi Susanto, 34 tahun, Ketua RT 1 Dusun VII, Desa Muara Medak.

Edi termasuk salah satu warga yang kehilangan lahan dalam kebakaran hebat pada 2015. Sampai saat itu warga tidak tahu ba-

gaimana cara mengelola kawasan dan memadamkan api. Hal ini berlangsung hingga program Kelola Sendang hadir di desa-hutan itu, khususnya di Dusun VII, pada 2017. Muara Medak merupakan satu dari 22 desa yang menjadi fokus kerja konsorsium kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku ini. “Kami mengambil lokasi di Dusun VII karena tidak ada yang ngurusi di sini,” kata Agus Irwanto Wibowo, konsultan Zoological Society of London (ZSL) Indonesia, pelaksana Kelola Sendang.

Setelah memetakan permasalahan lokal di desa itu, menyelenggarakan pelatihan, dan mengajak warga desa terlibat aktif memikirkan solusi dan tindakan, ketemulah cara terbaik yang kini sedang dilakukan warga desa untuk menjauhkan kawasannya dari kebakaran hutan. Langkah itu adalah pengelolaan air di kawasan gambut dan penanaman kembali di kawasan perhutanan sosial.

Warga desa, lewat Regu Pengeloa Air (Repair) rutin menjaga kanal-kanal hutan gambut tetap basah oleh air. Sementara melalui Gabungan Kelompok Petani Hutan Berkah TaniHijau, mereka menghijaukan lagi lahan tidur di lokasi langganan kebakaran.

Kini lahan tersebut telah berganti status menjadi perhutanan sosial. Area itu pada akhir Januari 2020 masih hitam penuh jelaga, mengabadikan sisa-sisa kebakaran 2011, 2015, dan 2019.

Tak jauh dari pusat kebakaran pada 2011, 2015, dan 2019 itu terletak rumah Edi di Dusun VII. Edi tiba di Muara Medak pada Maret 2010, dibawa oleh janji kehidupan yang lebih baik. Bapak dua anak ini satu dari sekian banyak putra Jawa yang lahir di Sumatera, tepatnya Lampung. Dia sempat merantau ke Sumatera Barat dan menikah di bumi Minang.

Dari Sumatera Barat, dengan bekal Rp 16 juta, dia tiba di Muara Medak, membeli sebidang tanah seluas 20 x 50 meter lengkap dengan rumah berdinding papan kayu. “Bayangan saya ketika mau ke sini akan buka kebun sawit,” katanya.

Edi sebetulnya jengah. Setibanya di Muara Medak, ternyata, tanah garapan yang dijanjikan masuk dalam kawasan hutan. “Ke-

tika saya masuk, PLN sudah ada. Jalan sudah dibatu. Saya pikir ini sudah legal.” Merasa kepalang basah, Edi nyebur sekalian. Dia membuka hutan seluas empat hektare, lalu menanaminya dengan sawit. “Tapi ikut terbakar pada 2015. Habis semua.

“Saat itu warga kocar-kacir disergap api. Tanpa pengetahuan dan pemahaman menghadapi api, mereka berusaha memadamkannya secara sporadis. Selesai mematikan api di lahan warga yang satu, beralih ke lahan warga yang lain yang masih membara.

Pemadaman api dan pengelolaan kawasan di Dusun VII makin rumit karena kurangnya kesadaran warga. Kepala Desa Muara Medak, Marudut Panjaitan, paham betul situasinya. “Karena banyak lahan di Dusun VII dikuasai oleh orang luar,” katanya.

Luas desa ini mencapai 64.500 hektare. Itu adalah luas yang sudah dilegalkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Warganya, sebanyak 14.753 jiwa, tersebar di 10 dusun.

Nobon bin Harun, warga Dusun VII lainnya, mengakui banyak orang luar desa yang menguasai lahan tidur di Muara Medak. Tidak hanya luar desa, bahkan sampai luar pulau. Pria 35 tahun yang datang di Muara Medak pada 2008 ini kemudian menyebut nama-nama para penguasa dari luar itu. Ada Hedi Manto, Ujang A, Manurung, dan lain-lain.

Menurut Nobon, nama-nama itu sebetulnya menguasai lahan yang masuk kawasan hutan. Mereka membelinya dari para



***Merasa kepalang basah, Edi nyebur sekalian. Dia membuka hutan seluas empat hektare, lalu menanaminya dengan sawit***



**EDI**  
Warga Dusun 7



Anggota Kelompok Repair sedang memasang sekat terpal di kanal-kanal perhutanan sosial Muara Medak, sebagai tameng untuk melawan kebakaran.

FOTO: KHAIRUL ANAM

pembalok liar pada masa-masa jauh ke belakang. “Maka, ketika lahan milik warga luar itu terbakar, warga sini malas juga ikut memadamkannya,” katanya. “Masak kita mati-matian menyelamatkan lahan orang itu, padahal mereka sendiri tidak peduli? Akhirnya jengkel sendiri kami.”

Nobon datang dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 400 kilometer sebelah tenggara Muara Medak. Pemuda ini menikahi perempuan Suku Anak Dalam yang sudah tinggal di daerah permukiman di Muara Medak. Berkat itu, Nobon dan istrinya mendapat jatah 10 hektare lahan. Ada bagian lahan buat warga asli dari kelompok tani.

Saat kebakaran hutan pada 2015 lahan Nobon selamat karena dia belum menanaminya. Baru pada kebakaran 2019 Nobon merasakan pedihnya tanaman tumpuan hidup dilahap api. Enam hektare lahan yang ia tanami karet dan empat hektare lahan lagi untuk sawit sejak 2016 habis terpenggang. “Belum tanam lagi sampai sekarang. Habis modalnya. Ha-ha-ha,” Nobon tertawa, seakan-akan tidak ada cara yang lebih baik dalam meratapi nasib selain menertawakannya sendiri.

Rentetan pengalaman kebakaran yang melalap kebun sendiri itu membuat warga Muara Medak makin sadar ada yang salah dengan pengelolaan lahan mereka selama ini.

## Menjaga Air, Menolak Api

Agus Irwanto Wibowo, pendamping warga Dusun VII dari ZSL Indonesia, sudah sulit mengingat berapa kali Kelola Sendang menggelar pelatihan buat warga desa. Ada pelatihan teknik restorasi dan penanaman untuk lahan kritis dan pelatih-

an-pelatihan lain. Tapi ada satu tonggak pelatihan yang mengubah program dan pemberdayaan Kelola Sendang di Muara Medak.

Pelatihan itu berlangsung pada awal 2019. ZSL Indonesia, sebagai penyelenggara, mendatangkan Aswandi Idris, dosen ahli tata air dari Universitas Jambi. Aswandi memaparkan solusi menangani kebakaran di lahan gambut: bukan dengan menjinakkan api, melainkan menjaga lahan gambut tetap basah.

Hal itu, menurut Aswandi, bisa dilakukan dengan menjaga kanal-kanal yang mengitari lahan gambut tetap berair. Kerap, ketika musim kemarau, kanal-kanal itu mengering. Airnya lari jauh ke Sungai Merang dan Sungai Kepayang. Bila sudah begitu, lahan gambut di sekitarnya kerontang dan rawan terbakar. “Dulu, ketika kebakaran terjadi, kami sulit mencari sumber air buat pemadaman,” kata Edi. “Tidak ada penahan air.”

Aswandi mengenalkan teknik menjaga kanal dengan cara membuat sekat yang terbuat dari terpal. Sekat-sekat terpal itu dipasang melintang di dalam kanal agar air tidak mengalir ke bawah dan tetap tertahan menggenangi lahan gambut di sekitarnya.

Menurut perhitungan Aswandi dan warga desa, kanal yang penuh dengan air mampu membasahi lahan gambut di sebelahnya hingga radius 200 meter. Air kanal itu juga berfungsi sebagai sumber air pemadam bila terjadi kebakaran.

Setelah cara ditemukan, pekerjaan berikutnya adalah menentukan pelaksana ide itu. Pada 5-6 Agustus, diinisiasi oleh Kelola Sendang, warga Dusun VII membentuk Regu Penyelamat Air (Repair). Kelompok ini berdiri berkat kolaborasi ZSL Indonesia, kelompok tani, dan KPH Lalan-Mendis. “Sama seperti kelompok masyarakat peduli api (KMPA). Bedanya, kami mencegah jangan sampai terbakar,” kata Edi.

Setelah resmi berdiri, warga bergotong royong menyekat kanal-kanal. Sejak memulai penyekatan pada 8 Agustus 2019, ke-

lompok itu sudah berhasil membangun sembilan sekat.

Selagi memasang sekat-sekat itulah, pada 13 Agustus 2019, api muncul dari lahan konsesi PT Hutan Buana Lestari, yang bersebalahan dengan lahan gabungan kelompok tani Muara Medak. Repair, yang baru merangkak, mendadak harus berhadapan dengan amukan api, yang terus membesar.

Sejumlah sekat terpal terbakar. Kayu pemancang sekat yang berada di tiap sisi kanal ikut terpanggang, membuat terpal kehilangan pengaitnya. “Lahan sendiri sudah dijagain, eh, malah api datang dari lahan perusahaan,” kata Nobon.

Api, yang berasal dari PT Hutan Buana Lestari, menjalar ke lahan warga – yang sudah jadi perhutanan sosial – saat orang-orang desa terlelap, pukul 02.00 pagi. Dengan bekal seadanya, mesin pompa dan selang, 10 orang dari Dusun VII menghalau api. Mereka menyedot sisa-sisa air dari kanal dekat bangunan kayu yang berfungsi sebagai lokasi percontohan atau demonstrasi plot (demplot), tempat warga menyimpan bibit tanaman.

Keganasan api mengalahkan daya juang warga. Serai dan lada di lahan seluas dua hektare, yang rencananya akan dipanen dalam tiga bulan ke depan, “dipanen” duluan oleh api. Hanya demplot dengan menara kayu yang sudah miring itu yang tersisa. Pada akhir Januari 2020, menara kayu itu masih terhuyung menahan beban dirinya sendiri setelah satu kakinya hangus terbakar.

Tetapi kebakaran tersebut membuktikan keyakinan warga. Sisa-sisa air di kanal yang sempit disekat itu mencegah gambut terbakar makin dalam. Di lahan warga api lebih cepat padam. “Saya yakin kalau penyekatannya jauh sebelum Agustus, radius gambut yang basah akan lebih luas dan kebakaran tidak meluas,” kata Edi.

Muara Medak memang belum bisa mencegah kebakaran. Tapi, paling tidak, warganya sudah sadar betapa pentingnya, dan ca-

ranya, menjaga lahan gambut tetap basah. “Gambut dan air itu ternyata tak bisa dipisahkan,” kata Edi yang mengetuai Repair.

Kini, bila telah masuk kemarau, warga sudah bersiap menyekat kanal. Baru ketika musim hujan kanal itu dibuka lagi. Jika tidak, justru lahan gambut yang kebanjiran, dan jalur lalu lintas warga ke hutan yang tertahan.

## Dari Lahan Ilegal ke Perhutanan Sosial

Saat api melahap dua hektar serai dan lada milik warga pada kebakaran Agustus 2019, tanah itu sebetulnya telah resmi menjadi perhutanan sosial. ZSL Indonesia, kelompok tani di Muara Medak, dan KPH Wilayah II Lalan-Mendis mengusulkan perhutanan sosial itu sejak Maret 2017. “Saya pikir surat keputusan perhutanan sosialnya nggak akan turun,” kata Agus. Ketika masuk di Dusun VII, Kelola Sendang sudah mengumumkan rencana mengajukan lahan di sana sebagai perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu adalah satu cara untuk menumbuhkan kepedulian warga terhadap lahan gambut. Dengan status ini, lahan hutan gambut yang sudah digarap warga menjadi legal. Cara ini membuat petani penggarap hutan sekaligus berperan sebagai jagawana, penjaganya.

Tak dinyana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui permohonan warga yang dibantu ZSL Indonesia dan KPH Lalan-Mendis tersebut. “Ketika turun, kami malah bingung mau diapakan ini awalnya,” Edi tertawa mengenang kepolosan mereka.

Pemukiman warga Suku Anak Dalam di kawasan Perhutanan Sosial Muara Medak.

FOTO: KHAIRUL ANAM

Wakil Ketua Gabungan Kelompok Tani Berkah Hijau Lestari itu mengaku tak tahu-menahu soal prosedur pengajuan perhutanan sosial. Tanpa bantuan ZSL Indonesia dan KPH, dia yakin SK itu tidak akan turun. “Kami mana tahu yang begituan.”

Keputusan status perhutanan sosial turun pada 25 November 2018. Ketika itu Presiden Joko Widodo menyerahkan total SK 56 ribu hektare perhutanan sosial buat warga di 10 kabupaten. Salah satunya untuk Muara Medak, satu-satunya perhutanan sosial di kawasan gambut. Bermodal SK tersebut, Gapoktan Berkah Hijau Lestari, yang menaungi 876 petani dari 14 kelompok di Muara Medak, berhak mengelola 3.500 hektare hutan selama 35 tahun.

Wilayah seluas itu tak hanya berada di Dusun VII, tapi juga Dusun V Desa Muara Medak. Berdasarkan SK yang diterbitkan, pemerintah membagi perhutanan sosial untuk Berkah Hijau Lestari menjadi empat zona. Zona pertama merupakan kawasan konservasi dan perikanan tangkap seluas 400 hektare. Zona perikanan tangkap ini, berupa sungai bekas kanal-kanal, juga diperuntukkan buat kehidupan 16 kepala keluarga Suku Anak Dalam Batin Sembilan.

Pada akhir Januari lalu seorang anggota kelompok itu baru pulang dari hulu menuju pemukiman mereka yang berupa pangkung kayu. Menggunakan kolor merah dan bertelanjang dada, pria itu berjalan di sisi sungai dengan turus panjang di tangan. Seekor anjing piaraan membuntutinya. Seorang perempuan Batin Sembilan dengan anaknya yang masih balita baru pulang menjenguk jebakan ikan di tepi sungai.

Menunggang sampan, perempuan itu mendayung dengan tenang sambil menghindari empasan riak kecil dari sampan kami yang menyeret tongkang kayu. PT Pertamina (Persero) membantu enam belas keluarga tersebut mendirikan rumah permanen di tepi sungai. Rumah itu dicat berwarna-warni. Deretan rumah panggung itu dilengkapi kakus, taman bermain, dan fasilitas dasar lainnya.

Zona kedua perhutanan sosial Berkah Hijau Lestari adalah area wanatani terbatas. Luasnya 14 ribu hektare. Kawasan ketiga adalah area hasil hutan bukan kayu dan sumber benih seluas 1.200 hektare. Area ini akan menjadi kebun komunal.

Pada akhir Januari 2020, Edi dan Nobon datang menengok kebun komunal mereka yang baru itu. Belum turun dari sampan yang menarik tongkang kayu, Nobon sudah mengeluh duluan. “Yah, mati semua ini, Mas Edi, pinang dan jelutung kita,” katanya. Nobon mendapati flora yang baru mereka tanam tergenang air sampai separuh.

Hujan turun tanpa jeda sejak beberapa hari, menggenangi area tersebut. Sisa-sisa akar pohon yang masih berjelaga tumpang tindih di tanah, berebut ruang dengan jelutung dan pinang yang baru ditanam.

Ketika Edi dan Nobon datang, tujuh orang dari kelompok Batin Sembilan sedang bersiap menanam bibit pinang dan jelutung. Tanaman itu disimpan di salah satu gudang yang berada di demplot. Sudah empat hari Cik Ida, 47 tahun, salah satu rombongan dari kelompok Batin Sembilan, ikut menanam pinang dan jelutung di area itu. Biasanya mereka datang bersepuluh ke kebun. Setiap hari, dengan tujuh hingga sepuluh tenaga, mereka sanggup menanam pinang dan jelutung di tanah seluas dua hektare. Mereka mendapat upah Rp 100 ribu per orang per hari sebagai buruh tanam di perhutanan sosial. “Kami sebelumnya tidak mengerti cara menanamnya,” kata Cik Ida. “Pak Edi yang mengajari kami.”

Sepanjang hayat Cik Ida, baru kali itu dia dan kelompoknya

***Kami sebelumnya tidak mengerti cara menanamnya***

**CIK IDA**  
Kelompok Batin Sembilan



Warga menyiapkan bibit tanaman. Tampak bibit berjejer rapi di bawah pondok.

FOTO: KHAIRUL ANAM

menanam. Keahlian hidup kelompok Batin Sembilan adalah berburu. Ketika hutan masih lebat, mereka berburu kijang, rusa, dan hewan lainnya. Setelah hutan gundul dan menyisakan kanal-kanal yang belakangan menjadi sungai, buruan mereka tinggal ikan. “Kami bingung mau nyari makan apa.” Cik Ida menggaruk lengannya yang di beberapa bagian telah meninggalkan luka.

Sambil mengamati Cik Aya, 43 tahun, adiknya yang ikut menanam pada hari itu, Cik Ida menunjuk sebuah kebun yang masih tampak hijau di kejauhan. Itu adalah area konsesi PT Rimba Hutani Mas, bagian dari Sinar Mas Grup. Lalu dia menunjuk sisi berlawanan, area PT Hutan Buana Lestari. “Kalau sudah punya perusahaan, kami nggak berani masuk ke sana,” katanya.

Makanya ketika sejumlah pihak seperti Pertamina, ZSL Indonesia, Kelola Sendang, dan pemerintah Dusun VII Muara Medak mengajak mereka tinggal menetap di tepi sungai, mereka langsung mau. Menyempitnya hutan dan menipisnya buruan memaksa mereka harus menerima tawaran itu. “Seumur-umur kami di hutan terus. Tidak pernah dibimbing orang,” kata Cik Ida.

Berkat bantuan Edi dan warga Muara Medak, mereka kini sudah memiliki kartu tanda penduduk Muara Medak. Dari hasil buruh tanam itu, kelompok Batin Sembilan bisa mendapat penghasilan lain.

Edi dan Nobon sebagai pengurus Berkah Hijau Lestari memang mengusulkan kepada ZSL Indonesia dan Kelola Sendang agar kelompok Batin Sembilan ikut diberdayakan. Caranya adalah dengan menjadikan mereka buruh tanam di perhutanan sosial.

Hal itu juga sebagai solusi karena belum semua warga atau kelompok Berkah Hijau Lestari ikut menanam. Hingga akhir Januari lalu, baru 10 hektare lahan yang sudah ditanami. ZSL Indonesia dan Kelola Sendang setuju menganggarkan untuk buruh tani dari Batin Sembilan.

Edi dan Nobon sudah punya bayangan untuk memanfaatkan perhutanan sosial itu. Mereka akan menanamnya dengan pala-

wija, berselang-seling dengan pinang dan jelutung.

Andri Saputra, Staf Perencanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah KPH Lalan Mendis, yang menjadi rekan kerja sehari-hari Gapoktan Berkah Hijau Lestari, juga sudah merancang agar rencana Edi dan Nobon sukses. Pada akhir Januari 2020, Andri menenteng rancangan proposal yang sudah diteken oleh kepala dusun, kepala desa, dan Gapoktan, untuk pengajuan bantuan bibit kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ada 140 ribu bibit yang kami ajukan,” katanya.

Andri menyebut beberapa jenis bibit: jelutung, nangka, pinang, matoa, dan durian. “Yang jelas, perhutanan sosial tidak boleh ditanami sawit. Dilarang keras!”

Zona terakhir dalam perhutanan sosial Berkah Hijau Lestari adalah kawasan silvopastura seluas 500 hektare. Area ini merupakan campuran wanatani dan peternakan.

Agus Irwanto Wibowo terlihat puas melihat kolaborasi Gapoktan Berkah Hijau Lestari dan KPH Lalan-Mendis. Dia mengingat butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan warga lokal yang menjadi motor pelaksana perhutanan sosial dan pengelolaan kawasan gambut di Muara Medak. “Edi dan Nobon adalah bagian dari seleksi alam,” ujarnya.

Ada ratusan orang yang awalnya terlibat atau bersentuhan dengan Kelola Sendang di Muara Medak. Pernah dalam sekali sosialisasi, 600 orang yang hadir. Tapi tidak banyak yang kemudian meneruskannya menjadi kerja nyata berkolaborasi dengan Kelola Sendang. Bagi Agus, bagian mengajak warga terlibat itu tidaklah susah, “tapi susah sekali.” Susahnya adalah menyamakan frekuensi.

Agus punya patokan gampang menentukan warga mana yang bisa menjadi titik acu warga lain dalam program-program Kelola Sendang. Selain menangkap ide, orang itu juga bisa memobilisasi orang lain.

Kemampuan tersebut biasanya melekat pada orang-orang

yang punya jabatan politik. Kalau bukan kepala desa, ya, kepala dusun, atau kepala rukun tetangga. Agus menemukannya di Kepala RT 1 Dusun VII Muara Medak, Edi Santoso. “Pemberdayaan itu mengajak. Artinya si champion sudah ada di depan. Mereka hanya butuh contoh,” katanya.

Di tengah upaya mencari pelaksana lokal itulah Agus juga menemukan konflik sosial, antara pihak-pihak yang punya otoritas di desa. Di titik inilah Agus mempertemukan ide-ide semua orang agar program tetap berjalan. “Di awal, seperti ini tidak terpikirkan. Tapi ini terjadi,” katanya.

Agus lalu mengingat, pada Maret 2020, Kelola Sendang sudah harus hengkang dari desa-desa. Agus punya prinsip, sampai muncul pemimpin lokal yang bisa melanjutkan program yang telah dirintis bersama dengan warga desa, saat itulah waktu yang tepat bagi konsorsium pergi dari desa, dengan kepala tegak. Agus melihat material pemimpin lokal itu ada pada Edi dan Nobon.

## TUJUH 'SETAN' DESA DENGAN KOPERASINYA

Piring ramah lingkungan dari pelepah kering pohon pinang buatan warga Mendis.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

**D**aelami dengan sabar berdiri menunggu Tanbet yang sedang menghitung uang dan menakar timbangan. Dia memandangi satu per satu sesama petani karet yang sudah dipanggil Tanbet untuk menerima uang.

Hari itu hujan turun tipis di Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi pada Selasa di akhir Januari 2020 itu tiba saat untuk menimbang karet—di samping Selasa, hari untuk melakukan hal yang sama adalah Kamis. Karenanya ratusan petani karet berbondong-bondong menyambungnya. Mereka mendatangi gudang getah karet milik Mendis Maju Bersama, koperasi unit usaha penjualan bahan olahan karet milik warga Desa Mendis.

Getah karet hasil sadapan dari pohon dan sudah diwadahi dalam ember persegi panjang memadati area timbang, sebuah gubuk kayu di depan gudang yang terletak di perbatasan Desa Mendis dengan Desa Bayung Lencir. Aroma getah karet yang menusuk hidung menguar ke langit desa. Bagi petani karet, itu adalah bau uang yang segera datang.

Giliran Daelami tampaknya sudah dekat ketika sebagian besar petani telah menerima duit dari Tanbet, si juru timbang. Pria berusia 50 tahun ini paling buncit mendapatkan uangnya karena karet yang dia setorkan lumayan banyak, hasil sadapannya selama dua minggu terakhir.

Tanbet, nama aslinya Kahamdah, menaruh lembaran-lembar-

an duit pecahan seratus ribu rupiah untuk Daelami di samping dengkulnya. Dia lalu melanjutkan pekerjaannya. Daelami langsung menyambar duit itu dan menghitungnya. Ada kebahagiaan di wajahnya: dengan harga getah kering dan bersih Rp 8.300 per kilogram, hari itu dia membawa pulang Rp 1.250.000.

Harga bagus dan produksi getah yang makin bersih telah membuat warga Mendis melupakan zaman kegelapan, ketika mereka terpaksa menjual getah di harga Rp 4.000-5.000 per kilogram dan terjerat ketergantungan pada tauke serta tengkulak lokal. Padahal era itu baru lewat tiga tahun. Keadaan yang dirasakan belakangan ini terwujud berkat pendampingan intensif dari Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Netherland Development Organisation, salah satu mitra konsorsium Kelola Sendang.

Sebelum SNV datang membawa pengetahuan, pemahaman, dan semangat, warga Mendis nyaris putus asa dengan komoditas yang mereka andalkan itu. Di desa transmigran ini ada 1.162 kepala keluarga. Di antara mereka, 70 persennya atau 799 keluarga merupakan petani. Mayoritas adalah petanikaret; sedikit saja yang bertani sawit. Mereka mendiami dan berusaha di tanah seluas 307,71 kilometer persegi atau 30.700 hektare – hampir separuh luas Jakarta. Tidak ada gedung bertingkat di desa ini. Hanya hutan, ladang, dan jalan lurus dengan banyak persimpangan khas kawasan para transmigran.

Saking putus asanya warga terhadap kondisi usaha mereka kala itu, ketika SNV bersama konsorsium Kelola Sendang datang pada 2017, petani sudah mengancam lebih dulu. Teguh Triono, Penasihat Teknis Proyek Kelola Sendang, masih mengingat ancaman para petani. “‘Kalau sampai sepeser pun duit dari londo itu tidak turun buat program petani karet, lebih baik pergi saja,’” kata Teguh, menirukan perkataan para petani di balai desa. Penulis menjumpai Teguh saat berkumpul lagi dengan para petani di Mendis pada akhir Januari 2020.

Salah satu petani yang mengancam Teguh adalah Suprianto.

Ditemui di rumahnya yang berdinding papan kayu, pria berusia 36 tahun ini memperlihatkan raut muka geli sekaligus miris ketika harus mengingat kejadian tiga tahun lalu. “Kami waktu itu sudah ingin menebang karet dan menggantinya dengan sawit,” kata Ketua Koperasi Mendis Maju Bersama ini. “Harga sawit lebih stabil.” Para petani memiliki semangat untuk mengubah nasib. Ketika program pemberdayaan SNV dan Kelola Sendang dijalankan di Mendis, upaya itu klop dengan gairah petani yang ingin maju.

## Mendis, Karet, dan Pendetang

Mendis adalah desa para pendatang. Hanya sekitar 60 keluarga yang statusnya pribumi. Sisanya adalah para perantau.

Para perantau terbagi menjadi tiga kelompok besar: transmigran asal Jawa, transmigran asal Bali, dan transmigran swadaya. Dua kelompok pertama pindah dan menetap berkat program pemerintah. Kelompok terakhir datang dengan modal dan keinginan sendiri. “Saya yang swadaya,” kata Suprianto, yang datang di Mendis pada 1999 dan kini tinggal di Dusun IV.

Transmigran dari Bali terpusat di Dusun II, yang letaknya paling dekat dengan jalan besar Palembang-Jambi. Dari jalan itu masih butuh dua jam lagi melewati aspal dan beton yang sudah berlubang dan sebagian berupa jalan tanah untuk sampai ke Mendis. Kelompok lain menyebar di Dusun I, III dan IV. Pohon karet tersebar di seujur Desa Mendis. Pohon bernama *Latin Hevea brasiliensis* itu ada di pinggir jalan desa, di sebelah kawasan hutan, di hutan belakang rumah, dan di pekarangan belakang rumah.



Seorang pengurus Koperasi Mendis Maju Bersama memeriksa karet milik petani.

FOTO: KHAIRUL ANAM

Joko Sanyoto, Bendahara Koperasi Mendis Maju Bersama, menunjukkan hamparan kebun karet milik Rajiman, 45 tahun, warga Dusun IV. Kebun Rajiman tak jauh dari gudang utama milik koperasi. “Ini getah karet yang sudah mengingap,” kata Joko, menunjuk gumpalan getah yang telah mengeras di salah satu pohon. Kulit pohon itu terluka oleh keratan pisau petani yang ingin menadah getahnya.

Rajiman mempunyai dua hektare kebun karet. Joko mengelola 2,5 hektare ladang. “Saya bertani mulai 2012,” kata pemuda berusia 31 tahun ini.

Menurut Suprianto, Joko adalah satu dari sekian banyak petani karet yang dulu merupakan produsen getah kotor. “Dia sekotor-kotornya petani karet,” Suprianto tertawa mengenang masa lalu. Bukan hanya Joko, Suprianto pun pada masa lalu adalah produsen getah kotor. Tidak ada produsen getah bersih di desa itu sebelum kedatangan SNV dan Kelola Sendang.

Saking dominannya karet dalam kehidupan warga Mendis, profesi lain seolah hanya pelengkap. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 120 kepala keluarga di Mendis yang berprofesi sebagai pedagang. Delapan kepala keluarga menjadi abdi negara, dan 235 kepala keluarga menjadi buruh. Artinya, hanya 30 persen warga yang bukan petani. Selebihnya adalah petani, khususnya petani karet.

Wajarlah bila para petani karet itu melirik komoditas lain yang menjanjikan pendapatan stabil ketika harga karet hancur di angka Rp 4000-5000 per kilogram. Mereka berniat mengganti karet dengan sawit. Tapi migrasi itu urung dilakukan—setelah SNV dan Kelola Sendang masuk, dengan membawa programnya.

## Tujuh Petani dan Amarah Toke

Berapa anggaran yang digelontorkan konsorsium Kelola Sendang di Mendis? Banyak. Dan berapa warga yang terlibat di program-programnya pada awalnya? Maaf, sedikit. Teguh Triono sampai malu menyampaikannya dalam laporan tahunan program. “Masak iya saya sampaikan yang terlibat dalam program hanya tujuh petani?” katanya, mengenang awal mula intervensi Kelola Sendang di Mendis.

Tujuh. Ya, hanya tujuh, dari ratusan petani karet di desa ini, yang bersedia ikut program pemberdayaan yang dilaksanakan SNV sejak November 2016. Suprianto menyebutkan mengapa partisipasi petani pada awalnya sangat minim. “Petani itu butuh bukti di awal,” katanya.

Makanya, sampai susah payah pun mereka mengajak petani bergabung dalam program pemberdayaan, mati-matian pula para petani menolak. Begitulah karakter dari pengembangan komunitas.

Wijaya Asmara, *Community Bussines Development Specialist Kelola Sendang ZSL Indonesia*, mencoba menarik kesimpulan dari pengalamannya mengajak masyarakat terlibat. “*Community development* begitu, dia bersentuhan dengan manusia,” katanya. “Walaupun sudah buat rencana kerja, yang paling penting adalah bagaimana mengembangkan orangnya.” Tidak gampang, tidak sebentar.

Dari tujuh petani, Suprianto satu di antaranya, Mendis bergerak. Mereka bolak-balik dikumpulkan untuk menghadiri pertemuan dengan SNV dan Kelola Sendang ZSL Indonesia. Di antara yang dilakukan di awal adalah pembagian pengetahuan baru, bahkan dari yang paling remeh, seperti cara menderes pohon karet – pengetahuan dasar para petani.

Hal itu ada alasannya. Setelah bertahun-tahun menjadi petani bukan berarti pengetahuan dasar telah menjadi fondasi bagi ke-

mampuan dalam praktek. Ada jarak lebar antara pengetahuan dan kemampuan. Para petani sudah tahu bahwa untuk menghasilkan tetesan getah yang optimal, alur keratan pada badan pohon tidak boleh terlalu datar, minimal kemiringannya 30 derajat. Ini merupakan pengetahuan dasar, dan biasa. Tapi pengetahuan ini kerap terluput dari ingatan. Karenanya, “Diingatkan lagi oleh SNV,” kata Suprianto.

SNV juga mewanti-wantikan cara perawatan karet. Misalnya membersihkannya dari tanaman hama dan rajin memberinya pupuk. Baru setelah itu SNV memberdayakan petani untuk berserikat. Tujuannya agar mereka lebih kuat.

Sebelum koperasi berdiri, para petani telah terhimpun di kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok itu berhimpun lagi dalam gabungan kelompok tani hutan (biasa disingkat gapoktanhut). Bagi SNV, kelompok itu tidak cukup solid secara struktur dan pengelolaan.

Solusi muncul berupa koperasi. Tujuh petani tersebut kemudian bersepakat membentuk koperasi Mendis Maju Bersama pada 24 Juni 2017. Tugas awalnya adalah mempromosikan produksi getah bersih. “Getah bersih itu sebetulnya gampang,” kata Suprianto. “Yang penting niat.”

Tugas selanjutnya: mengumpulkan produksi getah bersih petani dalam jumlah besar sebelum dijual ke pembeli. Lantaran

“**Walaupun sudah  
buat rencana kerja,  
yang paling penting  
adalah bagaimana  
mengembangkan  
orangnya**”

**WIJAYA ASMARA**

Community Bussines Development  
Specialist Kelola Sendang ZSL

yang baru bergabung baru tujuh petani, butuh tiga bulan bagi Suprianto dan kawan-kawan untuk mengumpulkan getah bersih yang volumenya layak jual. Selama tiga bulan mereka berhasil menimbun enam ton getah karet bersih. “Akhirnya ada yang berani beli mahal,” kata Suprianto.

Saat itu getah bersih mereka tembus di angka Rp 15 ribu per kilogram. Tak tanggung-tanggung, pembelinya adalah PT Djambi Waras, anak usaha Kirana Megantara Group di Jambi. Transaksinya langsung, tanpa tauke perantara, hanya SNV yang menjadi penghubung. Kirana Megantara merupakan grup besar pemasok karet untuk produsen ban global seperti Gajah Tunggal Bridgestone, Michelin, GoodYear, Pirelli, Continental, Sumitomo, Ban Toyo, Yokohama, Hankook, Kumho, Nexen, Cooper, Apollo, dan pedagang-pedagang internasional.

Betapapun luas wilayah Mendis nyaris separuh Jakarta, kabar kesuksesan Suprianto dan kawan-kawan memproduksi dan menjual getah bersih dengan harga tinggi menyebar cepat didesa. Kabar baik ini seakan-akan menembus dinding kayu rumah warga, menyelinap di sela-sela pepohonan karet, dan menerabas sekat-sekat keraguan para petani. “Lambat laun konco-konco sing ngerti nggak perlu kito ajak,” Suprianto berbicara dengan dialek Jawa campur Palembang.

Pola penyebaran semangat yang terjadi kemudian mengalir dengan alami. Satu kawan petani bertanya, lalu ikut bergabung memproduksi getah bersih. Begitu seterusnya sampai semua petani di Mendis kini tidak ada lagi yang menjual getah kotor campur kulit pohon.

Setelah fase memproduksi getah bersih berhasil, giliran mengumpulkan getah ke koperasi. Ini yang terbukti agak berat. Sebab tujuh petani ini harus bertarung dengan para tauke yang sudah lebih dulu mencengkeram “jiwa” para petani.

Cara main tauke di Mendis begitu halus. Selama ini mereka menguasai petani dalam bentuk utang. Selama petani berutang

Djoko Sanyoto  
menyusuri kebun  
karet milik warga  
Mendis.

FOTO: KHAIRUL ANAM

kepada tauke, selama itu pula petani wajib menjual karetinya ke tauke pemberi utang. Sekalipun tauke membeli dengan harga wajar, hal itu tak lain adalah, kata Suprianto, “Ijon dalam bentuk yang lain. Gur gak keroso ae (Cuma tidak terasa saja).” Fase itulah yang menjadi bagian yang bahkan nyaris menyerempet nyawa. Pada awal 2019, Suprianto bukan tak mungkin “lewat” bila tak sigap menghadapi serangan terbuka salah satu tauke desa tetangga.

Kejadian itu bermula ketika koperasi Mendis Maju Bersama sudah mulai mapan. Mereka berhasil mengantongi status sebagai kepanjangan tangan PT Djambi Waras. Tugasnya adalah mengumpulkan dan membeli getah petani dengan harga pantas. Syaratnya: getah yang dibawa harus bersih dan kadar susutnya sedikit.

Awalnya kerja koperasi mengumpulkan dan membeli getah petani berlangsung lancar di desa tetangga, Pangkalan Bayat. Dua kali truk koperasi keluar masuk desa itu membeli getah petani. Pada pembelian ketiga Suprianto datang bersama sopir. Pembelian pun lancar, sampai truk akan keluar dari jalan desa menuju jalan raya Jambi-Palembang.

Di tengah jalan, seorang tauke Pangkalan Bayat dan anaknya mencegat truk koperasi. Suprianto turun. Perempuan tauke itu menginterogasi Suprianto, menanyakan harga beli koperasi dan macam-macam. Tauke itu lalu meminta Suprianto juga membeli getah yang telah dia kumpulkan. Si tauke kesal karena para petani kini menjual getahnya ke koperasi, bukan lagi ke dirinya. Suprianto mengiyakan asal kualitas getahnya masuk kategori koperasi.

Tanpa banyak omong, anak si tauke yang ikut mencegat sudah mengangkat balok dan siap menggebuk tengkorak Suprianto. Bapak dua anak ini melompat mundur lalu lari balik ke Desa Pangkalan Bayat, meninggalkan truk dan sopirnya. “*Iku aku rasane wis ngedrop pengen berhenti,*” kata Suprianto, mengingat

momen itu. “*Opo sih sing tak perjuangkanke? Padahal penghasilanku seko kebon dewe cukup nggo keluarga.*”

Pandangan Suprianto menatap jauh ke tanah yang basah oleh hujan pada malam itu, akhir Januari 2020. Dia duduk memeluk lutut di beranda belakang rumah, berusaha menahan matanya agar tidak ikut basah. Akhirnya dia berhasil melanjutkan kata-katanya. “Aku langsung nggolek perlindungan, minta dikawal warga desa agar bisa keluar sampai jalan besar,” katanya. “Sam-pai sekarang saya trauma. Kalau disuruh ke sana lagi, lebih baik saya berhenti dari koperasi.”

Di kesempatan lain, di Desa Mendis, Suprianto juga sempat dikejar tauke yang sakit hati karena bisnisnya terganggu koperasi. Si tauke mencegat truk pengangkut getah. Dia lalu menyebut satu nama, seorang petani, yang masih berutang kepadanya, dan minta agar getah si petani diturunkan. Untuk menghindari konflik, Suprianto menuruti permintaan si tauke.

Gara-gara hal itu, koperasi membuat kebijakan baru: tidak akan menerima getah dari petani yang masih berutang kepada tauke. “Selesaikan dulu utangnya di sana, baru jual di sini,” kata Suprianto.

Kebijakan itu yang menghambat Joko Sanyoto bergabung dengan koperasi dan menjual getahnya ke koperasi untuk beberapa saat. Joko sempat terjerat utang ke tauke Rp 5 juta. “Setelah lunas, saya langsung gabung ke koperasi,” kata Joko.

Hingga 2019, operasi koperasi berlangsung lancar dan



***Selesaikan dulu  
utangnya di sana,  
baru jual di sini***



**SUPRIANTO**

Ketua Koperasi Mendis Maju Bersama



Sulastri menunjukkan stok pelepah kering pinang yang siap diolah jadi piring.

FOTO: KHAIRUL ANAM

baik-baik saja. Tentu, ada cobaannya juga. Ujian itu datang di satu gudang koperasi di perbatasan Mendis dengan Bayung Lencir. Saat itu nyaris tiga bulan tidak ada petani yang menyetorkan getah karet. “Mereka marah dengan harga rendah yang kami tawarkan karena getahnya kotor,” ujar Suprianto. Tapi ada satu petani yang tetap menyetor. Pengurus koperasi menelateni satu-satunya petani itu, yang tetap mempertahankan kualitas getah bersihnya. Pelan-pelan petani lain yang kabur balik lagi, mengikuti satu petani itu, agar mendapat harga tinggi.

Kini, di Desa Mendis saja, koperasi telah memiliki lima gudang yang sekaligus menjadi tempat penimbangan dan transaksi. Timbang massal berlangsung setiap Selasa dan Kamis. “Walaupun masih banyak petani yang jual ke tauke,” kata Joko.

Suprianto sudah lupa berapa getah bersih yang berhasil mereka produksi dan jual ke Djambi Waras sejak 2017. Meski demikian, Suprianto masih ingat berapa duit yang telah mereka hasilkan. “Transaksinya sudah mencapai Rp 13 miliar,” katanya. “Itu kalau pakai harga rata-rata saja.”

Sebagai kepanjangan tangan perusahaan, koperasi mendapat fee Rp 100 per kilogram. Dari penghasilan itu, koperasi memutarinya lagi agar roda operasi tetap berjalan.

## Dari Karet ke Pinang

Sukses memberdayakan karet, yang merupakan jantung ekonomi warga Mendis, konsorsium Kelola Sendang memikirkan upaya lain. Tujuannya kali ini adalah untuk kemaslahatan para perempuan.

Di Desa Mendis, perempuan bukanlah kelompok pasif. Mereka kerap ikut menderes karet di kebun. Tapi KelolaSendang melihat ada peluang untuk menciptakan kegiatan baru yang bisa menguntungkan secara ekonomi.

Pinang menjadi pilihan. Tepatnya pelepah pinang. Bagian pohon yang selama ini terlupakan, cuma berakhir sebagai sampah alami dan disia-siakan pemiliknya, itu bisa diubah sebagai piring atau wadah kue. Pelepah-pelepah itu menjadi opsi tempat makanan yang lebih ramah lingkungan.

Bagaimana melakukannya? Sulastri memperagakannya di rumah produksi pelepah pinang Desa Mendis. Ada dua mesin di sini: satu mesin dengan cetakan piring bulat, satu lagi cetakan berbentuk persegi. Ibu tiga anak berusia 32 tahun ini menyalakan mesin press berdaya 600 Watt itu, lalu mengambil pelepah yang sudah bersih dan kering. Ia menaruhnya di cetakan dan mulai menekannya dengan mesin. Dengan waktu dan daya tekan yang sudah dihitung, pelepah itu berubah jadi piring. Keras dan tahan panas. "Saya mengerjakan ini bersama adik-adik saya," kata adik kandung Suprianto itu.

Rumah produksi tersebut baru berjalan dua bulan. Mesin modifikasi didatangkan jauh dari Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, Bandung, dirancang khusus untuk daya minimal. Mesin ini dihibahkan. Jika membeli, satu unit harganya Rp 35 juta. Kabar bahwa pelepah pinang bisa dijadikan piring beredar luas. Media massa menyiarkannya, hingga sampai juga ke telinga Imam Pribadi, Direktur

Pengembangan Usaha Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada akhir Januari 2020, Imam datang melihat produksi piring pelepah pinang. Ia bersemangat, karena koperasi usaha saat ini jumlahnya makin sedikit; yang tersisa tinggal koperasi simpan pinjam. Imam ingin melihat kelayakan bisnis piring pelepah tersebut. "Ada pendanaan murah dari LPDB," katanya. "Tapi ingat, ini bukan hibah, tapi pinjaman. Harus kembali."

Kelola Sendang sudah menyiapkan agar produksi piring pelepah pinang memenuhi kelayakan bisnis. Untuk itu, mereka telah menggandeng PT Jentera Garda Futurea dan ITB. Dua entitas ini akan menjadi pembeli sekaligus pemasok teknologi buat piring pelepah. Targetnya, ketika program Kelola Sendang berakhir pada Maret 2020, piring pelepah yang baru berumur jagung itu tetap beroperasi, dengan model bisnis yang lebih mapan. "Pesanan piring ini sudah banyak," kata Teguh Triono.

Rencananya, Kelola Sendang akan menambah dua mesin lagi untuk memenuhi target produksi. Memang, sebelum itu ada pekerjaan rumah lain, yaitu pasokan bahan baku, karena Mendis tidak punya ladang pinang. Tapi hal ini diyakini bukanlah halangan. Teguh berpesan: "Ingat, karet dan pinang itu hanya alat. Modalnya tetap orang-orang Mendis yang berkomitmen."

# GURINDAM DI TENGAH HUTAN

Koleksi bibit  
pohon aren Ga-  
poktan Meranti  
Wana Makmur.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

**B**UDE Jerukan—begitu warga Lubuk Bintialo, Musi Banyuasin, memanggilnya. Nama aslinya sebenarnya Suwanti, asal Salatiga, Jawa Tengah, tapi jarang warga yang tahu.

Pada Jumat malam, 24 Januari 2020, di rumahnya, ia berbagi tip untuk selamat dari harimau kepada kami. “Kalau kamu mendengar harimau menggeram, kamu harus berdehem,” ujarnya.

Ia lalu menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang tipis dimakan usia terangkat sebentar. “Hmm ...,” ia membuang napasnya sekaligus. “Begitu,” ujarnya.

Tip itu ia peroleh dari suaminya yang kini telah meninggal. Manjur? Ia sudah membuktikannya selama empat tahun.

Pada 2004, ketika ia baru membuka pondok di tempat tinggalnya sekarang, di Jalan Gas Conoco Philips, enam kilometer dari perkampungan desa, hampir setiap Subuh harimau menyempatkan mangkal di belakang dapurnya yang berbatasan dengan hutan. Bila harimau itu menggeram, dinding kayu rumahnya ikut bergetar. Menaati pesan suaminya, ia membalas geraman itu dengan berdehem. “Harimau itu langsung pergi setelah aku berdehem,” katanya.

Sayangnya, resep itu tak bisa menyelamatkan ternaknya. Suatu pagi seekor kambingnya hilang. Setelah dicari ke mana-mana, bangkainya ditemukan di kebun, disembunyikan harimau di bawah daun-daun kering. “Tapi kepalanya sudah hilang,” ujarnya.

Selang sepekan seekor kambingnya hilang lagi. Kali ini harimau itu tak meninggalkan bangkainya. Yang terlihat cuma jejaknya. “Coba kambing bisa berdehem,” ujarnya sambil tertawa.

Sejak 2008 harimau itu pergi entah ke mana. “Geramannya tak pernah terdengar lagi.”

Di desa yang berada di kawasan hutan itulah, setelah terbit peraturan tentang perhutanan sosial pada 2016, Kelola Sendang datang membawa program perhutanan sosial untuk warga perambah. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti, yang bertanggung jawab mengelola kawasan ini, menjadi mitra kerjanya.

## Hutan dalam Desa

Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, memang pernah menjadi habitat harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Raja hutan leluasa tinggal di desa ini karena hutannya luas, sekitar 78.553,61 hektare, sementara penduduknya hanya 967 kepala keluarga (2852 jiwa). Gampangnya, bayangkan saja hutan seluas Jakarta dengan permukiman hanya 10 rukun tetangga.

Tetapi jangan pernah menyebut Lubuk Bintialo sebagai desa di dalam kawasan hutan. Warga di sana tak akan suka. Menurut mereka, justru hutan yang menjadi bagian dari desa, karena Lubuk Bintialo sudah ada jauh sebelum pemerintah menetapkan lahan di wilayah itu sebagai kawasan hutan.

Selain harimau, di hutan ini hidup ungko (*Hylobates aglilis*), beruk (*Macaca namestrina*), beruang madu (*Helarctus malayanus*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), kancil (*Tragululus kanchil*), elang putih (*Haliaeetus leucogaster*), enggang (*Buceros sp.*), ayam hutan

(*Gallus sp.*), raja udang (*Alcedo sp.*), dan ular kobra (*Naja sp.*). Floranya didominasi tumbuhan hutan lahan kering. Ada akasia, ekaliptus, jabon, sungkai, parkat, menggiris, medang, terap, pulai, putat, merawan, bernai, petanang, petaling, kelapung, meranti, bulian, kelat, hingga kempas.

Hutan itu berada di bawah naungan KPHP Meranti. Luas area KPHP Meranti seluruhnya adalah 244.162 hektare. Areanya berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir. Salah satu sisinya berbatasan dengan Suaka Margasatwa Dangku, cagar terakhir untuk, itu tadi, harimau Sumatera.

Bude Jerukan datang ke Desa Lubuk Bintialo karena ingin berkebun. “Waktu itu Pak De mendengar dari orang-orang kalau di sini ada pembukaan hutan,” katanya. “Aku dan Pak De datang ke sini tahun 2004, bulan 8, tanggal tigo,” ujarnya.

Bude menjadi orang Jawa pertama di desa ini. Karena itu, warga pernah memanggilnya Wak Jawo sebelum berubah menjadi Bude Jerukan. “Mentangmentang aku *dewekan* (sendirian) dari Jawa.”

Kini Bintialo sudah berubah. Di lubuk ini hidup berbagai suku. Tak cuma Jawa, tapi juga Sunda hingga Bugis. Seperti Bude Jerukan, mereka datang untuk membuka kebun sawit dan karet di hutan di sekeliling desa.

Ada pula warga yang mencari peruntungan dengan menambang emas hitam. Soalnya, di bawah lubuk ini, pada kedalaman 100-300 meter, berlimpah kolam minyak.



**Aku dan Pak De  
datang ke sini tahun  
2004, bulan 8,  
tanggal tigo**



**BUDE JERUKAN**  
Petani Lubuk Bintialo



Anggota Gapoktan Meranti Wana Makmur mengikuti pelatihan teknik stek untuk budi daya pohon buah-buahan.

FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

Menurut Bude Jerukan, untuk membuka kebun, ia dan Pak De cuma meminta izin dari kepala desa. “Lahannya kami buka berdua saja dengan Pak De. Pohon-pohon gedanya, ya, kami potong dengan gergaji besar yang ditarik berdua. Manjat-manjat.”

Sambil terus membuka kebun yang lokasinya agak masuk ke dalam hutan, mereka mulai bercocok tanam di pekarangan pondok. Untuk tanaman tahunan mereka menanam jeruk dan pisang. Untuk tanaman semusim, mereka menanam cabe 200 batang, ubi, hingga singkong. “Tanah di sini subur. *Subhanallah*. Nggak dipupuk, tapi cabeku nggak habis-habisnya berbuah sampai batangnya sebesar tangan,” katanya.

Hasil kebun itu ia jual ke pasar Lubuk Bintialo yang berada di pusat desa. Ia biasanya berangkat pukul 7.00. Sampai di pasar sekitar jam 9.00. Pulangnya tengah hari. “Jalan kaki saja. Waktu itu nggak seperti sekarang. Jalannya dulu cuma cukup satu mobil, penuh alang-alang, dan tak seminggu sekali mobil Conoco lewat di jalan itu. Sekarang hampir tiap menit ada truk batubara yang lewat siang-malam.”

Suatu hari ia kesiangan berangkat ke pasar. Dia baru keluar rumah pukul 9.00. Tapi nasibnya sedang baik, karena di jalan ketetulan ada mobil Conoco sedang inspeksi. Mobil itu berhenti di sampingnya. “Aku diajak numpang *wong Belando*. Dia ngomong pake bahasa Belanda, aku pake bahasa Jawa. *Nggak nyambung*. Tapi aku ngerti ia mau bawa aku ke pasar.”

Ketika ia turun dari mobil di pasar, para pedagang melihat kepadanya dengan cemas. Saat ia menyiapkan jualan, pedagang di sampingnya tiba-tiba memarahinya. “Kamu ngapain naik mobil *Belando*,” ujar pedagang itu. “Lain kali mending jalan kaki. Ya *Allah*, untung kamu selamat. *Belando* itu suka jual *wong*, suka makan *wong*.”

Pulang ke rumah, Bude Jerukan langsung sakit demam selama empat hari. Tiap malam mimpi buruk tentang orang Belanda itu. “Belando itu memang menakutkan. Hidungnya gede,

warnanya merah. Pantas mangan wong,” ujarnya.

Ia tak melulu menjual hasil kebun. Pada 2009-2010, misalnya, ia juga jualan burung punai. “Aku dan Pak De menangkapnya di kebun dengan jaring.”

Saat pohon jeruk yang mereka tanam berbuah, ia berjualan jeruk. “Dari sini namaku ganti jadi Bude Jerukan.”

Soalnya jeruknya amat terkenal di Lubuk Bintialo. Bukan hanya karena ia petani jeruk satu-satunya di sana, tapi juga karena kebun jeruknya subur, lebat. Satu pohon bisa menghasilkan 1 kuintal. Orang-orang sampai datang ke kebunnya untuk makan jeruk. “*Astagfirullahalazim*, buas nian wong Palembang itu sama jerukku.”

## Mimpi Desa Wisata Buah

Pada 2012, ke Lubuk Bintialo datang rombongan Suwardi. Mereka berasal dari Suku Bugis. “Saya ke sini karena mendengar informasi di Bintialo bisa berkebun,” ujarnya pada Sabtu, 25 Januari 2020, di rumahnya di Kampung Pemekaran Bugis.

Waktu itu Suwardi datang berduapuluh. Sama seperti Bude Jerukan, untuk membuka kebun, Suwardi dan kawan-kawan cukup meminta izin dari desa dan menyeter uang pancong alas untuk kas desa. Uang pancong alas-nya sekitar Rp 1 juta per hektare.

“Ketika menerima kami, kepala desa mengatakan dia tak bisa melarang kami membuka kebun. Sebab, meski secara aturan tak boleh, kalau butuh untuk kehidupan, ya, apa salahnya. Toh, itu punya negara dan sampean warga negara juga. Yang penting jangan menanam sawit dan jangan membakar,” ujar Suwardi.

Suwardi dan kawan-kawan mendapat lokasi bakal permukiman dan kebun sekitar 12 kilometer dari desa. Lokasinya di hutan lindung. Jalan masuknya dari Jalan Conoco. Inilah cikal bakal Kampung Pemekaran Bugis.

Di lokasi ini Muhammad Yusuf langsung membuka kebun 10 hektare. Itu lahan dia dan kedua adiknya. Menurut Yusuf, ketika ia membuka hutan lindung itu, hutannya sebenarnya sudah tak ada. Sebagiannya ada yang habis karena terbakar, ada juga yang tinggal semak-semak karena pohonnya ditebang pembalak liar.

Toh, meski lahannya sudah rusak, wilayah itu tetap kawasan hutan lindung. Walhasil, warga kerap berhadap-hadapan dengan petugas kehutanan. “Nyaman tak nyaman waktu itu,” kata Suwardi, 50 tahun, ayah dua anak.

Lalu, pada 2016, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan terkait masyarakat hutan. Di antaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK Nomor 43 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Bentuknya bisa berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Hingga 2019, pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial.

Berbekal peraturan pemerintah itu, Kelola Sendang datang ke Lubuk Bintialo membawa program perhutanan sosial untuk warga perambah. Untuk program ini, KPHP Meranti, yang bertanggung jawab mengelola kawasan ini, juga telah menyiapkan hutan desa di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 hektare agar bisa dikelola dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Menurut hasil asesmen Yayasan Puter Indonesia (YPI) sebelum kegiatan dimulai, lebih dari 70 persen hutan di Lubuk Bintialo berada dalam kondisi kritis dan perlu direhabilitasi. Di desa ini juga ada tak kurang 25.000 hektare perkebunan rakyat. Bahkan, Dusun 3 dan 6 berada di hutan yang berstatus sebagai Hutan Lindung.

Akses masyarakat Bintialo pada hutan juga sangat tinggi. Di antaranya terkait dengan mata pencaharian sebagian warganya, yakni pemburu madu sialang.

Berdasarkan asesmen YPI itu, Kelola Sendang dan KPHP Meranti mengusung program pehutanan sosial (perhutsos) yang menggabungkan restorasi dengan agroforestry. Cita-citanya adalah membuat lahan hutan bisa direhabilitasi dan sekaligus manfaatnya bisa dirasakan warga. Jadi, sekali mendayung, dua tiga lubuk terlampaui.

Program pehutanan sosial itu dimulai pertengahan Agustus 2017. Mula-mula Kelola Sendang bersama KPHP Meranti mendorong pembentukan kelompok tani hutan (KTH). Tapi mengajak warga untuk membentuk KTH tak semudah membalik telapak tangan. Warga tak langsung tertarik, alih-alih jatuh curiga. “Soalnya warga sudah trauma. Selama ini warga merasa terus menjadi korban. Jadi, apa yang disampaikan dianggap sebagai rekayasa,” kata Suwardi.

Ada masalah lain. Menurut Suwardi, di masa-masa awal KPHP Meranti dan Kelola Sendang sempat salah langkah. “*Mosok* langsung main ajak. Kita ditawarkan, tapi nggak ngerti.”

Suwardi mengatakan ia sendiri baru mahfum soal pehutanan sosial setelah Kelola Sendang memfasilitasi pertemuan dengan warga di Kalimantan, yang sudah mempraktekkan program tersebut. “Nah, setelah itu saya baru merasa yakin dengan perhutsos.”

Suwardi boleh saja yakin, tapi di sana ada banyak warga yang masih curiga. “Saat matok, misalnya, disangka mau ngambil tanah,” katanya. “Gara-gara pemahaman warga yang belum sama

Persemaian biji durian di rumah Suwardi, Ketua Gapoktan Meranti Wana Makmur, di Kampung Pemebaran Bugis.

FOTO: Y. SUPRAYOGI

itu saya sempat dikabarkan akan dipotong kaki dan leher.”

Tapi, akhirnya, KTH terbentuk juga. Namanya Gapoktan Meranti Wana Tani Makmur dengan jumlah anggota 50 orang. “Yang sudah terverifikasi baru 44 orang. Masih ada yang belum terdata juga,” ujar Suwardi.

Menimbang lokasi warga yang berjauhan, KTH kemudian dibagi dua kelompok. Satu KTH diketuai Suwardi, satu lagi diketuai Nur Rohim, 27 tahun, anak Bude Jerukan. Namun visi Gapoktan ini tunggal: menjadikan Lubuk Bintialo sebagai sentra buah-buahan dan desa wisata buah, melalui kegiatan restorasi agroforestry .

Pada 2018, Gapoktan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan SK 7230/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018, Gapoktan mendapat hak kelola hutan seluas 513 hektare, yang terdiri atas 490 hektare kawasan hutan lindung, dan 23 hektare kawasan hutan produksi terbatas.

Untuk mewujudkan cita-cita menjadi desa wisata buah, Gapoktan dibantu Kelola Sendang dan KPHP Meranti membuat rumah pembibitan. Berbagai pohon buah dan hutan dibibitkan di rumah itu.

Namun, jalan untuk membuat Bintialo menjadi desa buah masih panjang. Bibit buah-buahan, misalnya, masih kurang. Dari kebutuhan bibit sekitar 18 ribu batang, yang terpenuhi baru 12 ribuan.

Jenis bibit buah juga jadi masalah. Anggota Gapoktan banyak yang ingin menanam matoa, tanaman asli Papua. “Memang sudah ada kebun matoa yang berbuah di sana. Warga ingin menirunya. Mungkin latah,” kata Yusuf.

Masalah lainnya terkait kualitas bibit. “Warga khawatir bibit yang ditanam kualitasnya rendah. Mereka takut setelah menunggu bertahun-tahun ternyata buahnya hasilnya mengecewakan,” ujar Yusuf.

Menurut ayah dua anak ini, anggota Gapoktan belum kompak. Misalnya anggota yang setuju dan tak setuju rencana kerja program (RKP) masih 50:50. “Berat tugas kedua ketua. Soalnya RKP ‘kan harus berjalan,” ujarnya.

Yang juga menjadi persoalan warga adalah, kata Yusuf, bagaimana cara membuat RKP berjalan dan warga tetap dapat makan. “Menurut RKP kami harus menanam lahan dengan proporsi 70 persen pohon buah dan 30 persen pohon hutan. Karena pohon buah baru akan menghasilkan setelah 6-7 tahun, bagaimana bagaimana anggota KTH bisa hidup selama menunggu pohon berbuah,” ujarnya.

Bahkan, setelah pohon yang ditanam berbuah, menurut Yusuf, warga masih khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Soalnya musim panen buah hanya dua kali setahun. “Berbeda dengan sawit yang bisa dipanen dua kali sebulan.”

Karena itu pula banyak warga yang masih ingin menanam kelapa sawit. Padahal ini dilarang keras. “Yang sudah telanjur menanam sawit saja hanya dibolehkan memanennya selama 12 tahun dari sejak SK terbit. Pada tahun ke-13 sawit itu harus ditebang,” ujar Yusuf.

Menurut Ruhui Eka Setiawan, pendamping dari Penabulu yang menghela program perhutsos Kelola Sendang di Kampung Pemekaran Bugis, Kelola Sendang sebenarnya sudah punya solusi agar warga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Caranya:



**Menurut RKP  
kami harus  
menanam lahan  
dengan proporsi  
70 persen pohon  
buah dan 30 persen  
pohon hutan.**



**YUSUF**  
Ketua Gapoktan



Menyadap karet. Salah satu mata pencaharian warga Lubuk Bintialo adalah berkebun karet.

FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

warga bertani sambil menanam pohon. Karena itu, ujarnya, di sini Kelola Sendang memiliki pula program pelatihan praktek pengelolaan pertanian. “Kelola Sendang juga menyediakan anggaran Rp 100 ribu per orang setiap kali ada kegiatan penanaman untuk membantu kebutuhan hidup warga,” kata Ruhui. “Tapi masak terus begitu,” kata dia lagi.

Jalan keluarnya disodorkan Suwardi. Ia menggabungkan agroforestry, hortikultur, peternakan, dan akuakultur. “Saya menyebutnya pertanian terpadu,” katanya.

Ia tak peduli istilah pertanian terpadunya itu pernah dipersoalkan ahli pertanian dari sebuah universitas karena dianggap tak tepat. Bagi dia, karena yang dilakukannya adalah menggabungkan berbagai budi daya pertanian, “Ya, namanya pertanian terpadu,” ujarnya.

Ia sudah mempraktekannya di halaman rumahnya, di lahan seluas setengah hektare. Di sana ia mengombinasikan tanaman jangka panjang, menengah, dan semusim. “Untuk tanaman jangka panjang ada karet 250 batang, pinang 70 batang, durian 3 batang, jengkol 5 batang. Ada juga cempedak dan mangga beberapa batang. Lalu untuk tanaman musimannya ada jagung, melon, dan semangka yang sudah habis dipanen. Adapun cabe masih menunggu panen.” Ternak?

Di samping rumahnya, Suwardi memelihara kambing etawa dan ayam kampung. “Kotorannya untuk pupuk,” dia menerangkan. Akuakultur?

Nah, ini masih di kepalanya. “Masih menunggu ada modalnya. Tapi lahan saya ini berbatasan dengan sungai yang airnya tak pernah kering bahkan di musim kemarau. Jadi, cocok dibikin kolam. Saya menghitung di sana bisa ada 6-7 kolam.”

Dengan pertanian terpadu di pekarangan setengah hektare itu, ujarnya, ia bisa panen tiap hari. Kalau untuk sekadar kebutuhan rumah tangga, itu sudah cukup. “Dari kalkulasi saya, hasil dari lahan 0,5 hektare ini setara dengan hasil dari

5 hektare kebun sawit rakyat yang tak diusahakan intensif,” katanya.

Berapa sebenarnya kebutuhan hidup di kampung ini? Menurut Yusuf, untuk menghidupi satu rumah dengan empat jiwa, ia paling memerlukan Rp 50 ribu. “Kan cabe tinggal petik, sayuran tinggal ambil. Kalau mau ayam, tinggal tangkap,” dia tertawa. “Belanja terbesar paling beras. Harga beras slip di sini Rp 13 ribu per kilo.”

## Lubuk Beragam Lebah Madu

Gapoktan masih punya calon tambahan pendapatan: madu kelulut. Ini pengembangan dari program madu sialang yang juga dihela Kelola Sendang.

Madu sialang adalah primadona hasil hutan bukan kayu dari Bintialo. Manis medu – istilah warga untuk madu hutan – dihasilkan oleh lebah hutan *Apis dorsata*. Lebah ini bersarang di pohon sialang.

Maaf, sialang bukan nama jenis pohon, tapi nama untuk setiap pohon yang dipilih lebah sebagai sarangnya. Sialang artinya pohon yang bertuah. Ada lima jenis pohon yang paling sering menjadi sialang, yaitu seppa, rengas, aro (ara), manggris, dan lagan. Yang terakhir sudah langka.

Dulu pohon sialang menjadi milik desa. Hasilnya dinikmati bersama-sama. Belakangan pohon sialang menjadi milik perorangan. Sekarang pohon ini biasa disebut dengan nama pemilik lahan tempatnya tumbuh.

Cara memanen madu sialang juga berubah. Dulu madu hanya dipanen pada malam hari, saat bulan gelap. Kini panen

dilakukan siang-siang, meski harinya tetap dipilih saat malam tanpa bulan.

Panen madu sialang dikerjakan minimal dua orang. Satu berjaga di bawah, satunya mengambil madu. Pengambil madu dijuluki pawang.

Pawang akan memanjat pohon sambil meminta izin kepada lebah dan makhluk gaib penjaga pohon sialang dengan bergurindam.

*“ Hai ading, sangkan lambat menenun baju, masih nenun sampul tangan.*

*Sangkan lambat kita bertemu, lagi besiraki lagi bedendan. ”*

Ketika sampai di sarang lebah, pawang mengasapi sarang itu dengan kulit kayu merawan yang diikat seperti sapu lidi dan dibakar. Asap membuat lebah meninggalkan sarang dan berputar-putar mengelilingi pohon sialang.

Memanen madu ada aturannya. Tujuannya agar panen berjalannya lestari. Misalnya pada panen pertama hingga ketiga madu tak boleh dihabiskan. Madu sialang juga hanya boleh dipotong dengan alat-alat dari kayu atau dengan tangan. Besi dilarang digunakan. Alasannya *wallahualam*.

Setelah selesai mengambil madu, pawang turun dari pohon sambil bergurindam. Kali ini untuk pamitan kepada lebah dan penjaga pohonnya.

*“ Nginjam kampak nginjam beliung, nginjam perapas kiliran taji, tinggallah kakak, tinggallah ading, tinggallah segala kerindu hati.*

*Kayu sialang damamu kayu, tumbuh di perampingan tebing, kami banyak ngaturkon Tangguh, tahun datang kami ke sini lagi. ”*

Satu pohon sialang yang besar bisa ditempati banyak sarang lebah. “Ada yang mencapai 200-an,” kata Nur Rohim. “Dan hasilnya sampai 1 ton.”



Salah satu kegiatan Kelola Sendang di Lubuk Bintalo adalah melakukan pemetaan.

FOTO:  
MICHAEL C. MATTHEW

Namun belakangan tak pernah terdengar lagi ada panen sebanyak itu. “Ini ada kaitannya dengan keberadaan akasia di HTI,” katanya.

Rupanya lebah madu mendapatkan banyak makanan dari pohon akasia yang dikelola perusahaan HTI PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB). Karena itu pula 80 persen pohon sialang terkonsentrasi di area konsesi kedua perusahaan. “Akasia ini sumber makanan lebah yang berlimpah. Pohonnya selalu berbunga. Nektar dan polennya banyak,” kata Mahmudi, sejawat Nur Rohim.

Pada 2016, BPP dan SBB memanen akasiannya untuk dijadikan bubur kertas. Sumber makanan lebah menghilang. Celakanya, ketika dilakukan penanaman pohon baru, akasia diganti eukaliptus yang bunganya sedikit. “Pergantian pohon ini membuat jumlah sarang dan produksi madu sialang menurun,” kaya Mahmudi lagi.

Berdasarkan sensus pohon sialang yang dilakukan Kelola Sendang diketahui jumlah pohon sialang di desa dan di dalam kawasan konsesi tinggal tersisa sekitar 30 pohon. Hasil panen dalam satu periode hanya sekitar 250 kilogram. Madu ini biasanya dijual dengan kisaran Rp 70-80 ribu per kilogram.

Harga itu masih di bawah harga pasar. Karenanya Kelola Sendang membantu warga memperbaiki kualitas madu dan pengeemasan. Tujuannya agar madu bisa dijual lebih mahal. Pelatihan yang diberikan, misalnya, teknik penirisan untuk memisahkan madu dari sarangnya. Selama ini warga memisahkan madu dari sarangnya dengan memerasnya, sehingga madu masih tercampur sisa sarang. Teknik yang juga diperkenalkan adalah penurunan kadar air. “Madunya jadi bersih dan jernih,” ujar Mahmudi.

Untuk pengemasan, Kelola Sendang membantu Nur Rohim dan kawan-kawan mendesain kemasan madu dan labelnya, setelah sebelumnya mereka sepakat memakai merek Wana untuk madunya.

Kemasan baru itu membikin Nur Rohim dan kawan-kawan kaget. “Saya sempat tak percaya kalau madu dalam kemasan itu buatan kami,” ujarnya.

Harga lebah madu Wana juga terkerek dari semula paling tinggi Rp 80 per kilogram menjadi 100 ribu per kilogram. “Penampilannya sudah tidak kalah dengan madu impor yang lebih mahal,” kata Nur Rohim.

Nur Rohim dan kawan-kawan berharap madu sialang akan menjadi lini bisnis yang lestari. Tapi mereka juga mesti bersiap untuk skenario terburuk. “Saya pernah ke Riau. Di sana juga ada kelompok yang mengusahakan madu sialang dan kini mereka mengalami penurunan produksi,” katanya. “Tak tertutup kemungkinan hal yang sama terjadi di sini.”

Untuk berjaga-jaga, Kelola Sendang memperkenalkan budi daya madu kelulut. Bedanya dengan madu hutan, kelulut tak menyengat. Mereka cuma menggigit.

Dari survei oleh Penabulu diketahui Lubuk Bintlialo ternyata juga lubuk untuk berbagai jenis kelulut. “Cuma sejauh 1 kilometer dari kampung ditemukan enam jenis kelulut di daerah yang sudah terbuka,” ujar Suwardi. “Logikanya, kalau di wilayah yang terbuka saja sudah sekaya itu, bagaimana di hutannya?”

“Di tempat saya malahan dapat sembilan jenis kelulut,” kata Nur Rohim. “Delapan sudah diidentifikasi, tapi satu jenis tak cocok dengan gambar 20 jenis kelulut yang sudah diketahui. Sifatnya juga pemalu. Kalau ternyata ini spesies baru, saya mau namanya ada kata ‘wana’,” ujar lulusan sekolah menang atas itu sambil tertawa.

Kelulut cukup produktif menghasilkan madu, meski kalah jauh dari lebah sialang. “Kami pernah menemukan rumah kelulut beruang yang di dalamnya ada 10 liter madu,” kata Suwardi.

Sayangnya kelulut beruang tak direkomendasikan untuk dipelihara. Meski kelulut beruang hanya menggigit rambut, ka-

lau mereka mengeroyok rambut bisa botak. Ada satu jenis kelulut lainnya yang juga tak direkomendasikan dalam koleksi Suwardi. Namanya kelulut air mata. Seperti namanya, kelulut ini senang sekali air mata – entah apa alasannya.

Rata-rata, madu kelulut menghasilkan 250 mililiter per empat bulan. Sedikit?

Nur Rohim tertawa sebelum menjawab pertanyaan ini. “Bayangkan kalau kami punya 1.000 rumah kelulut,” ujarnya. Belum lagi harga madu kelulut yang lebih greng dari madu sialang, antara Rp 300-400 ribu per kilogram. “Mungkin jadi mahal karena lebih membikin greng yang meminumnya,” kata Nur Rohim.

Penabulu memulai pelatihan kelulut kepada anggota Gapoktan sekitar Oktober 2019. Pelatihan itu sekaligus praktek: dari berburu bibit kelulut di hutan hingga memindahkannya ke sarang buatan.

Pada Desember 2019 anggota Gapoktan sudah berhasil memindahkan 15 sarang kelulut ke dalam kotak. Sayangnya, karena kayu bakal sarangnya masih basah, sarang itu membusuk. “Mereka terlalu bersemangat sehingga tak menunggu kayunya kering,” ujar Ruhui Eka Setiawan. “Tapi tak apa, tinggal cari lagi bibitnya di hutan,” kata pendamping dari Penabulu itu.

Menyadari kelulut butuh nektar dan polen, Suwardi mulai menanam bunga. Ketika menerima penulis untuk wawancara, ia dan Ruhui baru saja menyemai enam jenis bunga makanan kelu-



***Penampilannya sudah tidak kalah dengan madu impor yang lebih mahal***



**NUR ROHIM**  
Petani Kelulut



Anggota gapoktan lewat di depan plang demplot Meranti Wana Makmur.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

lut. “Berkat kelulut ini kampung kami mungkin juga jadi taman bunga, selain penghasil buah-buahan,” ujarnya.

## Musuh Laten

Dengan pertanian terpadu itu, Suwardi yakin program perhutanan sosial di kampungnya akan berjalan. “Selama ini kalau ada program KTH yang harus dikerjakan, warga alasannya selalu soal makan—kalau programnya kami kerjakan, terus kami makan apa, karena waktu kami habis untuk program,” ujarnya.

Pertanian terpadu, kata dia, membuat anggota Gapoktan cukup berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara bertani. Program-program KTH otomatis akan juga dijalankan karena anggota melakukan pertanian terpadu. Misalnya, karena warga beternak lebah, warga juga akan menanam pohon buah yang diperlukan sebagai makanan lebah. “Model pertanian terpadu, menurut saya, merupakan fondasi yang sangat kuat untuk perhutsos di sini,” kata Suwardi.

Sepertinya demikian. Tapi, apa pun modelnya, halangannya laten: hama babi dan beruk. Menurut Bude Jerukan, Yusuf, dan Suwardi, babi dan beruk di Bintialo memiliki IQ di atas rata-rata sehingga susah diberantas.

Bude Jerukan mengikuti benar perkembangan kecerdasan babi dan beruk di sana. “Mulanya babi tak tahu kalau ubi dan singkong itu enak, jadi tanamanku aman. Tapi entah bagaimana caranyo akhirnya mereka tahu,” katanya. “Nggak tahu belajarnya di mana.”

Untuk mengatasinya, ia pernah mencampur dedak dengan semen. Maksudnya, agar babi kesulitan membuang kotoran. Tapi

taktik ini hanya mempan sebentar, karena babi kemudian tak mau memakan dedaknya.

Bude Jerukan mengganti lagi taktiknya. Ia memotong ubi jadi tiga potong dan memasukkan potongan jarum ke dalamnya. Cara ini manjur, tapi berbahaya. “Pernah bermalam-malam babi yang makan ubiku itu nyerudukin tiang rumah. Ngamuk. Sampai aku takut rumahku roboh.”

“Monyet (beruk) di sini juga tak kalah pinter,” Bude meneruskan ceritanya. Awalnya beruk tak menyentuh jeruknya. Entah bagaimana caranya mereka kemudian tahu di balik kulit jeruk itu ada buah yang enak. “Akhirnya mereka pandai sekali membuka jeruk. Kalah manusia,” ujar Bude.

Akhirnya Bude Jerukan merasa tak ada gunanya melawan hama-hama itu. “Aku membiarkan saja. Aku berpikir yang dia ambil kan cuma secukupnya untuk makan.”

Tapi anaknya, Nur Rohim, tak hendak menyerah. Ketika penulis menemuinya, ia baru pulang dari Sekayu untuk membeli perangkat pagar listrik. Yang dibelinya bukan perangkat yang listriknya bisa membunuh, karena itu dilarang. “Cukup yang listriknya membikin kapok, untuk jaga kebun jagung,” ujarnya.

Yusuf juga memimpikan punya pagar macam itu. Soalnya, empat bulan tanaman jagungnya seluas 2 hektare ludes disikat babi.

Waktu itu ia menjaga kebun jagungnya siang malam dengan menghalau setiap babi yang masuk. “Tapi babinya tahu saya kesulitan berlari di ladang jagung. Jadi dia hanya berputar-putar dalam kebun. Kalau saya tak berhenti mengejar, babinya jadi nekat. Giliran saya yang lari dikejar.”

Sebenarnya dulu kebun di sana cukup dipasang pagar plastik hitam untuk menghalangi serbuan babi. “Tapi sekarang babi di sini sudah tahu kalau pagar plastik lunak, bisa diterobos, setelah ada babi menabrak pagar plastik warga saat dikejar-kejar,” kata Yusuf.

Pagar kejut, menurut Yusuf, mungkin jalan keluar terbaik yang tersedia. Soalnya harganya masih terjangkau. Untuk

perangkat yang bisa memagari kebun seluas 5 hektare, harganya sekitar Rp 800 ribu. “Belinya dari Makassar,” ujarnya.

Pagar ini pun aman untuk orang, karena setrumnya tak membunuh. “Yang rematik dan gejala struk malah jadi sembuh,” kata Yusuf sambil tertawa. “Ini kata nenek sebelah yang dua kali kena setrum.”

Tapi, pagar kejut, tak bisa menahan beruk. Kawanan beruk bisa dengan mudah masuk kebun dengan memanjat tiang pagarnya. “Pandai-pandai hama di sini,” kata Yusuf.

Nur Rohim bukan tak pernah menyampaikan soal gangguan hama ini ke kantor KPHP Meranti. “Saya minta dicarikan solusinya,” ujarnya. Jawabannya? “Kalau mau tak diganggu babi, pindah saja ke kota.”

# MEMBENAH DARATAN SAMPAH SUNGSANG

Warga Sungsang, Banyuasin, melakukan bongkar muat barang di samping rumah mereka yang berada di atas perairan.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

**N**afan Ham mengingat masa-masa indah di kawasan permukimannya di Sungsang sewaktu dia masih bocah ingusan. Baginya, kala itu, setiap hari adalah permainan, dan segala yang ada di kolong kampungnya bisa berubah menjadi kenikmatan, termasuk mandi di sungai.

Lelaki 61 tahun itu bercerita tentang sungai yang masih bersih. “Dulu aku mandi di bawah jembatan,” katanya.

Menurut dia, ada yang lebih dari itu: orang bahkan menambak udang, di bawah jembatan juga. Biasanya orang menaruh perahu dalam keadaan tengkurap manakala air surut. Ketika air pasang, begitu perahu ditelentangkan, “di dalamnya pasti sudah ada udang besar-besar”.

Lain dengan sekarang. Dia bilang keadaannya tak bisa dibandingkan. Udang kian sulit dicari. Kolong perkampungan mengalami pendangkalan karena timbunan sampah dari masa berpuluh-puluh tahun. Kota kecil yang terdiri atas rumah-rumah panggung sambung-menyambung dari Desa Marga Sungsang, Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, dan Sungsang IV itu semakin terbebani oleh jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 23 ribu jiwa.

Nafan tahu persis kapan dan apa penyebab utama tumpukan sampah yang kemudian diwariskan hingga kini. “Sejak air kemasan muncul dan masuk ke sini, itulah,” ujarnya.

Nafan menjelaskan, sebelum segala macam bungkus berba-

han plastik membanjiri Sungsang, sampah yang ada umumnya mudah terurai: potongan kayu, kemasan daun, sabut kelapa, jaring udang berbahan benang katun. Kini, menurut dia, teramat sulit menggambarkan kondisinya. Segala jenis sampah kemungkinan mengendap di kolong Sungsang: popok bayi, barang elektronik, pakaian bekas, onderdil kendaraan, dan barang-barang berbahan plastik. Siapa pun yang peduli sangat boleh bakal sakit kepala memikirkannya. Tersebab oleh hal itulah Kelola Sendang memutuskan untuk masuk.

## Sampah sebagai Daratan

Sebenarnya, hal ihwal sampah belum masuk ke “radar” program sewaktu konsorsium Kelola Sendang memulai kegiatannya pada 2016. Sasaran awalnya, kala itu, hanya noktah kecil saja di kawasan yang didapuk sebagai Area Model 3, yakni Dusun Sembilang, yang secara administratif masuk ke dalam Desa Sungsang IV. Setelah program berjalanlah diputuskan target wilayah diperluas.

Akhmad Arief Fahmi, Koordinator Program Penabulu, menggambarkan perkampungan Sungsang sebagai “satu kesatuan ekologi sosial yang sebaiknya dikelola secara terintegrasi”. Karena itu, dalam perjalanan selanjutnya, “Kami teruskan koordinasi dengan pihak kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Banyuasin II,” katanya.

Untuk merapikan rencana besar, digelarlah lokakarya desa Area Model 3 di Palembang pada 22 Juni 2019. Forum itu menyepakati sejumlah prioritas, satu di antaranya adalah rehabilitasi ekosistem. Pengembangan sarana dan sistem pengelolaan sampah

di kampung nelayan menjadi rencana aksi untuk mencapai prioritas itu. Rencana aksi ini melibatkan Pemerintah Desa Sungsang, tim Kelola Sendang-Penabulu, tim Kelola Sendang-Livelihood, tim Kelola Sendang-Konservasi, Hutan Kita Institute (HaKI), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Taman Nasional Sembilang, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin melalui sekolah-sekolah di wilayah target aksi.

Kawasan permukiman yang menghampar di dekat muara Sungai Musi, sekitar 85 kilometer dari Palembang dan kurang dari 10 kilometer dari Selat Bangka, itu dinilai layak mendapat perhatian. Isu sampah sebetulnya hanya sekelumit dari silang sengkabut masalah di daerah yang pernah menjadi pos pemantau armada dagang pada masa Kesultanan Palembang itu. Tengok saja sederet masalah yang tampak lebih mendesak ini: maraknya pernikahan dini, perjudian di semua level usia, pemakaian sabu-sabu, atau tingginya angka putus sekolah. Meski demikian, tetap disadari mesti ada yang patut diprioritaskan.

Dalam hal itulah Salinan, Camat Banyuasin II, wilayah kecamatan yang menaungi Sungsang, mengakui problem tergejagat di Sungsang adalah sampah dan sanitasi. Perkara ini membikin dia pening sejak hari pertama bertugas sebagai camat dan ber Kantor di kawasan itu delapan bulan lalu. “Sampah ini masuk target prioritas satu. Targetnya dalam waktu setahun (akhir 2020) ha-



***Sampah ini masuk target prioritas satu. Targetnya dalam waktu setahun (akhir 2020) harus ada perubahan yang signifikan***



**SALINAN**  
Camat Banyuasin II



Salah satu kanal di Sungsang IV yang penuh sampah.

FOTO:  
BONARDO MAULANA

rus ada perubahan yang signifikan,” ujarnya saat ditemui di kantor Kecamatan Banyuasin II, Desa Sungsang I, 24 Januari 2020. “Tangan saya cuma dua. Saya butuh tangan kita semua untuk mewujudkan Sungsang bersih.”

Pak Camat terdengar mengaduk pesimisme dan optimisme sewaktu bilang begitu. Dari beberapa kali mengamati kegiatan bersih-bersih di lingkungan kantornya, dia tahu sampah di kolong-kolong Sungsang akan senantiasa berulang-alik dari satu titik ke titik lain, menumpang arus pasang-surut air. “Kalau orang mau bangun rumah saja, harus gali itu sampah sampai setinggi 1,5 meter sebelum ketemu tanah,” ujarnya mengenai kondisi yang sempat penulis jumpai saat mengamati proses pembangunan sebuah rumah di Desa Sungsang III.

Regina Ariyanti, Koordinator Project Supervisory Unit Kela Sendang, sependapat dengan Salinan perihal sampah di Sungsang. Dia mengakui sampah menjadi problem yang genting. “Kami hadir dan melihat, dan makan di sana jadi kurang nyaman,” katanya. Menurut dia, yang menjadi masalah adalah dulu warga rajin mengumpulkan sampah, tapi tidak ada tempat pembuangan. Mengeruk sampah juga terlalu sulit, tidak bisa memakai mesin karena terlalu padat.

Untuk membayangkan volume sampah di sana, begini penggambarannya. Luas Sungsang di zona pasang-surut air laut dan sungai kira-kira 80 hektare--97 kali luas lapangan sepak bola. Tak sejengkal pun area itu bebas sampah.

Rumah-rumah dan bangunan-bangunan lain berbentuk panggung, semuanya terhubung melalui jalan-jalan berbentuk laksana jembatan. Jika air sedang pasang, kolong-kolong kota tampak normal. Tapi saat air surut, benda-benda buangan langsung mendominasi, meneror penglihatan dan pembauan siapa pun.

“Memang susah sampah ini,” Romi Adi Candra, Kepala Desa Sungsang IV, menandakan di rumahnya pada 10 Januari 2020. Dia membayangkan betapa sulitnya menanamkan pola pikir di

kalangan warga. “Butuh waktu lama. Mereka sekarang menyediakan tempat sampah di depan rumah saja tidak bisa.”

Itu saja belum cukup. Masih ada satu hal lagi yang membikin merinding, yakni ilustrasi dari Nafian Ham tentang limbah manusia. “WC kami ini ‘kan terjun bebas (langsung ke kolong tanpa *septic tank*). Kalau di rumah ada orang 10, hitung berapa kilogram terbuang dan bertumpuk. Katakanlah per orang setengah kilogram. Apa enggak naik daratan ini?” ujarnya.

Jelas, kompleksnya masalah sampah tak bakal bisa diatasi oleh satu pihak atau satu langkah saja, misalnya seperti dikatakan Romi tentang penyediaan tempat sampah. Andaikan setiap orang tertib menyimpan sampah pun, pada akhirnya, keadaan malah runyam karena tak tersedia fasilitas pembuangan lanjutan--apalagi instalasi pengelolaan--yang mumpuni.

Namun, seiring dengan berjalannya program, harapan pelan-pelan terbit di Sungsang. Di pucuk pimpinan wilayah, Salinan coba menularkan teladan. Dia aktif berkampanye untuk menjadikan Sungsang lebih bersih. Salah satu upaya kecilnya adalah mengharamkan semua balai desa menyediakan air kemasan. Selain itu, dia mengingatkan aparat desa agar tak lagi memakai plastik saat membeli makanan. “Saya tiap menghadiri acara desa selalu bawa tumbler, sebagai bentuk kampanye,” katanya.

Dalam hal lokasi pembuangan sampah lokal, Salinan mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin berencana membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang berlokasi di Sungsang III pada 2020. Keterangannya beririsan dengan pernyataan Regina, yang mengemukakan bahwa ke depan akan disediakan tempat pembuangan sampah dan bahwa hal ini “sudah di- *follow-up* oleh pemerintah kabupaten”. Menurut Kepala Desa Sungsang III, Amiruddin, luas area yang disiapkan untuk TPST itu 225 meter persegi, dan “pembangunannya tinggal menunggu informasi dari pemerintah kabupaten”.

Apa yang berdenyut di tingkat pemerintah itu diteruskan ke tingkat tapak. Ini menjadi pemacu semangat. Sejumlah program, seperti Jumat Bersih, area percontohan bersih, kegiatan pengumpulan sampah, dan pembentukan bank sampah, mulai berjalan. Untuk Jumat Bersih, misalnya. Penulis menyaksikan anak-anak sekolah—saat itu melibatkan 30-an murid Kelas 6 SD III Sungsang IV—bersemangat menjaring sampah kemasan plastik di sejumlah tempat.

Untuk pengumpulan sampah dan bank sampah, nama Hamka patut disinggung. Pria berusia 39 tahun yang pernah menjadi perangkat desa di Sungsang II dan delapan bulan terakhir berstatus tenaga honorer di kantor Kecamatan Banyuasin II ini beberapa bulan terakhir mencoba istikamah di bidang sampah. Dia, untuk sementara, ditunjuk sebagai koordinator pengolahan sampah dan bank sampah di ibu kota kecamatan, yakni Sungsang I, oleh Camat Salinan. Selama Hamka dan tim bekerja mengurus sampah sejak kuartal keempat 2019, sudah dua kali hasilnya diangkut pengepul sampah Palembang.

“Baru tiga bulan ini kami (bank sampah) ini berdiri. Sebulan bisa jual paling banyak 1,5 ton dari target 3-4 ton. Itu karena masih kurang orang. Dapatnya sekitar Rp 2,8 juta. Paling mahal gelas (air kemasan) bersih, Rp 5.000 per kilogram. Kemarin kita belum bersih, dihargai cuma Rp 3.500 per kilogram,” katanya.



***Butuh waktu lama.  
Mereka sekarang  
menyediakan tempat  
sampah di depan  
rumah saja  
tidak bisa.***



**ROMI ADI CANDRA**  
Kepala Desa Sungsang IV



Warga menjemur ikan asin yang menjadi salah satu komoditas utama desa nelayan ini.

FOTO: MICHAEL C. MATTHEW

Hamka berpendapat empat anggota masih kurang untuk memenuhi tuntutan mengurus sampah bulanan. Meski demikian, setidaknya, pembagian kerja untuk timnya sudah lebih jelas. Jika kebutuhan akan anggota tambahan terpenuhi, dia merasa yakin target bulanan bakal tercapai.

Ketika penulis mengunjungi lokasi pengolahan sampah yang dijalankan Hamka dan tim di kawasan Sungsang I—berupa bangunan sementara di tepi jalan yang bersambungan dengan Jalan Nasional Palembang-Tanjung Api-Api—air hujan tengah menggenangi fasilitas itu. Bangunan belum berpanggung dan berada di lokasi yang permukaannya rendah. Jika hujan, ia niscaya tergenang. Jaraknya dari permukiman sekitar 700 meter. Tanpa sarana penunjang, mengumpulkan sampah ke situ—dan mengelolanya—bakal makan waktu.

“Butuh alat-alat pendukung. Ya, seperti motor buat gandeng gerobak sampah. Kalau pakai Kaisar (motor bak) terlalu besar dan berat. Untuk jalan (kampung) enggak mumpuni,” ujar Hamka.

Seturut pengakuannya, Bank Sampah Sungsang sudah memiliki 41 nasabah. Paling banyak dari Sungsang I. Para nasabah itu dibekali buku untuk mengetahui akumulasi kontribusi mereka. Uang baru bisa dicairkan setelah 12 bulan penyimpanan.

Saat ini, secara keorganisasian, bank sampah masih menempel dengan kecamatan. Salinan beralasan bank sampah masih baru, “masih butuh intervensi”. Tapi, menurut dia, ada visi untuk memisahkan bank sampah dari kecamatan. “Orangnya tetap boleh dari kecamatan, tapi secara organisasi pisah,” katanya. “Target kita, bank sampah tidak hanya satu. Harapannya, di tiap desa ada. Dan saya yakin bank sampah akan menjadi ketergantungan bagi masyarakat.”

Sistem bank sampah yang sederhana ini dianggap mudah direplikasi oleh desa-desa yang lain. Pengembangan bank sampah ini, menurut Salinan, memicu pemerintah Desa Sungsang III dan Desa Muara Sungsang untuk mengalokasikan dana

desa masing-masing sebesar Rp 100 juta untuk mengembangkan bank sampah dan sistem pengelolaan sampah.

Ketika baru memulai bergerak Hamka hanya berurusan dengan pemilahan sampah plastik untuk memaksimalkan nilai tambah ekonominya. Lalu, katanya, setelah bekerja sama dengan Pak Camat, “Kita dibilangin sampah yang dikumpulkan itu keseluruhan.” Karena itulah setoran sampah ke pengepul tidak berisi bekas kemasan air saja, tapi juga buangan lain seperti perkakas elektronik--kulkas, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Barang-barang ini memiliki harga jual Rp 700 per kilogram.

Untuk zona pembersihan yang diawasi kecamatan, anggaran honorarium petugas Rp 1 juta, dengan kuota satu orang. Upah itu mesti dibagi dua karena mengikuti jumlah pekerjanya. Gaji bagi mereka yang tidak kebagian dikeluarkan dari bagi hasil penjualan setelah biaya operasional.

“Kami berlima optimistis ini akan maju,” kata Hamka tentang Bank Sampah Sungsang. “Seandainya kami sudah enggak dipakai lagi oleh pemerintah, kami akan buka usaha kayak gini. Di sini banyak masuk barang, tapi tidak ada yang keluar.

Kalau enggak ada yang ngumpulin, bersihin, siapa lagi? Sekarang orang maunya cuma jadi pengurus, tapi enggak mau bekerja.”

Optimisme Hamka digemakan oleh Syamsuddin, Ketua RT 9, Lorong Buyut, Sungsang I. Lelaki berusia 51 tahun ini merupakan nasabah terbesar Bank Sampah Sungsang. Dalam 10 hari dia bisa mengumpulkan 100 kilogram bekas kemasan air minum. Dia bahkan sudah mempunyai sistem pengolahan awal di muka rumahnya. Pada sebuah saluran air, dia memasang jaring, yang menjadi wadah gelas-gelas plastik kotor. Ketika pasang, dia akan jadikan jaring itu “mesin pencuci”.

“Sasaran saya,” kata Syamsuddin, “kita bikin kesehatan bae, lah. Bersih. Kalau dipandang wong dari luar, alangkah bagusnya.” Syamsuddin turut mengangkat poin penting, yakni kesehatan. Maklum, banyak penyakit di Sungsang yang berkenaan

dengan sanitasi, seperti diare dan muntaber. Belum lagi jika berbicara tentang pengaruh air setempat terhadap kulit. “Ini kulit kayak begini bukan saya saja yang kena,” ujarnya menunjukkan beberapa bekas koreng di tangannya.

## Memaksimalkan Air Hujan

Bagi Syamsuddin, juga banyak penduduk Sungsang, pemanfaatan air pantai atau muara yang payau untuk mencuci atau mandi sudah lazim. Biasanya warga langsung menimba air di sekitar rumah ketika tiba air pasang. Itu sebabnya banyak yang kulit badannya rentan terkena infeksi.

Husna Surya, 46 tahun, seorang warga Sungsang IV, mengatakan bagi mereka yang punya pompa, tinggal menyedot saja untuk memenuhi kebutuhan air. “Beda sama yang tidak punya,” ujarnya.

Ia mengaku tidak selalu memakai air hujan, berbeda dengan para penghuni di kediaman kakeknya—salah satu bangunan tertua di Sungsang dan masih bergaya arsitektur lokal—yang terletak di seberang rumahnya; rumah yang kini dimanfaatkan sebagai homestay. Di sana ada penampung air yang besar, kapasitasnya bisa sampai 50 tong. Untuk semua keperluan, misalnya mandi dan mencuci, hasil tadahan air hujanlah yang digunakan.

Kakek Husna yang bernama M. Hasan merupakan saudagar kesohor pada zamannya. Bisnisnya berlangsung di Singapura. Dia memiliki sejumlah properti lain di sekitar homestay tersebut. Hasan memiliki penampung air hujan berukuran jumbo demi bisa dipakai di beberapa rumah. Seperti banyak penadah hujan di kota kecil itu, penampung milik Hasan tidak dipasangi



Rumah di atas air milik warga nelayan Sungsang.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

filter. Air dari talang dengan pelbagai kadar kekotoran langsung masuk ke dalamnya. Kualitas air akan sangat dipengaruhi jenis kotoran yang ada di atap.

Menengok kondisi semacam itu, para pihak di Area Model 3 bersepakat membangun sarana air bersih melalui gerakan panen air hujan (GePAH) untuk meningkatkan kualitas air tadahan. Di sana—juga dua desa di Kecamatan Karang Agung Ilir, yakni Tabala Jaya dan Sumber Rejeki—fokus tim Kelola Sendang-Penabulu adalah mengenalkan sistem penyaringan yang lebih baik dan sistem kelola kolektif.

Sebagai percontohan (demplot), tim memasang enam unit instalasi tunggal dan satu instalasi paralel di Sungsang, serta empat lainnya di Kecamatan Karang Agung Ilir. Pada tahap lanjut, sejumlah instalasi itu—dengan tangki air yang disebut “tedmon” (metonimia atas merek Tedmon)—bakal dilengkapi alat elektrolisa yang berfungsi mengolah air hujan supaya layak minum. Instalasi percontohan pertama dipasang di bagian belakang Kantor Desa Sungsang IV pada pertengahan September 2019. Sisanya menyusul di beberapa lokasi lanjutan.

Saat penulis ke lapangan pada akhir Januari 2020 belum semua alat elektrolisa terpasang. Di Sungsang IV perangkat dimaksud bahkan rusak sebelum dipakai. Hanya di Sungsang III alat elektrolisa telah terinstalasi. Kepala Desa Amiruddin mengatakan para pegawai di sana sudah mengonsumsi air dari situ.

Mengenai rasa, setelah mencoba, penulis menganggap air tadah hujan yang sudah menerapkan filterisasi dan belum tidak jauh berbeda. Perbandingnya adalah air yang diambil di rumah dinas camat di Sungsang I—salah satu spot percontohan—dan homestay Husna Surya yang masih mengaplikasikan metode konvensional. Walau begitu, secara fisik, air yang berasal dari tangki berpenyaring memang lebih bersih.

Sistem filterisasi berlapis yang diterapkan pada instalasi seperti ini cukup baik menyaring partikel-partikel tak penting. Sistem

itu memungkinkan anasir-anasir buangan seperti daun, kertas, plastik, serta debu-debu halus lain tak memasuki tendon.

Instalasi tangki dan alat elektrolisa dirancang dapat dikerjakan sendiri oleh warga karena sederhana, juga setelah tersedia materialnya. Tapi penerapannya di rumah mesti mempertimbangkan variabel lain. “Untuk panen air hujan, tempatnya mungkin susah. Rumah-rumah penduduk sudah rapat, banyak di antaranya yang materialnya sudah lapuk,” ujar Camat Salinan.

Selain itu, harga satu set fasilitas panen air hujan (PAH) juga tidak murah dari sudut pandang kelas ekonomi terendah di Sungsang. Menurut Nafian Ham, walaupun nelayan biasa membeli, saat paling mungkin melakukannya adalah ketika panen ikan. “Orang-orang belum merasa waktunya mendesak (untuk fasilitas filterisasi PAH). Mereka selama ini pakai cara biasa, dan merasa baik-baik saja,” katanya.

## Menuju Visi Ecoeduwisata

Jika masalah sampah dan air sudah jauh membaik, mungkin program ecoeduwisata yang dicanangkan di Sungsang IV bisa terlaksana dengan bagus. Desa itu memiliki area terluas dari semua kompleks Sungsang, beririsan dengan Taman Nasional Sembilang. Basis wisata utama yang dibayangkan memang alam.

Romi Adi Candra, Kepala Desa Sungsang IV yang pada 27 Januari 2020 mengakhiri masa jabatan, sebenarnya optimistis dengan potensi wisata di wilayah kerjanya. Namun dia cukup realistis dalam menyikapi situasi di kawasan Sungsang saat ini, yang belum ideal sebagai basis aktivitas turis.

Husna Surya, salah seorang pengelola homestay di Sungsang

IV, juga merasa pariwisata bisa dikembangkan dan menyumbang pundi-pundi personal. Dia bahkan bilang program belum berjalan saja, penginapan yang dia urus sudah kerap dikunjungi tamu. “Ada saja sih yang menginap. Kadang juga tamunya banyak,” ujarnya.

Menurut Affan Absori, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, daya wilayah tersebut untuk mengembangkan ecoeduwisata sungguh besar karena sejumlah hal seperti pengamatan burung migran asal Siberia, susur sungai, dan memancing sudah tersedia. Bahkan, bagi orang-orang yang mencari ketenangan alam, Sembilang sangat cocok karena berhawa sejuk. “Cuma, kendala di Sembilang, cost untuk transportasi sangat besar. Banyak orang mau melihat burung migran, tapi ketika disampaikan harus naik *speed boat*, akhirnya enggak jadi,” katanya.

**Banyak orang mau melihat burung migran, tapi ketika disampaikan harus naik speed boat, akhirnya enggak jadi**

**AFFAN ABSORI**

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II,

## Bukan Lagi Hukuman

Program Kelola Sendang yang menyertakan Sungsang sebagai bagian dari sasaran menggirangkan hati Salinan. “Semacam penyemangat,” ujarnya. “Maklum saja, dulu orang kalau ditempatkan di sini dianggap sebagai buangan. Hukuman. Terpaksa.

Soalnya masalahnya banyak. Apalagi daerahnya cukup terisolasi kalau hujan. Soalnya akses (darat) baru-baru ini saja diperbaiki. Sekarang sudah tidak lagi (merasa terpaksa).”

Ibarat cahaya, yang paling terang, menurut dia, datang dari sektor pengelolaan sampah. Kelola Sendang membuat segala lapisan masyarakat bertaut, memperlancar komunikasi.

“Kami selalu diajak dalam berbagai perencanaan dan diskusi. Sekarang perubahan sudah ada, walaupun kecil. Paling tidak masyarakat sudah tahu, terutama masalah sampah. Setidaknya sekarang yang di jalan sudah tidak ada lagi,” katanya. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin itu merasa pemerintah tidak lagi sendirian dalam hal, umpamanya, infrastruktur dan pembinaan sumber daya manusia. “Tapi kemitraan tetap dibutuhkan,” ujarnya. “Contohnya Yayasan Penabulu. Mereka membantu memberikan edukasi ke masyarakat. Kami tetap butuh itu.”

Harapan terbesarnya adalah masalah-masalah berat di Sungsang seperti sampah perlahan-lahan akan teratasi. Itu, menurut dia, akan membuat Sungsang menjadi primadona wisata. “Kalau sudah begitu, tingkat kemiskinan bisa terangkat berkat pariwisata. Sebab, di tingkat kabupaten, angka (kemiskinan) lebih dari 11 persen, sementara target bupati satu digit,” katanya.

Di tingkat masyarakat, Nafian Ham, tokoh berpengaruh di Sungsang, mengapresiasi keterlibatan banyak pihak di kampung halamannya itu. Dia merasa ada bagian dari program intervensi yang bisa diselipkan ke kultur setempat, misalnya pernikahan. “Saya rasa ide untuk memberikan ‘tedmon’ (tangki air) sebagai mas kawin itu bisa diterima,” ujarnya.

Ikan hasil tangkapan nelayan yang siap dijemur untuk diubah menjadi ikan asin.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

# HAMA TIKUS DAN SIASAT SERAK JAWA

Warga Desa Sumber Rejeki menggunakan burung hantu sebagai musuh alami untuk membasmi hama tikus yang mengganggu pertanian mereka.

FOTO:  
MICHAEL C MATTHEW

**D**i permukaan, Sumber Rejeki mirip kawasan Gianyar di Bali yang dikuasai warna hijau. Bedanya adalah permukaan tanah desa di Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, ini datar belaka, juga baru ditembus listrik pada akhir 2019.

Seperti enam desa lainnya di Karang Agung Ilir, Sumber Rejeki dibangun melalui program transmigrasi sejak 1982. Bukan hal ganjil, karenanya, jika di desa ini terhampar sawah dan perkebunan kelapa yang luas dengan jalur-jalur irigasi yang dibangun secara sistematis.

Dengan infrastruktur itu, yang memungkinkan masyarakat menjalankan budi daya tanaman secara permanen, Sumber Rejeki menjadi unggulan usaha produksi pangan, terutama padi. Berbeda dari parit di Jawa pada umumnya, yang biasanya mengalirkan air dari daerah pegunungan ke kawasan persawahan, irigasi di Karang Agung Ilir berfungsi sebagai saluran drainase. Dalih keberadaannya satu: kawasan persawahan masih terkena dampak pasang surut air laut maupun sungai yang terdapat di sekitar desa.

Untuk sampai ke Sumber Rejeki, orang butuh menumpang perahu melalui sejumlah muara dan kanal distribusi sawit serta kelapa. Setelah singgah di dermaga-dermaga kecil yang terserak di sejumlah tempat, pemandangan berikutnya adalah kawasan pastoral nan hening.

“Di sini primernya ada pintu, makanya perahu tidak bisa masuk,” kata Mujiyanto, Kepala Desa Sumber Rejeki, pada 25 Januari

2020. Kata primer yang dia sebut mengacu kepada jaringan irigasi primer. Menurut dia, jaringan ini yang membedakan Sumber Rejeki dengan Desa Tabala Jaya, yang jaringan irigasinya tanpa pintu.

Di balik keelokan itu, masyarakat Sumber Rejeki sungguh bergelut dengan problem nan seolah-olah tak berujung. Lahan persawahan mereka dihinggapi pirit (kelebihan zat besi). Berbagai metode berbasis kimia telah diterapkan, tapi tidak memperbaiki kualitas tanah. Itu sebabnya produksi gabah per hektare terus turun dari sekitar 9 ton pada awal 2000-an menjadi 3-4 ton beberapa tahun belakangan.

Kondisi tersebut diperparah oleh populasi tikus yang sulit dikendalikan. Sudirman, ketua gabungan kelompok tani setempat, mengatakan saat lonjakan populasi tikus mengalami puncaknya pada Juli atau Agustus, mereka pasti kelimpungan. “Anak-anaknya yang masih kecil itu yang ganas. Makannya ?nggak? seberapa, tapi mengerat terus, bikin padi jatuh ke tanah semua. Itu yang parah. Merusak untuk musim tanam kedua,” ujarnya. Sejumlah cara dijalankan masyarakat dan penyuluh pertanian. Mulai dari penyebaran rodentisida hingga memagari sawah dengan seng, plastik/fiber, atau listrik. Hasilnya tak ada yang memuaskan. Ini sebelum Kelola Sendang memasukkannya ke dalam program.

## Menampik Tikus dengan *Tyto alba*

Seperti Sungsang, Sumber Rejeki menjadi sasaran program setelah penyelenggaraan lokakarya desa Area Model 3 di Palembang pada 22 Juni 2019, yang salah satu prioritasnya adalah

peningkatan produksi pertanian. Prioritas ini, dalam kata-kata Koordinator Project Implementing Unit Kelola Sendang, Hendrian, diharapkan sanggup mendorong masyarakat untuk “meningkatkan kesejahteraannya—*livelihood*—dan memberdayakan mereka”.

Lantas dalam pelaksanaannya, tim Kelola Sendang-Penabulu bersama para petani dan penyuluh lapangan berinisiatif mengembangkan populasi burung hantu jenis *Tyto alba*—dikenal pula dengan sebutan serak jawa—sebagai predator alami tikus sawah di wilayah ini. Inisiatif ini didukung penuh oleh pemerintah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Karang Agung Ilir, Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin, dan Taman Nasional Sembilang.

Tim survei yang mempelajari kemungkinan pengembangan itu turun ke lapangan pada 10-18 September 2019. Hasil yang didapat memastikan rencana dapat dilaksanakan. Populasi *Tyto alba* terbukti ditemukan di wilayah desa-desa sasaran. Burung ini bahkan ketahuan bersarang di sejumlah bangunan, seperti di Kantor Desa Sumber Rejeki.

Survei melibatkan pengelola Pusat Studi dan Konservasi Serak Jawa (*Tyto alba*), Lim Wen Sin, seorang lulusan Program Studi Biologi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Di antara warga Sumber Rejeki yang mengikuti survei adalah Sudirman, ketua gabungan kelompok tani.

Sudirman, pria 51 tahun yang kini menjadi koordinator urusan serak jawa, menceritakan bagaimana mereka melakukannya. “Kami siang-siang itu mencari jejak tempat burung hantu bertengger dengan keluar-masuk kebun. Yang dicari adalah kotorannya. Waktu itu dua malam berturut-turut belum ketemu, sampai kami naik ke bangunan walet tua yang sudah enggak difungsikan. Naik sampai menaranya. Kalau roboh, ya, kami selesai,” kata Sudirman.

Ketika malam datang tim survei melacak jejak-jejak buruan



Mita, anggota PKK Desa Sumber Rejeki, sedang mengerjakan demplot agroekologi.

FOTO: BONARDO MAULANA

yang ditinggalkan burung hantu. “Pak Lim itu paham betul ketika harus membedakan sisa potongan tikus hasil buruan elang atau burung hantu. Setelah yakin bahwa spesies burung *Tyto alba* di sini banyak, akhirnya *gupon* didirikan,” katanya.

Pada 25-29 Oktober 2019 tim Kelola Sendang-Penabulu dan para petani mulai menegakkan percontohan (demplot) rumah *Tyto alba*? beserta tenggerannya di Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya. Meski begitu, butuh beberapa pekan bagi para petani untuk dapat menerima eksistensi demplot, terutama mereka yang memiliki gedung walet. Sebab, menurut mereka, burung hantu mengganggu walet dalam menghasilkan sarang. Baru setelah diyakinkan bahwa burung hantu takkan mengganggu walet, mereka membuka diri.

“Waktu saya utarakan ke kelompok (tentang *Tyto alba*), mereka benar enggak peduli. Usaha untuk memperkuat akhirnya ya dari kelompok dan gabungan kelompok. Setelah ada bukti bahwa (metode *Tyto alba*) benar efektif, akhirnya mulai meluas,” ujar Sudirman.

Yang Sudirman maksudkan dengan “meluas” adalah terpan tiknya motivasi para petani untuk mendirikan tenggeran dan rumah burung atau *gupon* meski harus mengeluarkan ongkos sendiri. Baginya, keputusan demikian logis saja. Patokannya adalah cara-cara lama yang sudah mereka lakukan. Pemusnahan tikus secara musiman, yakni berlangsung menjelang waktu tanam, tak berujung menggembirakan. Karenanya, setelah melihat sendiri

bagaimana predator-predator alami itu bekerja baik dengan intervensi tenggeran, Sudirman bilang gelombang respons positif dari para petani tinggal menunggu waktu. “Metode efektif, murah-meriah, dan berkesinambungan,” katanya. Berlaku sebagai bonus: *Tyto alba* menjadi semacam satpam yang bekerja tanpa putus untuk menangkal hama tikus.

Dari lima demplot intervensi, kini rumah burung hantu di Sumber Rejeki telah mencapai 25 unit. “Itu sudah sepaket den-

gan tenggerannya,” kata Sudirman. Bagusnya lagi, desa-desa tetangga seperti Jatisari, Mekarsari, dan Karangsari ketahuan melirik metode *Tyto alba* itu. “Mereka tanya-tanya dulu sebelumnya kepada kami. Setelah mereka lihat kondisi tanaman di sini aman, lalu mereka tertarik. Ketertarikan itu terlihat mulai pascatanam November,” ujar Umar, 34 tahun, anggota tim Sudirman.

Pemanfaatan *Tyto alba* sebagai agen hayati dalam pengendalian hama tikus di kawasan persawahan melahirkan pelajaran ekologi yang berarti bagi para petani. Mereka dapat mengetahui dan membuktikan bahwa ada peluang untuk mengembangkan langkah-langkah ramah lingkungan dalam mengatasi masalah pertanian. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hama tikus, tapi juga pupuk, pestisida, dan lain-lain. Ini selaras dengan kata-kata Direktur Proyek Kelola Sendang, Prof. Damayanti Buchori, bahwa karakteristik program Kelola Sendang di Sumatera Selatan adalah *science-based approach*. Programnya menciptakan model-model pendekatan di tingkat tapak yang didasari riset-riset dan teori yang langsung diterapkan.

Namun, diam-diam, Sudirman cemas juga dengan berjalannya program *Tyto alba*. Soalnya, pendirian *gupon* dan tenggeran di desa-desa tetangga membikin burung-burung predator itu kini tidak hanya berburu di wilayah Sumber Rejeki. “Burungnya mencar ke desa-desa sebelah,” katanya.

Sudirman dan rekan-rekannya menyimpan kekhawatiran atas hal lain: mereka sampai sekarang belum mendapatkan cara paling mujarab untuk mengetahui apakah burung hantu sudah bersarang di rumah buatan atau belum. Penyebabnya adalah konstruksi *gupon* yang tidak memungkinkan pengecekan bisa dilakukan dengan mudah. “Satu-satunya cara harus dipanjat, dan itu berisiko sekali,” ujarnya.

Keyakinan mereka atas kedigdayaan *Tyto alba* membasmi tikus juga belum teruji betul karena di Sumber Rejeki belum tiba puncak populasi tikus, yang lazim terjadi pada Juli atau Agus-

tus. Namun, kata Sudirman, yang membuat mereka optimistis adalah fakta bahwa “burung hantu itu lebih banyak datang kala mangsanya juga banyak”.

## Belajar Mendongkrak Nilai Kopra

Optimisme semacam yang berlaku dalam pemanfaatan serak jawa tak begitu terlihat dalam hal lain: pelatihan pembuatan kopra putih. Padahal program ini bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah kepada produksi kopra Sumber Rejeki tidak saja berisi pelatihan, tapi juga pembangunan fasilitas pengolahan kopra putih, sarana produksi yang belum dua bulan berdiri saat penulis menengoknya pada Januari 2020.

Kopra putih potensial karena luas lahan kelapa di Sumber Rejeki, menurut Kepala Desa Mujiyanto, mencapai 30-35 persen dari luas lahan tanaman budi daya. Mujiyanto mengetahui detail luas lahan ini setelah Yayasan Puter Indonesia melakukan pemetaan dan pengesahan profil serta peta desa pada awal 2018. Sebelumnya dia tidak pernah mengetahui secara pasti tentang batas-batas desa serta data terperinci mengenai sumber daya di Sumber Rejeki.

Meski mengakui potensi kopra putih, Mujiyanto memberi catatan. Waktu program pelatihan kopra putih diperkenalkan, harga masih lebih tinggi daripada kelapa butiran. Itu sebabnya Saneman, salah seorang warga Sumber Rejeki, mengaku bersemangat mengikutinya. Belakangan harga kelapa butiran bisa melejit lagi. Karena hal inilah, sepanjang Januari, Saneman dan 40-50 kepala keluarga yang mengupayakan kopra tidak memproduksi kopra putih di fasilitas yang tersedia.

“Belum bisa jalan lagi. Harganya belum bisa bersaing dengan kelapa butiran,” ujar Saneman, sembari menyebutkan untuk membikin satu kilogram kopra dibutuhkan lima sampai enam butir kelapa sortiran. “Apalagi sekarang lagi musim sulam (padi). Jadi, nggak mungkin produksi kopra putih yang harganya lagi enggak masuk.”

## Mengulik Lahan Sayuran

Seperti Saneman, yang memperoleh pengetahuan mengolah kopra putih, istrinya, Mita, mendapatkan pelatihan untuk mempraktekkan agroekologi di Sumber Rejeki. Dalam pelatihan itu, Mita mendapat serangkaian keterampilan teknik dari aktivis tani perempuan, Nisa Wargadipura, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pembuatan kompos, pestisida organik, hingga panen dan penjualan.

Menurut Mita, jumlah total ibu-ibu yang mengerjakan hal itu tak tentu, meski anggota PKK Sumber Rejeki ada 60-an. “Enggak semuanya kerja. Paling yang berangkat hanya empat atau lima orang per dusun. Tiap minggu masing-masing dusun kebagian tugas mengurus. Di sini ada empat dusun,” katanya.

Demplot untuk penanaman berlokasi di belakang kantor Desa Sumber Rejeki, berukuran 4 x 70 meter, dan berdiri di atas lahan persawahan milik kantor desa. Usianya baru 1,5 bulan dan sudah mengalami panen. “Ini sudah dua kali panen kalau kangkung. Kalau bayam, belum karena tanahnya belum gembur,” kata Mita.

Selain dua jenis sayuran itu, demplot berisi cabai, kacang, timun, seledri, sawi, dan terung. “Tapi, ya, sebenarnya kalau sesuai sama aturan, bisa berhasil. Cuma waktu awal itu ada ibu-ibu

Demplot agroekologi di belakang Balai Desa Sumber Rejeki.

FOTO: BONARDO MAULANA

yang punya kemauan sendiri. Diminta bawa abu hitam dari gudang, yang dibawa malah yang putih. Padahal itu kurang bagus, masih panas. Ada yang baru selesai dibakar juga, belum terlalu dingin, tapi sudah dibawa,” kata Mita pula.

Mita dan rekan-rekannya memakai bibit yang mereka semai sendiri di rumah. Mereka sempat memakai bibit yang dibeli, tapi malah gagal tumbuh.

Mita bercerita harga sayuran hanya mahal kalau sedang musim kemarau, karena tak ada yang menanam. “Susahnya kalau menanam itu ya penyiramannya. Jauh untuk mengambil air. Saya dapat pelatihan ya pas kemarau kemarin itu, bulan Oktober atau November, jadi enggak sempat praktik,” ujarnya.

Hasil panen kangkung dijual ke anggota PKK. Sekali panen didapat 15 ikat, seikatnya dijual Rp 4.000. “Kalau di pasar Rp 5.000,” kata Mita.

Mita dan dua orang lain yang ditemui di demplot, Siti Fatimah dan Ngatmini, berniat meneruskan program tersebut. Hanya saja, mereka belum tahu bagaimana menyiasatinya jika kemarau mendera.

## Menuju Cadangan Air Hujan Lebih Baik

Sumber Rejeki, seperti Sungsang, sangat mengandalkan air hujan sebagai sumber air untuk konsumsi maupun produksi. Air hujan membantu warga terus bisa minum dan memasak, atau mengolah lahan secara optimal. Jika pengembangan tadah hujan dijalankan secara strategis, kondisi kemarau panjang—seperti

terjadi pada 2019—kemungkinan bisa disiasati. Karena itu, Kelola Sendang memandang peningkatan kualitas dan pembangunan sarana dan

prasarana dasar menjadi program prioritas di Area Model 3, dan pembangunan sarana air bersih melalui gerakan panen air hujan—seperti di Sungsang—dapat menjadi solusi. Menurut Mujiyanto dan Saneman, program itu awalnya tidak disambut baik oleh masyarakat. Apalagi saat mereka mendengar alat elektrolisa bisa membikin air hujan aman untuk langsung diminum. Alasannya, banyak warga selama ini sudah biasa menadah hujan dengan cara konvensional dan merasa baik-baik saja. “Warga sini itu biasa minum air rebusan,” kata Saneman.

Rupanya, maksud tersirat dari perkataan “bisa langsung diminum” tidak tertangkap. “Maklum kami rata-rata SD saja tidak lulus,” ujar Saneman, mengomentari keadaan ketika akhirnya warga paham bahwa alat elektrolisa berfungsi memperbaiki kualitas air hujan ke titik optimalnya. “Mereka (warga) mikirnya selama ini minum air hujan tanpa disaring, ya sehat-sehat saja,” kata Mujiyanto menimpali.

Di Karang Agung Ilir, instalasi percontohan dipasang di kantor Desa Sumber Rejeki, kantor Kecamatan Karang Agung Ilir, dan kantor Desa Tabala Jaya. Pemasangannya dilakukan dengan bergotong royong. Secara teknis, Mujiyanto mengatakan, pemasangan instalasi tidak sulit. “Semua warga bisa melakukan



**Susahnya kalau menanam itu ya penyiramannya. Jauh untuk mengambil air**



**MITA**  
Anggota Pelatihan

nya,” ujarnya, “dan dapat barangnya mudah. Paling satu-dua harus ambil dari Palembang.”

Belakangan Mujianto memutuskan memasang instalasi tersebut di rumahnya secara mandiri. Dia berharap, pelan-pelan setiap rumah di Sumber Rejeki bisa menerapkan metode yang ditawarkan program Kelola Sendang. Hanya saja, seperti di Sungsang, alat elektrolisa belum dia uji coba. “Saya menunggu ada orang dari Penabulu saja untuk memasang,” katanya.

## Masih Butuh Pendampingan

Secara umum, masyarakat yang tersentuh program Kelola Sendang menyatakan faedah nyatanya. Sudirman dan Umar, yang langsung berhadapan dengan program ?Tyto alba?, misalnya, merasakan peningkatan kapasitas yang signifikan. “Seharusnya enggak cuma program burung hantu ini saja, tapi juga yang lain-lain. Kami ‘kan juga butuh pengetahuan untuk hal-hal lain yang bermanfaat bagi kami sebagai petani,” ujarnya. “Dan kalau bisa masih ada yang diteruskan.”

Mujianto, Kepala Desa Sumber Rejeki, mengakui banyak hal dia dapatkan dari program, terutama bagian pemberdayaan masyarakat. “Makanya, saya kira, pendampingan kalau bisa jangan diputus. Kami masih butuh,” katanya.

# GURU TUNG BERDIRI, MURID TUNG BERLARI

Seorang murid SMA di Tungal Jaya, Musi Banyuasin, memamerkan baju dari sampah.

FOTO: KELOLA SENDANG

**D**ALAM soal limbah, Dewi Tunggalman— Guru Tung—kalah set oleh muridnya. Begini ceritanya. Sekolahnya, SMPN 2 Tungal Jaya, tempat ia menjadi kepala sekolah, punya program sampah yang mungkin tiada duanya di Indonesia. Dalam program ini, siswa yang telat datang atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dihukum untuk membawa sampah apa pun dari rumah. Bisa plastik, kaleng, besi—apa saja selama non-organik. Boleh juga sampah organik kering seperti kertas, kardus, dan yang semacamnya.

Sampah itu akan diubah menjadi karya seni di kelas Prakarya dan Kewirausahaan. Yang tidak terpakai dijual ke pengepul.

Program itu baru berjalan seumur jagung ketika murid-muridnya mengusulkan program yang lebih keren: mengelola sampah secara “profesional” melalui bank sampah sekolah. Mekanismenya meniru Bank Sampah Tungal Ceria di kecamatan mereka, Tungal Jaya. Tapi pengelolaannya di tingkat sekolah.

“Jadi, yang bersih bukan hanya rumah siswa yang kena hukuman, tapi semua rumah orang tua siswa. Sekolah juga jadi punya pendapatan,” kata Ratna Juti Ningsih, guru SMPN 2 Tungal Jaya, Jumat, 24 Januari 2020, di sekolahnya.

Yang mengusulkan pendirian bank sampah itu adalah murid-murid yang menjadi kader Generasi Hijau. Inilah kader binan Zoological Society of London (ZSL) dalam program Kelola Sendang di lanskap Sembilang-Dangku, termasuk Tungal Jaya.

Generasi Hijau merupakan program *Community Outreach and Awareness* (COA). “Maksud dari program ini adalah bagaimana mempersiapkan generasi hari ini sehingga di masa depan menjadi pejuang lingkungan dalam perlindungan SDA (sumber daya alam), pemanfaatan SDA, dan pengawetan SDA,” kata La Ode Muhammad Rabiali, koordinator COA.

Program terkait sampah di Lanskap Sembilang-Dangku penting digelar karena limbah ini menjadi persoalan serius di 21 desa yang menjadi area kerja Kelola Sendang di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Meskipun volume sampahnya belum diketahui secara persis, masalah akibat sampah ini sudah terlihat. Di Desa Sungsang, Banyuasin, misalnya, sampah membuat perkampungan seperti berdiri di pulau sampah.

Di SMPN 2 Tungkal Jaya sampah juga pernah menjadi masalah. “Sebelum program sampah Kelola Sendang masuk ke sekolah kami, sampah gampang berserakan. Kala itu belum ada kesadaran kolektif untuk membuang sampah pada tempatnya,” kata Jaruki, guru dan pembina OSIS SMPN2 Tungkal Jaya.

Walhasil, Guru Tung gembira tak kepalang menerima usulan murid-muridnya untuk membentuk bank sampah. Ini merupakan langkah maju berikutnya untuk menurunkan volume sampah.

## Generasi Hijau

Menurut La Ode, salah satu penyebab munculnya masalah sampah di Lanskap Sembilang-Dangku memang volumenya yang melebihi kemampuan untuk mengangkutnya. Ia tak dapat menyebut angkanya karena, itu tadi, datanya masih minim. Namun, sebagai gambaran, di Kota Palembang saja, yang memiliki

103 truk sampah, 100 gerobak sampah, 424 tempat pembuangan sampah (TPS), dan 114 alat berat, jumlah sampah yang mampu diangkut hanya 73 persen dari total volume sampah harian 780 meter kubik. Itu angka tahun 2015. Tahun ini wallahualam.

“Karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu sampah sangat urgen,” ujarnya. Tujuannya bukan saja untuk mendorong kesadaran soal bahaya sampah, namun juga agar masyarakat mulai menginisiasi pola pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil yang diharapkan adalah lingkungan yang lebih bersih dan penghidupan menjadi lebih layak.

Kelola Sendang membidik generasi muda dalam program itu. “Karena pembinaan dan pembangunan generasi hijau sebaiknya dilakukan sejak dini,” ujar La Ode. “Kepada merekalah masa depan lingkungan kita percayakan.”

Kampanye di SMP-SMA di Tungkal Jaya dimulai pada 2018. Topiknya tak melulu sampah, tapi juga aspek-aspek lingkungan lainnya. “Tahap pertama kami fokus pada peningkatan kapasitas, lalu meningkatkan kepedulian dan keterampilan,” kata La Ode. “Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup.” Salah satu kampanye besar COA dilakukan pada 17 Agustus 2018. Kelola Sendang-ZSL bersama pelajar SMA Negeri 1

Tungkal Jaya menggelar Kampanye Peduli Sampah pada acara karnaval perayaan Hari Kemerdekaan. Para pelajar ikut



***Karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu sampah sangat urgen***



**LA ODE MUHAMMAD RABIALI**  
Koordinator COA.



Murid-murid SMPN 2 Tungkal Jaya memilah sampah di Bank Sampah Sekolah.

FOTO: KELOLA SENDANG

pawai dari kantor kecamatan ke lapangan Tungkal Jaya sejauh 3 kilometer. Jumlah total peserta karnaval diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Partisipan pelajar COA sebanyak 150 orang, terdiri atas 40 siswa, 110 siswi.

Partisipan COA mengenakan baju dan gaun yang terbuat dari berbagai sampah bekas. Sampahnya aneka macam, desainnya juga beraneka ragam. Kegiatan ini, menurut La Ode, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan, khususnya sampah; meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan; dan mendorong perubahan sikap masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.

Ada dua pesan lingkungan yang ingin disosialisasikan melalui kegiatan ini. Pertama: “2019 Kecamatan Tungkal Jaya Bebas Sampah. Kedua: “Selamatkan Bumi Kami dari Sampah Plastik”.

“Pesan ini penting karena sampah berbahaya,” kata Novaldi, murid kelas 9 dan kader Generasi Hijau SMPN 2 Tungkal Jaya.

“Sampah plastik hancurnya lama. Bisa membunuh mahluk hidup,” kata Najwa Athaya, juga kader Generasi Hijau SMPN 2 Tungkal Jaya.

Dalam kegiatan HUT RI itu partisipan COA juga memper-tunjukkan seni tari daerah Harmoni Gala Tama. Tarian ini setiap gerakannya mengartikulasikan pelestarian lingkungan desa.

Pada 20 Agustus 2018, giliran COA menggelar aksi peduli pengelolaan sampah berkelanjutan di SMA Negeri 1 Tungkal Jaya. Acaranya: ?fashion show? gaun daur ulang sampah plastik. Pesertanya para pelajar SMA Negeri 1 Tungkal Jaya sebanyak 286 orang—120 laki-laki, 166 perempuan. Dalam kegiatan ini COA juga memberikan sejumlah materi, di antaranya pola pemilahan sampah plastik, kertas, besi, dan sisa makanan, dan Kelembagaan Sampah.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan itu, menurut La Ode, adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dalam hal penge-

lolaan sampah, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap sampah serta pengelolaannya yang berkelanjutan, dan terbentuknya Kader Konservasi Lingkungan. Kader

Konservasi Lingkungan Kecamatan Tungkal Jaya ini diharapkan menjadi embrio Generasi Hijau di Musi Banyuasin. Jumlahnya 13 orang, terdiri atas delapan siswa dan lima siswi.

Ada beban berat di pundak mereka. “Kami diharapkan berperan di depan dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sumber daya alami hayati dan ekosistemnya secara lestari,” kata Padilla Choirunissa, kader Generasi Hijau angkatan pertama. Pemda tentu saja senang dengan misi itu. Sebagai bentuk dukungan untuk kegiatan ini, kader diangkat melalui Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin.

## Dari Bak Sampah ke Bank Sampah

Nah, di antara kader Generasi Hijau itu ada murid-murid SMPN2 Tungkal Jaya. Namun ide untuk mendirikan bank sampah baru mereka dapatkan di tahun berikutnya, setelah COA bekerja sama dengan PT Kahuripan Ceria Indonesia (KCI) mendirikan Bank Sampah Tungkal Ceria di Desa Simpang Tungkal pada Januari 2019.

Inilah program COA ZSL lainnya melalui Kelola Sendang di Lanskap Sembilang-Dangku dalam soal sampah, yakni membangun bank sampah di tingkat desa. “Prinsip dasar dari bank

sampah ini adalah bagaimana sampah-sampah rumah tangga bisa didaur ulang sehingga menciptakan nilai ekonomi,” kata La Ode.

Warga Tungkal Jaya diminta memilah sampah rumah tangga mereka berdasarkan jenisnya. Bank Sampah Tungkal Ceria kemudian membeli sampah itu dengan harga yang telah disetujui sebelumnya. Sampah yang telah dibeli kemudian diolah menjadi komoditas yang dapat dijual kembali.

“Sampah plastik dan ban karet, misalnya, dapat dibuat menjadi kerajinan tangan seperti vas bunga, meja, kursi,” ujar La Ode. “Yang membuat kerajinan itu adalah warga sana juga, yang diberdayakan Bank Sampah Tungkal Ceria.” Namun tak mudah menjalankan Bank Sampah Tungkal Ceria. Dari FGD (diskusi kelompok terfokus) yang digelar COA diperoleh setidaknya tiga hal yang bisa menghambat gerak maju bank ini. Tantangan pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. “Mengubah perilaku dan paradigma masyarakat soal sampah masih berat. Sosialisasi dan penyadaran dari atas ke bawah tidak berjalan, sehingga mungkin sudah saatnya mencoba pola baru, dari bawah ke atas” ujar Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin Bidang Infrastruktur dan Investasi, Joyce Sandra. “Pendidikan mengenai sampah harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak

**Pendidikan mengenai sampah harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak usia dini, ditambah dengan pendidikan dari orang tua ke anak yang seharusnya dimulai dari rumah**

**JOYCE SANDRA**  
Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin



Baju dari sampah yang dipamerkan murid SMA lainnya di Tungal Jaya.

FOTO: KELOLA SENDANG

usia dini, ditambah dengan pendidikan dari orang tua ke anak yang seharusnya dimulai dari rumah,” dia menambahkan.

Tantangan kedua terkait campur aduknya jenis-jenis sampah. Hal ini biasanya terjadi di tiga tempat: di rumah, saat pengangkutan sampah, dan di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Jalan keluarnya, menurut La Ode, mengutip hasil FGD, “Selesaikan dulu pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, terutama untuk sampah plastik, sehingga akan meringankan proses-proses selanjutnya.”

Tantangan terakhir adalah masalah pemasaran. Direktur PT KCI Gunata Kusuma merasakan betul hal ini. Soalnya, perusahaannya sebelumnya telah mengelola bank sampah di wilayah Taman Nasional Sembilang sejak 2018. “Masih ada beberapa produk hasil olahan sampah tertentu yang tidak ada pembelinya sehingga rantai bisnis tidak selalu berjalan lancar,” ujarnya.

Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin mempunyai pengalaman serupa dengan bank sampah binaan mereka, Barokah, di beberapa desa. “Bank Sampah Barokah sebenarnya sudah berjalan cukup baik dari sisi manajemen, namun kami masih kesulitan memasarkan beberapa hasil produknya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Wijaya Busro.

Toh, Bank Sampah Tungal Ceria berjalan ceria. Hingga kini bank itu telah memiliki 43 nasabah. Mereka berasal dari berbagai kalangan: orang dewasa, anak-anak, guru, kepala desa, hingga satpam.

Pemda punya harapan besar terhadap bank sampah ini. “Program seperti bank sampah ini yang selama ini kami cari. Setiap desa dan kecamatan harus bisa belajar mengelola dan mengolah sampah masing-masing secara mandiri,” kata Andi Busro.

Rupanya, bukan cuma desa dan kecamatan yang bisa belajar dari Bank Sampah Tungal Ceria. Tapi sekolah juga, seperti SMPN 2 Tungal Jaya. “Ide anak-anak mendirikan bank sampah sekolah memang setelah mereka melihat Bank Sampah Tungal

Ceria. Namun tak seketika,” kata Yulius Surya Prihantoro, pembina di SMPN2 Tungal Jaya.

Anak-anak itu, menurut dia, masih ditempa dulu dalam beberapa kegiatan COA. Salah satunya Festival Peduli Sampah untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari. Kelola Sendang-ZSL dalam festival ini mengadakan serangkaian kegiatan di beberapa desa di Kecamatan Tungal Jaya, dari 18 Februari hingga 1 Maret 2019. ?Tagline-?nya: “Dulu Masalah Sekarang Berkah”.

Kegiatannya berupa ?workshop?, ?talkshow?, dan lomba. “Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Tungal Jaya karena ZSL bersama KCI sedang mengembangkan bisnis bank sampah di desa Simpang Tungal dan Peninggalan di kecamatan itu,” kata La Ode. Melalui kegiatan tersebut diharapkan program bank sampah dapat disosialisasikan dan dijadikan kegiatan utama di desa-desa lainnya di Tungal Jaya.

Pada hari pertama, Kelola Sendang-ZSL melakukan kegiatan penyadaran lingkungan di sekolah-sekolah. ?Kick off?-nya di SMPN 2 Tungal Jaya. Dalam kegiatan yang diikuti 70 siswa dan 95 siswi ini, Kelola Sendang-ZSL mensosialisasikan cara membangun model pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Esok harinya acara berpindah ke SMPN 10 Tungal Jaya. Pada Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari, giliran Kelola Sendang-ZSL menggelar ?workshop ?peduli sampah di Aula Kecamatan Tungal Jaya, yang dihadiri Camat, Kapolsek, UPTD Diknas dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, kepala desa, pelaku usaha (Indomart, Alfamart, PT KCI), institusi pendidikan, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna. Jumlah peserta sekitar 130 orang. Dalam ?workshop ?ini warga mendeklarasikan “Kecamatan Tungal Jaya Bebas Sampah 2019”.

Kegiatan penyadaran lingkungan di sekolah dilanjutkan pada tanggal 25 Februari. Kelola Sendang dan KCL bersama kader konservasi generasi hijau melakukan pembagian tong sampah or-

ganik dan non-organik di SMA 1 Tungal Jaya yang diikuti 25 siswa dan 31 siswi. Pada 28 Februari digelar lomba cerdas intelektual dan pidato yang diikuti lebih dari 80 peserta dari 7 SLTA se-Kecamatan Tungal Jaya di kantor Korwil V Diknas dan Kebudayaan. Materi lomba soal lingkungan, dari limbah, sampah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah, hutan, hingga gambut. “Topik-topik itu sengaja dipilih karena berkaitan dengan isu-isu lanskap di area model Kelola Sendang,” kata La Ode.

Festival Peduli Sampah diakhiri dengan *workshop* dan *talkshow* di SMA 2 Tungal Jaya dan Balai Desa Simpang Tungal mengenai skema bank sampah sebagai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam acara ini Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan SK bank sampah kepada Bank Sampah Tungal Ceria, Desa Simpang Tungal. Dinas Lingkungan Hidup juga berjanji akan memberikan dua motor sampah kepada Bank Sampah Tungal Ceria dan meminta perusahaan di sekitar Simpang Tungal untuk mengirim sampah mereka ke Bank Sampah Tungal Ceria.

Usai kegiatan ini, menurut Ratna, anak-anak kian giat mengumpulkan sampah. “Namun yang terpenting adalah kampanye itu telah menumbuhkan kesadaran anak-anak, juga masyarakat desa, akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya.

“Murid-murid saya sekarang, kalau ada tetangga hajatan,



**Murid-murid  
saya sekarang,  
kalau ada tetangga  
hajatan, akan men-  
gumpulkan sampah  
plastiknya, seperti  
bekas minum**



**RATNA JUTI NINGSIH**  
Guru SMPN 2 Tungal Jaya

● PRODUKSI  
GENERASI HIJAU  
SMP 10 TUNGKAL JAYA

LESTARI ALAMKU,  
LESTARI DESAKU,  
LESTARI GENERASIKU

# PEDULI LINGKUNGAN



Generasi Hijau  
SMP 10 Tung-  
gal Jaya, ujung  
tombak gerakan  
peduli sampah di  
sekolah.

FOTO: KELOLA SENDANG

## ● PRODUKSI

akan mengumpulkan sampah plastiknya, seperti bekas minum,” kata Ratna. “Saya kira ini baik, sekalian untuk mereka belajar bersosialisasi.”

Ibu rumah tangga, ujar Ratna lagi, kini juga rajin mengum- pulkan sampah setiap selesai kegiatan bersama. Misalnya setelah pengajian atau arisan. “Sampahnya lalu dijual ke bank sampah,” katanya.

Singkat cerita, murid-murid SMPN 2 Tungkals Jaya pun meng- usulkan agar sekolah punya bank sampah sendiri. Kegiatannya dimulai dengan pelantikan kader Generasi Hijau SMPN 2 oleh Kelola Sendang pada awal Agustus. Sepekan kemudian pengur- us bank sampah terbentuk. Terpilih enam murid SMP kelas tiga dan empat murid SMP kelas dua sebagai koordinator program. Enam murid kelas 3 SMP sengaja ditunjuk sebagai *role model* un- tuk adik-adik kelasnya. Sementara itu, empat murid yang diam- bil dari kelas dua SMP dipersiapkan sebagai pengganti kakak kelasnya. Pada 15 September 2019 bank sampah SMPN 2 Tung- kal Jaya itu resmi berdiri.

Pada bulan pertama siswa sudah konsistensi menyetur sampah. Mereka melakukannya setiap Sabtu. Demikianlah me- mang jadwal kerja bank sampah itu.

Setiap Sabtu pagi, setelah olahraga bersama, para murid berkelompok menurut kelasnya masing-masing. Mereka berbaris untuk menimbang sampah yang dibawa dari rumah, yang nanti- nya akan dipilah-pilah lagi oleh tim kerja berdasarkan jenisnya. Prosesnya biasanya sudah kelar dalam dua jam. Siswa boleh me- nyisihkan sampah yang berguna untuknya. Misalnya kalau ada buku. “Jika buku itu penting, ambil saja,” kata Ratna.

Sampah itu kemudian dijual kepada pengepul. Tiap pengepul menawarkan harga yang bisa “beda-beda tipis”. Namun bank sampah SMPN 2 Tungkals Jaya sudah mempunyai pengepul lang- ganan. Oleh pengepul ini, sampah kertas dan kardus dibeli Rp 700-1.000 per kilogram. Sampah plastik dihargai Rp 1.300-1.800

per kilogram. Besi dihargai antara Rp 3.000-3.500 per kilogram dan sampah aluminium seperti kaleng minuman soda setidaknya bernilai Rp 5.000 per kilogramnya. Sampah terbanyak di bank ini adalah kertas, kardus, dan plastik.

Penjualan pertama dari hasil pengumpulan sampah antara pertengahan Agustus dan pertengahan September cukup menggembirakan. Bank sampah memperoleh pendapatan lebih dari Rp 1 juta. Uang itu kemudian dijadikan aset, setelah ada yang disisihkan untuk membeli baju seragam berlabel Generasi Hijau dan perlengkapan operasional bank.

Menurut Ratna, sekolah tak mewajibkan siswa menyeter sampah setiap Sabtu. “Kami para guru tak menerapkan sistem *reward* dan *punishment*, tapi hanya *reward*-nya saja,” katanya. “Jadi, kelas yang mampu mengumpulkan sampah paling banyak pada sebuah minggu akan mendapat satu bungkus permen. Tetapi, kelas yang tidak membawa sampah sama sekali tidak kita apa-apakan.”

Alasannya, ujar Ratna, sekolah ingin anak-anak mengumpulkan sampah dengan kesadaran sendiri. “Bukan karena dipaksa oleh ketakutan terhadap hukuman atau aturan,” katanya.

## Mimpi Baru Guru Tung

Bulan ketiga, Oktober 2019, pendapatan Bank Sampah SMPN 2 Tungkal Jaya sudah stabil. Melihat perkembangan ini, Guru Tung berharap bank sampah sekolah bisa memberi manfaat tambahan kepada para muridnya. “Jadi, tak sekadar melestarikan lingkungan,” ujarnya kepada La Ode.

Bank sampah, ujar Guru Tung, mungkin bisa menjadi salah

satu solusi keuangan alternatif untuk murid-muridnya. Karena itu, ia berharap bank sampah bisa membuka layanan semacam nasabah sampah dengan pencatatan yang jelas dan terperinci.

“Bayangkan saja bila setiap bulannya kita bisa menghasilkan lebih dari Rp 1 juta. Maka, anak-anak yang rajin menabung sampah tapi kurang mampu akan bisa membeli perlengkapan sekolah dari hasil pengumpulan sampah-sampahnya,” katanya lagi. Wah!

Kali ini Guru Tung menang set dari murid-muridnya.